

**Buku Monograf**

Kualitas **KEMISKINAN**  
Dalam Kerangka  
**SUSTAINABLE  
LIVELIHOODS**

DI KAWASAN PARIWISATA SUPERPRIORITAS LABUAN BAJO





BUKU MONOGRAF

KUALITAS **KEMISKINAN**  
DALAM KERANGKA  
**SUSTAINABLE**  
**LIVELIHOODS**  
DI KAWASAN PARAWISATA SUPERPRIORITAS  
LABUAN BAJO

Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si



**KUALITAS KEMISKINAN  
DALAM KERANGKA *SUSTAINABLE LIVELIHOODS*  
DI KAWASAN PARIWISATA SUPERPRIORITAS LABUAN BAJU**

---

---

Ditulis oleh:

Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-623-8649-49-5  
iv + 193 hlm; 18,2 x 25,7 cm.  
Cetakan I, April 2024

**Desain Cover dan Tata Letak:**  
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Media Penerbit Indonesia**  
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata  
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131  
Telp: 081362150605  
Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)  
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>  
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



# KATA PENGANTAR

---

---

Labuan Bajo, sebagai destinasi pariwisata superprioritas, memperlihatkan pesona alam yang memikat hati, namun di balik panorama indah tersebut, kita perlu membahas dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat yang hidup di tengah keberagaman ekonomi dan lingkungan yang berubah cepat. Melalui buku ini, penulis bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam terkait kualitas kemiskinan dalam konteks *sustainable livelihoods*. Pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, dan dampak pariwisata menjadi sorotan utama untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komunitas lokal.

Semoga buku ini dapat menjadi panduan bermanfaat bagi para pembaca yang tertarik memahami dinamika kemiskinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di kawasan pariwisata superprioritas Labuan Bajo.

Salam Hangat,

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengantar ke Buku Monograf .....	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Monograf .....	3
C. Latar Belakang Wilayah Penelitian .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Konsep Kemiskinan.....	11
B. <i>Sustainable livelihoods Framework</i> .....	29
C. Pariwisata Superprioritas Labuanbajo .....	39
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Desain Penelitian .....	45
B. Teknik Pengumpulan Data .....	51
C. Analisis Data.....	56
<b>BAB IV    KUALITAS KEMISKINAN DI KAWASAN             PARIWISATA .....</b>	<b>61</b>
A. Faktor Penentu Kualitas Kemiskinan .....	61
B. Dampak Pariwisata Terhadap Kemiskinan.....	68
C. Tantangan dan Peluang.....	71
<b>BAB V    SUSTAINABLE LIVELIHOODS DI             LABUANBAJO.....</b>	<b>77</b>
A. Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia .....	77
B. Inisiatif Pembangunan Berkelanjutan.....	83
C. Peran Pemerintah dan <i>Stakeholder</i> .....	90
<b>BAB VI    INTEGRASI KUALITAS KEMISKINAN             DAN SUSTAINABLE LIVELIHOODS .....</b>	<b>103</b>
A. Penilaian Kualitas Kemiskinan dalam Konteks <i>Livelihoods</i> .....	103
B. Strategi Peningkatan Kesejahteraan .....	110
C. Model Pengembangan Berkelanjutan .....	116

<b>BAB VII</b>	<b>PENGUKURAN INDIKATOR KEMISKINAN DAN SUSTAINABLE LIVELIHOODS .....</b>	<b>123</b>
A.	Metode Pengukuran Kualitas Kemiskinan .....	123
B.	Indikator Kesejahteraan dalam <i>Sustainable livelihoods</i> .....	130
C.	Perbandingan Data Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat.....	132
<b>BAB VIII</b>	<b>KEBIJAKAN PUBLIK DAN REGULASI.....</b>	<b>137</b>
A.	Peran Kebijakan Publik dalam Pembangunan Labuanbajo .....	137
B.	Evaluasi Regulasi Terkait Kemiskinan dan <i>Sustainable livelihoods</i> .....	140
<b>BAB IX</b>	<b>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN .....</b>	<b>147</b>
A.	Peran Aktif Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata.....	147
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat .....	150
C.	Dampak Partisipasi Masyarakat Terhadap Kemiskinan .....	158
<b>BAB X</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>165</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>169</b>
	<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>187</b>
	<b>INDEKS .....</b>	<b>189</b>
	<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>191</b>
	<b>SINOPSIS .....</b>	<b>193</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

---

---

### A. Pengantar ke Buku Monograf

Kawasan Labuan Bajo, yang kini menjadi Destinasi Pariwisata Superprioritas, telah menarik perhatian sebagai pintu gerbang wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Namun, di balik potensi keindahan alam dan kekayaan budaya, ada tantangan signifikan terkait dengan kualitas kemiskinan. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 16,82% dari total penduduk di Kabupaten Manggarai Barat, yang mencakup Labuan Bajo, berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun peringkat pariwisata Indonesia telah meningkat, tetapi masih kalah dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Presiden Joko Widodo merespon situasi ini dengan mencanangkan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Superprioritas, termasuk Labuan Bajo, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak wisatawan. Meskipun demikian, kesuksesan pariwisata tidak selalu berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada konteks *Sustainable livelihoods Framework*, kita dapat melihat bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata dapat memengaruhi mata pencaharian dan kualitas hidup masyarakat setempat. Peningkatan jumlah wisatawan mungkin membuka peluang baru, tetapi

juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan biaya hidup dan ketidakseimbangan ekonomi. Selain itu, ada enam arahan dari Presiden Joko Widodo yang mencakup tata ruang, akses, fasilitas, Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran produk lokal, dan promosi destinasi.

Pembangunan infrastruktur seperti terminal multipurpose dan penyelesaian bandara juga menjadi faktor kunci. Namun, penting untuk memastikan bahwa infrastruktur ini berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan lingkungan, bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Dalam menguraikan masalah ini, penelitian ini tidak hanya berfokus pada statistik kemiskinan tetapi juga melibatkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat. Ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi, sehingga kebijakan dapat dirancang dengan lebih akurat dan efektif.

Dari pembahasan tersebut, terlihat bahwa pengembangan sektor pariwisata, khususnya destinasi pariwisata super prioritas seperti Labuan Bajo, merupakan salah satu strategi yang diadopsi oleh Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun demikian, ada ketidaksesuaian antara rencana pembangunan kawasan pariwisata dan kenyataan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu fokus utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan, khususnya di wilayah perdesaan. Meskipun demikian, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat malah mengalami peningkatan sebesar 17,92%, naik 0,2% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan angka kemiskinan yang terjadi dapat menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat pencapaian target nasional di mana persentase kemiskinan diharapkan tidak lebih dari 8%. Jika tren ini berlanjut, diperlukan waktu lebih dari 20 tahun untuk mencapai target tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana pembangunan pariwisata dan hasil yang diharapkan dalam penurunan tingkat kemiskinan. Ketimpangan dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan terlihat dari kondisi kemiskinan yang masih tinggi, meskipun terdapat rencana pembangunan kawasan pariwisata prioritas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Namun, perluasan dan pendalaman upaya dalam strategi dan implementasi kebijakan dapat menjadi langkah kritis dalam mengatasi ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan dan realitas tingginya tingkat kemiskinan. Langkah-langkah konkret dan terarah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dapat membantu memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **B. Tujuan dan Ruang Lingkup Monograf**

### **1. Tujuan Pengembangan Kawasan Pariwisata Superprioritas Labuan Bajo**

Pengembangan kawasan pariwisata superprioritas Labuan Bajo menjadi salah satu inisiatif strategis Pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai destinasi yang kaya akan keindahan alam dan budaya, Labuan Bajo dianggap

memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun internasional. Mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama, dengan harapan bahwa pengembangan sektor pariwisata akan menciptakan dampak positif pada perekonomian lokal dan nasional. Dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Labuan Bajo, diharapkan akan terbentuk lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor terkait pariwisata seperti perhotelan, transportasi, dan usaha kecil menengah yang mendukung industri pariwisata.



Sumber: *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

Selain menggerakkan roda perekonomian, tujuan lain yang tidak kalah penting adalah penurunan tingkat kemiskinan di kawasan Labuan Bajo. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui peningkatan aktivitas pariwisata, diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga, memberikan peluang usaha baru, dan secara keseluruhan mengurangi tingkat kemiskinan di Labuan Bajo.

## **2. Ruang Lingkup Peningkatan Kualitas Hidup dalam Kerangka *Sustainable livelihoods***

Ruang lingkup pengembangan kawasan pariwisata superprioritas Labuan Bajo dalam kerangka *Sustainable livelihoods* mencakup aspek-aspek berikut:

- a. **Pengentasan Kemiskinan:**  
Fokus pada upaya mengurangi tingkat kemiskinan di kawasan Labuan Bajo melalui program-program dan proyek-proyek yang berkelanjutan.
- b. **Keberlanjutan Mata Pencaharian (*Livelihoods*):**  
Memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
- c. **Pelestarian Lingkungan:**  
Mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan ke dalam pengembangan pariwisata. Ini termasuk manajemen yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam, pengurangan dampak lingkungan, dan edukasi lingkungan untuk masyarakat dan pengunjung.
- d. **Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas:**  
Memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, bandara, dan pelabuhan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi tetapi juga memberikan manfaat bagi komunitas lokal.
- e. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal:**  
Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata.

Pemberdayaan melibatkan pelibatan dalam perencanaan, implementasi, dan manajemen destinasi pariwisata.

### **3. Integrasi *Sustainable livelihoods Framework***

Untuk mencapai tujuan dan ruang lingkup di atas, penting untuk mengintegrasikan *Sustainable livelihoods Framework*. Konsep ini mencakup lima elemen kunci: sumber daya (natural, fisik, manusia, keuangan, sosial), aktivitas (pekerjaan dan pendapatan), kerangka kebijakan (norma, nilai, aturan), kelembagaan (struktur sosial dan organisasi), dan hasil (kesejahteraan ekonomi dan sosial).

### **4. Tantangan dalam Pencapaian Tujuan dan Ruang Lingkup**

Meskipun tujuan dan ruang lingkup yang ambisius telah ditetapkan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya melibatkan konflik kepentingan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan, ketidaksetaraan akses ke manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, dan kurangnya koordinasi di antara *stakeholder* yang terlibat.

### **5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan**

Untuk memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, perlu adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Ini melibatkan pengumpulan data yang akurat, indikator kinerja yang sesuai, dan mekanisme evaluasi periodik untuk menilai dampak program terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

## **C. Latar Belakang Wilayah Penelitian**

Labuan Bajo, sebuah surga pariwisata di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, menjadi fokus utama penelitian ini. Terletak di kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, wilayah ini menonjol dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan kekayaan budayanya yang unik. Dengan status sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Labuan Bajo mengalami transformasi signifikan dalam infrastruktur dan pembangunan wilayah. Meskipun potensi pariwisata yang besar dapat menggairahkan pertumbuhan ekonomi, tantangan dan peluang yang muncul perlu dipahami secara menyeluruh untuk memastikan pengembangan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat.

### **1. Letak dan Geografi Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian ini terletak di Labuan Bajo, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Secara geografis, Labuan Bajo berada di kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Letaknya yang strategis di bagian barat Pulau Flores menjadikannya sebagai pintu gerbang utama memasuki pesona wisata Pulau Flores. Wilayah ini terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk Taman Nasional Komodo, yang menjadi habitat bagi hewan purba seperti Komodo.

### **2. Keunikan Budaya dan Keanekaragaman Alam**

Labuan Bajo terkenal dengan keunikan budaya dan keindahan alamnya. Budaya lokal yang kaya, termasuk keberagaman suku dan agama, memberikan warna tersendiri dalam pengalaman wisata. Selain itu, wilayah ini dikenal sebagai rumah bagi beberapa suku, seperti suku

Manggarai dan suku Bajo. Keberagaman etnis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang mencari pengalaman budaya yang autentik. Keanekaragaman alam Labuan Bajo juga memikat, mulai dari pantai-pantai indah, pulau-pulau eksotis, hingga kawasan Taman Nasional Komodo yang menjadi rumah bagi varietas hayati yang langka. Kombinasi antara keindahan alam dan warisan budaya membuat Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata yang menarik.

### **3. Potensi Ekonomi dan Pariwisata**

Labuan Bajo memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pariwisata. Dengan keunikan alam dan budayanya, Labuan Bajo menjadi tujuan favorit bagi wisatawan lokal dan internasional. Potensi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian wilayah dan nasional.

### **4. Status sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas**

Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas oleh Pemerintah Indonesia. Pengakuan ini menandakan pentingnya Labuan Bajo dalam mengembangkan sektor pariwisata nasional. Dalam kerangka ini, Pemerintah menetapkan berbagai program dan proyek untuk memajukan Labuan Bajo sebagai destinasi unggulan yang mampu bersaing di tingkat global.

### **5. Transformasi Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah**

Sebagai destinasi pariwisata super prioritas, Labuan Bajo mengalami transformasi infrastruktur yang signifikan. Pembangunan dan peningkatan sarana transportasi, seperti bandara dan pelabuhan, menjadi fokus untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah ini. Infrastruktur lainnya, termasuk pengembangan fasilitas akomodasi,

jalan, dan sarana pariwisata lainnya, juga menjadi bagian integral dari upaya memajukan Labuan Bajo.

## **6. Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Wilayah**

Meskipun Labuan Bajo memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata, wilayah ini juga dihadapkan pada tantangan tertentu. Pertumbuhan pariwisata yang pesat dapat menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan tekanan terhadap lingkungan, ketidaksetaraan manfaat ekonomi, dan tantangan dalam mempertahankan keunikan budaya lokal.





## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

---

---

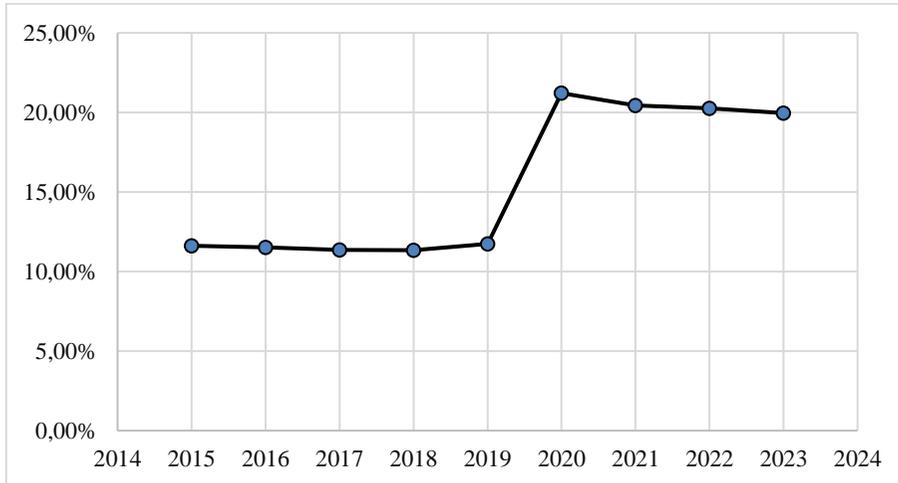
### A. Konsep Kemiskinan

#### 1. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis, istilah "kemiskinan" berasal dari bahasa Latin, yaitu "paupertas" yang berarti kekurangan atau kefakiran. Dalam bahasa Inggris, kata "*poverty*" berasal dari bahasa Prancis Kuno "*povrete*", yang juga mengacu pada keadaan ketidakmampuan atau kekurangan. Menurut referensi yang valid, *Oxford English Dictionary* mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi atau keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, karena kurangnya sumber daya ekonomi. Definisi ini mencerminkan pemahaman umum tentang kemiskinan sebagai kekurangan materi yang signifikan.

Pada konteks etimologis, kata "*poor*" yang berasal dari bahasa Latin "*pauper*" dan bahasa Prancis "*povre*," merujuk pada seseorang atau kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi dan kurangnya kekayaan materi. Penggunaan istilah ini selama berabad-abad telah mencerminkan perbedaan sosial dan ekonomi di masyarakat.

### Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber: Penulis (2023)

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Maret 2023 antara lain adalah:

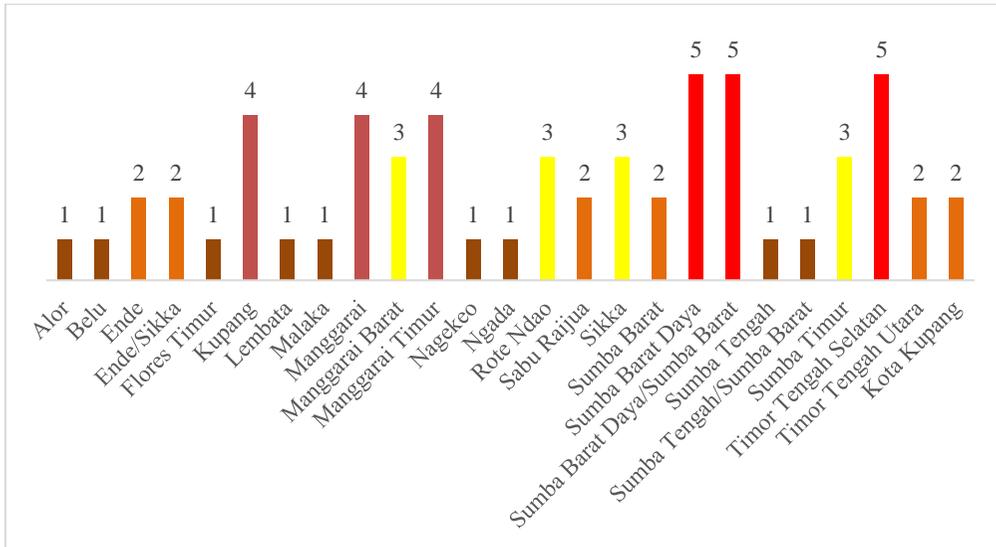
- a) Selama periode September 2022-Maret 2023, Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 2,58 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 6,89 persen.
- b) Inflasi di wilayah perdesaan yang dicerminkan dari perubahan indeks konsumsi rumah tangga pada periode September 2022-Maret 2023 tercatat sebesar 3,51 persen.
- c) Ekonomi Nusa Tenggara Timur Triwulan I 2023 tumbuh sebesar 3,73 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 (y-on-y). Dari sisi pengeluaran, tercatat komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan I 2023 tumbuh sebesar 2,55 persen.

- d) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,10 persen, turun sebesar 0,20 persen poin jika dibandingkan TPT Februari 2022.
- e) Membaiknya kondisi ketenagakerjaan juga tercermin dari peningkatan proporsi pekerja penuh pada Februari 2023 sebesar 51,06 persen atau meningkat dibandingkan Februari 2022 (47,20 persen).

### **Jumlah Penduduk Miskin dan Pola Sebaran**

Labuan Bajo menjadi satu dari empat destinasi wisata super prioritas di Indonesia, namun ironisnya angka kemiskinan di Manggarai Barat pada september 2018 tercatat mencapai angka 18,14% hampir dua kali lipat dari angka kemiskinan tingkat nasional. Melalui upaya-upaya pemberdayaan diharapkan terjadi percepatan graduasi mandiri, artinya KPM PKH dan BPNT sudah bisa lepas dari program bansos yang selama ini diberikan pemerintah. Sejak tahun Januari hingga Oktober 2019, sebanyak 50.440 KPM PKH di Provinsi NTT telah graduasi alami. Tercatat 14% dari total peserta PKH di tahun 2019 berhasil graduasi. Di Kabupaten Manggarai Barat, jumlah warga prasejahtera yang mendapatkan bantuan PKH sebanyak 20.070 KPM dengan nilai 93,2 milyar rupiah dan 22.783 KPM BPNT senilai 10 milyar rupiah. Untuk tingkat kemiskinan di Manggarai Barat dari keseluruhan daerah di NTT dapat dilihat sebagai berikut (Nalle et al., 2022):

## Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023



Sumber: Penulis (2023)

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan didapatkan beberapa Kabupaten dengan kemiskinan kelas Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi. Untuk kelas kemiskinan di Provinsi NTT sangat tinggi antara lain: Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, kelas tinggi antara lain: Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, kelas sedang antara lain: Manggarai Barat, Rote Ndao, Sikka dan Sumba Timur. Sisanya berada didalam kelas rendah dan sangat rendah.

Kemiskinan, berasal dari kata "miskin," secara etimologis dapat diartikan sebagai keadaan tidak memiliki harta benda dan mengalami kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal agar dapat hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, miskin diartikan secara harfiah sebagai tidak memiliki harta benda. Selain itu, konsep kemiskinan juga mencakup ketidakmampuan untuk

menyeimbangkan tingkat kebutuhan hidup standar dengan tingkat penghasilan yang rendah. Dengan kata lain, kemiskinan dapat dianggap sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, menunjukkan kekurangan materi pada sejumlah individu atau kelompok dalam perbandingan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

Pendekatan lebih komprehensif terhadap kemiskinan mencirikannya sebagai keadaan di mana terjadi kekurangan dalam hal-hal yang biasanya dimiliki, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Faktor-faktor ini sangat berkaitan dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga dapat dihubungkan dengan tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang seharusnya dapat membantu mengatasi permasalahan kemiskinan serta memberikan kehormatan yang setara sebagai warga negara (Perpres No 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dapat diamati dari tingkat kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Amelia, 2012). Oleh karena itu, konsep kemiskinan mencakup beragam aspek kehidupan, termasuk tidak hanya aspek materi seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga hak-hak dasar seperti pendidikan dan pekerjaan yang dapat mengangkat martabat individu keluar dari kondisi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses atau kecukupan terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Menurut Sachs (2005), kemiskinan tidak hanya terkait dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan hak-hak dasar lainnya. Definisi ini mencerminkan pandangan bahwa kemiskinan

bersifat multidimensional, dan melampaui sekadar aspek ekonomi semata.

Amartya Sen, dalam pandangan yang diuraikan oleh Bloom dan Canning (2000), memandang kemiskinan sebagai suatu kondisi yang melibatkan "*capability deprivation*" atau kurangnya kemampuan yang bersifat substantif. Artinya, seseorang dianggap miskin ketika mengalami kekurangan dalam kebebasan substantif, yang mencakup kesempatan dan rasa aman. Bloom dan Canning menegaskan bahwa kesempatan memerlukan pendidikan, sementara rasa aman membutuhkan kesehatan. Definisi kemiskinan menurut World Bank (2015) menambah dimensi pada pemahaman ini, menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat menikmati berbagai pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ini mencakup ketidakmampuan untuk menjaga kesehatan, menjalani standar hidup yang layak, merasakan kebebasan, memelihara harga diri, dan merasa dihormati seperti orang lain.

Negara-negara maju, menurut perspektif ini, cenderung menekankan "kualitas hidup" dengan menggambarkan perubahan lingkungan hidup. Namun, paradoksnya terletak pada fakta bahwa pertumbuhan industri yang cepat justru dapat meningkatkan tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara itu, negara-negara berkembang, meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960, ternyata tidak mengalami pengurangan signifikan dalam tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, sebagai ukuran keberhasilan pembangunan suatu wilayah, mencerminkan pencapaian pembangunan. Namun, pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah pertumbuhan tersebut merata di seluruh lapisan masyarakat. Harapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan

meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat bisa menjadi ilusi jika distribusi hasil pertumbuhan tidak merata.

### **Peta Area Terancam Kemiskinan Berdasarkan Pelayanan Sarana Kabupaten Manggarai Barat**



Sumber: Penulis (2023)

Kemiskinan, sebagai permasalahan global, terutama dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan bersifat multidimensional, melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek-aspek ini mencakup kekurangan gizi, air bersih, perumahan sehat, pelayanan kesehatan yang memadai, dan tingkat pendidikan yang rendah. Dalam konteks kemiskinan, aspek-aspek ini saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, perubahan pada satu aspek dapat mempengaruhi perubahan pada aspek lainnya. Djohadikusumo (1995) mencetuskan empat pola kemiskinan, pertama adalah *persistent poverty* atau kemiskinan kronis yang menurun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty* atau kemiskinan yang mengikuti pola siklus

tertentu. Pola ketiga adalah *structural poverty*, yaitu kemiskinan yang muncul akibat struktur ekonomi dan sosial yang tidak merata. Terakhir, pola keempat adalah *transient poverty* atau kemiskinan sementara yang terjadi karena perubahan kondisi ekonomi.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat melalui prisma tingkat kekurangan sumber daya yang mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Konteks ekonomi mengacu pada kapasitas individu atau kelompok dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang mencakup pendapatan, pekerjaan, dan akses terhadap pasar. Dalam kerangka ini, kemiskinan terkait erat dengan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang dianggap layak, dan dampaknya dapat terlihat dalam kualitas hidup yang rendah, keterbatasan peluang ekonomi, serta pembatasan akses terhadap layanan dasar

Secara politik, dimensi kemiskinan dapat diukur melalui tingkat akses terhadap kekuasaan. Akses terhadap kekuasaan politik menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana sekelompok orang dapat berpartisipasi dalam sistem politik yang dapat membentuk, menentukan, dan mengalokasikan sumber daya. Sistem politik yang tidak inklusif atau memberikan akses terbatas kepada kelompok tertentu dapat menjadi penyebab ketidaksetaraan politik yang memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, dimensi politik kemiskinan melibatkan penilaian terhadap sejauh mana suatu masyarakat memberikan hak partisipasi politik kepada seluruh warganya tanpa diskriminasi.

Dari perspektif sosial-psikologis, kemiskinan dapat dianalisis melalui tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial. Jaringan sosial menjadi kunci untuk mendapatkan dukungan dan kesempatan dalam meningkatkan produktivitas. Dalam masyarakat yang terpinggirkan,

kemungkinan untuk membangun hubungan sosial dan mendapatkan dukungan seringkali terbatas, yang pada gilirannya dapat memperkuat atau bahkan memperdalam kesenjangan sosial. Oleh karena itu, aspek sosial-psikologis kemiskinan melibatkan pemahaman tentang sejauh mana individu atau kelompok mampu membangun dan memanfaatkan jaringan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan.

Istilah "kemiskinan" sering menjadi sorotan dalam masyarakat yang sedang berkembang, dengan perdebatan yang berkembang tentang cara terbaik untuk mengukur, mengatasi, dan mencegahnya. Meskipun istilah ini mudah diucapkan, menentukan siapa yang dapat dianggap sebagai penduduk miskin melibatkan sejumlah kompleksitas dan pertimbangan. Dalam upaya memberikan pemahaman konseptual, dua pendekatan umum dapat diterapkan:

- a. Secara kualitatif, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana manusia hidup dalam keadaan tidak layak sebagai manusia. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan menilai kualitas kehidupan yang dijalani individu, termasuk hak-hak dasar dan martabat manusia.
- b. Secara kuantitatif, kemiskinan diartikan sebagai keadaan di mana hidup manusia diwarnai oleh kekurangan, atau dengan kata lain, "tidak berharta benda" (Mardimin, 1996). Pendekatan ini lebih mengedepankan aspek materi, dengan fokus pada keterbatasan dalam kepemilikan harta dan sumber daya ekonomi.

## **2. Indikator Kemiskinan**

Indikator kemiskinan digunakan untuk mengukur dan memantau tingkat kemiskinan dalam suatu masyarakat. Salah satu indikator yang umum digunakan adalah Garis Kemiskinan, yang menentukan batas pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

dasar. World Bank (2019) menegaskan bahwa indikator kemiskinan juga dapat mencakup dimensi non-ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan. Misalnya, tingkat melek huruf atau angka kematian anak dapat menjadi indikator kemiskinan yang mencerminkan aspek-aspek non-ekonomi.

Badan Pusat Statistik (2017) mengategorikan kemiskinan dalam beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Luas Lantai Bangunan Kurang dari 8m<sup>2</sup> per Orang:

Merupakan indikator kemiskinan yang menunjukkan kondisi perumahan yang sangat terbatas. Luas lantai bangunan yang kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang mencerminkan ketidakmampuan untuk memberikan ruang yang memadai bagi setiap anggota keluarga.

- b. Jenis Lantai Tempat Tinggal Terbuat dari Tanah/Bambu/Kayu Murahan:

Bahan lantai yang murahan menjadi petunjuk tentang tingkat ekonomi yang rendah. Keterbatasan dalam pemilihan bahan bangunan menandakan kendala finansial dalam memperbaiki atau membangun tempat tinggal yang lebih baik.

- c. Jenis Dinding Tempat Tinggal dari Bambu/Rumbia/Kayu Berkualitas Rendah/Tembok Tanpa Diplester:

Kualitas dinding rumah juga menjadi indikator, di mana penggunaan material berkualitas rendah atau tembok yang tidak diplester menunjukkan keterbatasan dalam membangun struktur rumah yang kokoh dan nyaman.

- d. Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar/Bersama-sama dengan Rumah Tangga Lain:

Kriteria ini mencerminkan ketidakmampuan memiliki atau mengakses fasilitas sanitasi yang memadai. Tidak memiliki toilet

atau harus menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain menunjukkan tingkat keterbatasan dalam hal kesehatan dan sanitasi.

- e. Sumber Penerangan Rumah Tangga Tidak Menggunakan Listrik:  
Tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan menandakan keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar dan menunjukkan ketidaksetaraan dalam mengakses energi yang lebih modern.
- f. Sumber Air Minum dari Sumur/Mata Air Tidak Terlindung/Sungai/Air Hujan:  
Ketergantungan pada sumber air yang tidak terlindung atau berkualitas rendah mengindikasikan risiko terhadap masalah kesehatan yang serius, seperti penyakit air.
- g. Bahan Bakar untuk Memasak Sehari-hari adalah Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah:  
Penggunaan bahan bakar tradisional menandakan keterbatasan dalam mengakses sumber energi modern, yang juga dapat berdampak pada kesehatan dan lingkungan.
- h. Hanya Mengonsumsi Daging/Susu/Ayam dalam Satu Kali Seminggu:  
Keterbatasan dalam variasi dan frekuensi konsumsi pangan, terutama protein hewani, mencerminkan keterbatasan dalam aspek gizi dan keamanan pangan.
- i. Hanya Membeli Satu Stel Pakaian Baru dalam Setahun:  
Pembelian pakaian yang sangat terbatas mengindikasikan prioritas keuangan yang harus diarahkan pada kebutuhan lain yang mungkin lebih mendesak.
- j. Hanya Sanggup Makan Sebanyak Satu/Dua Kali dalam Sehari:

Jumlah dan frekuensi makan yang terbatas mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari.

- k. Tidak Sanggup Membayar Biaya Pengobatan di Puskesmas/Poliklinik:

Ketidakmampuan membayar biaya pengobatan menciptakan risiko kesehatan yang lebih tinggi dan menunjukkan keterbatasan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan.

- l. Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga Dari Pekerjaan dengan Pendapatan di Bawah Rp. 600.000,- per Bulan:

Pendapatan di bawah ambang batas tertentu mencerminkan tingkat pendapatan yang sangat rendah, yang dapat menjadi pendorong utama kemiskinan.

- m. Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga: Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/Tamat SD:

Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi penghalang dalam mengakses pekerjaan dengan upah tinggi dan menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi.

- n. Tidak Memiliki Tabungan/Barang yang Mudah Dijual dengan Minimal Rp. 500.000,- seperti Sepeda Motor Kredit/Non Kredit, Emas, Ternak, Kapal Motor, atau Barang Modal Lainnya:

Ketidakmampuan untuk menyimpan dan memiliki aset produktif menandakan keterbatasan dalam mengelola keuangan dan investasi jangka panjang.

### **3. Karakteristik Kemiskinan**

Karakteristik kemiskinan dapat bervariasi di setiap konteks masyarakat. Chen dan Ravallion (2008) menyoroti beberapa karakteristik umum kemiskinan, termasuk akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, pekerjaan informal dengan

pendapatan rendah, dan ketidaksetaraan gender. Dalam banyak kasus, kemiskinan juga terkait dengan gejala seperti kelaparan, ketidakstabilan tempat tinggal, dan terbatasnya partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang mengalami kemiskinan, sesuai dengan karakteristik yang dijelaskan oleh Kartasasmita (1993), umumnya memiliki kelemahan dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi. Hal ini menyebabkan semakin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi ekonomi lebih tinggi. Kartasasmita memaparkan bahwa kemiskinan dapat mengambil lima bentuk, yang melibatkan kondisi dan konteks yang berbeda (Suryawati, 2004).

a. Kemiskinan Absolut:

Kemiskinan absolut terjadi ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Konsep ini bertujuan untuk menetapkan tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup dengan memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan perumahan.

b. Kemiskinan Relatif:

Seseorang dianggap miskin relatif jika ia dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tingkatnya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Konsep ini dinamis dan berubah seiring perubahan tingkat hidup masyarakat, menjadikannya sesuatu yang selalu ada. Kemiskinan relatif dapat dipahami sebagai aspek dari ketidaksetaraan sosial, di mana semakin besar ketimpangan antara golongan atas dan golongan bawah, maka semakin banyak penduduk yang dianggap selalu miskin.

c. Kemiskinan Struktural:

Kemiskinan struktural disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya, terutama yang terjadi pada tatanan sosial, budaya, atau politik yang tidak mendukung pembebasan dari kemiskinan. Bentuk kemiskinan ini seringkali memiliki unsur diskriminatif dan mendapat perhatian khusus dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF.

d. Kemiskinan Situasional atau Kemiskinan Alamiah:

Kemiskinan situasional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karena itu menjadi miskin. Hal ini dapat berkaitan dengan kondisi alam, seperti kelangkaan sumber daya alam, minimnya prasarana umum, dan tanah yang kurang subur.

e. Kemiskinan Kultural:

Kemiskinan kultural terjadi sebagai akibat dari sikap atau kebiasaan seseorang atau masyarakat yang relatif enggan untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara-cara modern. Kebiasaan ini dapat mencakup sikap malas, pemborosan, kurang kreatif, dan ketergantungan pada pihak lain.

Terdapat juga jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya:

a. Kemiskinan Alamiah:

Kemiskinan yang terbentuk akibat kelangkaan sumber daya alam, minimnya atau ketiadaan prasarana umum, dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik ini sering menjadi daerah tertinggal karena belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan.

b. Kemiskinan yang Bersifat Sementara (*Transient Poverty*):

Kemiskinan yang disebabkan oleh kejadian atau peristiwa tertentu yang memengaruhi kehidupan seseorang. Ketika

kondisinya membaik, orang tersebut dapat hidup normal dan lebih baik.

Chriswardani (2005), merujuk pada Chambers (1998), menambahkan dimensi terintegrasi yang mencakup lima aspek sebagai bentuk ketidakberuntungan yang melibatkan orang miskin atau keluarga miskin:

a. Kemiskinan (*Proper*):

Mengacu pada ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok, termasuk golongan yang meskipun memiliki pendapatan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

b. Ketidakberdayaan (*Powerless*):

Menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan pendapatan berdampak pada kekuatan sosial seseorang atau kelompok dalam memperoleh keadilan dan persamaan hak untuk hidup layak.

c. Kerentanan Menghadapi Situasi Darurat (*State of Emergency*):

Seseorang atau kelompok yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan atau ketersediaan dana untuk menghadapi situasi darurat yang tidak terduga. Contohnya, situasi rentan seperti bencana alam atau kondisi kesehatan yang memerlukan biaya pengobatan tinggi membutuhkan alokasi pendapatan yang mungkin tidak tersedia. Oleh karena itu, kondisi kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi-situasi ini.

d. Ketergantungan (*Dependency*):

Keterbatasan kemampuan pendapatan atau kekuatan sosial menyebabkan tingkat ketergantungan pada pihak lain menjadi sangat tinggi. Orang-orang yang mengalami kemiskinan mungkin tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau menyelesaikan masalah sendiri, terutama terkait dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan

dari pihak lain menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah kebutuhan akan sumber pendapatan.

e. Keterasingan (*Isolation*):

Dimensi keterasingan seperti yang dijelaskan oleh Chambers terkait dengan faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau kelompok menjadi miskin. Masyarakat yang dianggap miskin sering berada di daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi, seperti di pedesaan atau daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesejahteraan. Hal ini menyebabkan tingkat hidup yang rendah karena fasilitas-fasilitas tersebut lebih terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Moeljarto (1990) menyajikan *Poverty Profile* dengan enam alasan terkait masalah kemiskinan:

a. Masalah Kemiskinan adalah Masalah Kerentanan:

Kemiskinan seringkali terkait dengan tingkat kerentanan yang tinggi, terutama terhadap situasi darurat atau perubahan ekonomi yang tidak terduga.

b. Kemiskinan Berarti Tertutupnya Akses:

Kemiskinan juga mencakup masalah ketidakmampuan untuk mengakses berbagai peluang kerja, karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

c. Masalah Ketidakpercayaan dan Ketergantungan:

Masyarakat miskin sering mengalami masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional, dan sosial karena tidak memiliki kekuatan sosial dalam menghadapi elit desa dan birokrat yang mengambil keputusan tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri.

- d. Kemiskinan Berarti Menghabiskan Penghasilan untuk Konsumsi Terbatas:  
Orang miskin sering menghabiskan sebagian besar penghasilan untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas yang terbatas.
- e. Tingginya Rasio Ketergantungan:  
Kemiskinan juga terkait dengan tingginya rasio ketergantungan, karena banyak keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang besar.
- f. Adanya Kemiskinan yang Diwariskan Secara Terus Menerus:  
Kemiskinan dapat menjadi kondisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ciri-ciri kemiskinan yang masih relevan hingga saat ini mencakup:

- a. Tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
- b. Pendidikan yang relatif rendah.
- c. Bekerja dalam lingkungan "kup kecil dan modal kecil" atau disebut juga bekerja di sektor informal, yang kadang-kadang disebut sebagai setengah menganggur.
- d. Berada di kawasan pedesaan atau daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- e. Kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan umum.

#### **4. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya menjadi krusial dalam merancang kebijakan yang efektif.

Berdasarkan identifikasi Sachs (2005), beberapa faktor penyebab kemiskinan mencakup:

a. Kurangnya Pendidikan:

Individu yang tidak memiliki akses atau terbatas dalam mendapatkan pendidikan cenderung menghadapi peluang pekerjaan yang terbatas dan pendapatan yang rendah. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan menjadi kunci untuk membuka peluang ekonomi yang lebih baik.

b. Ketidaksetaraan Gender:

Diskriminasi gender dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pendapatan dan peluang ekonomi, khususnya bagi perempuan. Upaya untuk mengurangi kesenjangan gender dalam akses pekerjaan dan pendapatan menjadi penting untuk mengatasi kemiskinan.

c. Kesehatan yang Buruk:

Masalah kesehatan yang tidak teratasi dapat membatasi produktivitas individu dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu diperhatikan.

d. Ketidaksetaraan dalam Akses ke Sumber Daya:

Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya seperti tanah, air, dan peluang ekonomi dapat menciptakan kesenjangan ekonomi yang dalam. Kebijakan yang mempromosikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya menjadi kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan.

e. Konflik dan Ketidakstabilan:

Daerah yang terkena konflik atau ketidakstabilan politik seringkali mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi. Konflik dapat mengakibatkan penghancuran infrastruktur, gangguan dalam sistem ekonomi, dan pembatasan peluang ekonomi bagi penduduk setempat.

## **B. *Sustainable livelihoods Framework***

### **1. Pendahuluan tentang *Sustainable livelihoods Framework* (SLF)**

Kerangka Penghidupan Berkelanjutan (SLF) adalah alat konseptual yang dirancang untuk menganalisis dan memahami kompleksitas penghidupan dalam berbagai konteks, terutama di daerah pedesaan di wilayah selatan dunia. *Sustainable livelihood* merupakan pendekatan holistik yang digunakan untuk memahami dan menganalisis kondisi serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam menentukan kesejahteraan masyarakat (Gai et al., 2023). Bermula dari Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan (*Sustainable livelihoods Approach/SLA*), SLF memberikan cara terstruktur untuk menilai berbagai dimensi penghidupan masyarakat, menekankan pada kemampuan, aset, dan strategi untuk menghadapi dan beradaptasi dengan tantangan. Kerangka ini menawarkan perspektif holistik, mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan institusional yang memengaruhi penghidupan berkelanjutan.

Pada konteks kerangka ini, pengembangannya dimulai dari SLA yang menjadi fondasi konseptual SLF. SLA sendiri berakar dari Pendekatan Kapabilitas yang diperkenalkan oleh Amartya Sen pada

tahun 1985. Dengan memperluas perspektif ini, SLF menitikberatkan pada pemahaman yang lebih luas tentang kemampuan individu dan masyarakat, mengakui bahwa keberlanjutan penghidupan melibatkan kompleksitas interaksi antara berbagai dimensi. SLF menyediakan alat struktural yang membantu dalam menilai aset yang dimiliki masyarakat, strategi yang diterapkan, dan kemampuan dalam menghadapi perubahan atau tekanan. Pentingnya alat ini terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi kesejahteraan dan keberlanjutan penghidupan. SLF memungkinkan peneliti dan praktisi untuk memahami dinamika masyarakat di berbagai konteks, memperhitungkan tantangan spesifik yang dihadapi oleh komunitas pedesaan.

Perspektif holistik SLF memberikan landasan bagi pemahaman menyeluruh tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai penghidupan berkelanjutan. Dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan institusional, kerangka ini membantu menjembatani kesenjangan pemahaman terhadap penghidupan masyarakat di berbagai konteks geografis dan budaya. Ini mendorong pendekatan yang lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan realitas kompleks penghidupan di wilayah pedesaan selatan dunia.

## **2. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis *Sustainable livelihoods Framework* (SLF) memiliki akar yang kuat dalam Pendekatan Kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen pada tahun 1985. Sen memperkenalkan konsep kapabilitas sebagai kemampuan individu untuk melakukan berbagai tindakan yang dianggap bernilai dalam kehidupan. Pendekatan ini menempatkan perhatian pada pentingnya melampaui

pemahaman kemiskinan hanya sebagai kurangnya pendapatan, dengan memfokuskan pada kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Referensi utama untuk landasan teoritis ini adalah karya seminal Sen, "*Commodities and Capabilities*" (1985), di mana ia merinci konsep kapabilitas dan argumentasinya terhadap pandangan utilitarian tradisional.

Pada konteks SLF, teori kapabilitas diperluas untuk menggambarkan kerangka kerja yang tidak hanya mempertimbangkan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Chambers dan Conway (1992) dalam "*Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*" menjadi titik awal konseptualisasi SLF, menciptakan pemahaman tentang penghidupan berkelanjutan sebagai kombinasi kemampuan, aset, dan strategi. Pendekatan Kapabilitas Sen mengilhami fokus SLF pada pengukuran kesejahteraan yang melampaui dimensi ekonomi. Selain itu, adaptasi konsep kapabilitas ke dalam konteks penghidupan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana aset dan kemampuan masyarakat pedesaan berperan kunci dalam mencapai keberlanjutan. Dengan merujuk pada konsep ini, SLF memberikan landasan teoritis yang kokoh untuk menilai dan mengelola keberlanjutan penghidupan.

Landasan teoritis SLF juga mencakup konsep aset dan strategi yang diperkenalkan oleh Ellis (2000) dalam "*Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*." Ellis mengidentifikasi aset sebagai sumber daya yang dimiliki individu atau masyarakat, sementara strategi merupakan cara orang menggunakan aset untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kontribusi Ellis memberikan dimensi praktis pada SLF dengan menyoroti pentingnya memahami peran aset dan strategi dalam konteks penghidupan berkelanjutan. Adato dan Meinzen-Dick (2002) melalui "*Assessing the Impact of Agricultural Research on Poverty*

*Using the Sustainable livelihoods Framework*" menyumbangkan perspektif kritis terhadap penggunaan SLF dalam mengevaluasi dampak penelitian pertanian terhadap kemiskinan, menekankan perlunya mempertimbangkan dinamika kebijakan dan institusional dalam SLF untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang pengaruh penelitian terhadap penghidupan masyarakat.

### **3. Komponen *Sustainable livelihoods Framework***

*Sustainable livelihoods Framework* (SLF) mencakup beberapa komponen utama yang bersama-sama membentuk kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dan menganalisis penghidupan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi SLF membutuhkan pemahaman mendalam terhadap setiap komponen untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai masing-masing komponen SLF:

#### a. Aset (Modal):

Aset dalam SLF mencakup lima jenis modal kunci yang menjadi pondasi bagi keberlanjutan penghidupan.

- **Modal Manusia:** Melibatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif dan memahami perubahan lingkungan.
- **Modal Sosial:** Terkait dengan jaringan sosial, hubungan, dan interaksi dalam masyarakat. Jaringan ini mendukung pertukaran informasi, dukungan sosial, dan akses terhadap peluang ekonomi.
- **Modal Alam:** Melibatkan sumber daya alam dan lingkungan sekitar yang digunakan oleh individu dan masyarakat. Ini mencakup tanah, air, dan beragam ekosistem.

- **Modal Fisik:** Terkait dengan infrastruktur dan fasilitas fisik yang memfasilitasi kegiatan ekonomi dan sosial. Infrastruktur transportasi, rumah, dan fasilitas kesehatan adalah contoh modal fisik.
- **Modal Keuangan:** Melibatkan sumber daya ekonomi seperti uang tunai, simpanan, atau akses terhadap kredit. Modal keuangan mendukung investasi dan mengatasi kekurangan modal lainnya.

b. **Konteks Kerentanan:**

SLF mengakui bahwa penghidupan rentan terhadap guncangan dan tekanan eksternal. Konteks kerentanan mencakup berbagai faktor, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial. Memahami kerentanan membantu menilai kapasitas adaptasi dan menentukan langkah-langkah pengurangan risiko yang diperlukan.

c. **Strategi Penghidupan:**

Individu dan masyarakat mengembangkan berbagai strategi untuk mengamankan penghidupan. Ini termasuk kegiatan penghasilan, opsi pekerjaan, dan mekanisme pemulihan dari guncangan. Evaluasi strategi penghidupan membantu mengidentifikasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

d. **Institusi dan Kebijakan:**

Komponen ini menyoroti peran penting institusi, baik formal maupun informal, serta kebijakan dalam membentuk peluang dan hasil penghidupan. Institusi melibatkan norma, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, sedangkan kebijakan mencakup regulasi dan keputusan yang dapat memengaruhi kondisi penghidupan. Memahami konteks institusional menjadi

kunci untuk mengidentifikasi kendala dan peluang pengembangan penghidupan berkelanjutan.

#### **4. Operasionalisasi dan Metodologi**

Operasionalisasi *Sustainable livelihoods Framework* (SLF) menjadi suatu kerangka analisis yang diterapkan di lapangan melibatkan kontribusi besar dari Ian Scoones pada akhir tahun 1990-an. Scoones, dalam tulisannya tahun 1998, telah membentuk landasan bagi operasionalisasi SLF. Metodologi yang digunakan dalam SLF menekankan pendekatan partisipatif, yang memungkinkan masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam mengevaluasi dan menganalisis penghidupan sendiri. Ini memperkuat landasan epistemologis SLF yang menghargai pengetahuan lokal dan berupaya untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam penelitian dan analisis penghidupan. Proses operasionalisasi SLF melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi aset, pemetaan kerentanan, analisis strategi penghidupan, dan penilaian peran institusi dan kebijakan. Langkah-langkah ini dapat dilakukan melalui teknik partisipatif seperti wawancara, diskusi kelompok, dan latihan pemetaan. Dalam konteks ini, Scoones (1998) menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam menentukan jenis aset yang paling relevan, kerentanan yang dihadapi, serta strategi penghidupan yang paling efektif.

Metode yang digunakan dalam SLF bersifat iteratif dan fleksibel, mengakui kompleksitas dan dinamika penghidupan masyarakat. Scoones (1998) menekankan pentingnya pengumpulan data secara berkesinambungan untuk memahami perubahan dalam strategi penghidupan dan kerentanan. Dalam hal ini, metode partisipatif dapat membantu mendapatkan wawasan langsung dari masyarakat lokal dan memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan konteks. Sebagai contoh,

dalam proyek-proyek pengembangan yang menerapkan SLF, seperti yang dijelaskan oleh Carney (1999), penerapan metodologi ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana aset berkontribusi pada keberlanjutan penghidupan, bagaimana strategi penghidupan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan, dan bagaimana kebijakan dapat membentuk peluang dan kendala penghidupan.

## **5. Kritik dan Perspektif Berkembang**

*Sustainable livelihoods Framework* (SLF) tidak luput dari kritik, dan beberapa pandangan skeptis menyoroti sejumlah aspek yang memicu perdebatan. Beberapa sarjana dan praktisi pembangunan, seperti Hornby dan Mallett (2015) dan Cousins (2009), mengemukakan bahwa SLF cenderung menyederhanakan kompleksitas dinamika penghidupan masyarakat, sehingga menerapkannya secara seragam di berbagai konteks dapat menjadi tantangan, berpendapat bahwa realitas penghidupan masyarakat bersifat unik dan kontekstual, sehingga penerapan SLF yang terlalu umum dapat mengabaikan perbedaan signifikan antarlokasi atau kelompok masyarakat.

Kritik lain mengarah pada kebutuhan untuk memperkaya pemahaman tentang penghidupan dengan mengakomodasi faktor-faktor global yang semakin mempengaruhi kondisi lokal. Chambers (2006), yang juga salah satu arsitek SLA awal, mencatat bahwa SLF, seiring pengembangannya, harus lebih responsif terhadap dinamika global seperti globalisasi, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan ekonomi yang tumbuh. Dalam konteks ini, SLF perlu mampu mengintegrasikan elemen-elemen global ke dalam analisis penghidupan lokal untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.

Pertanyaan seputar keterbatasan SLF dalam mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural muncul dalam literatur kritis. Selain itu, kritikus termasuk Bakewell (2010) dan Leach (2008) berpendapat bahwa SLF mungkin kurang mampu menangkap dan merespons perubahan struktural dalam ekonomi global yang mempengaruhi masyarakat pedesaan, menekankan perlunya memperluas fokus SLF untuk memasukkan analisis ketidaksetaraan dan keadilan, serta melibatkan dimensi kekuasaan dan politik dalam pemahaman kehidupan. Meskipun SLF mengalami kritik, penting untuk mencatat bahwa pendekatan ini terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan kontemporer. Scoones (2015) mencatat bahwa SLF telah menjadi "salah satu dari sejumlah alat konseptual dan metodologis yang paling berpengaruh di lapangan pembangunan," meskipun tanpa klaim sebagai solusi sempurna. Beberapa pembaruan dan adaptasi telah diusulkan oleh para akademisi dan praktisi, seperti McCulloch *et al.* (2003) yang mengusulkan peningkatan dalam memahami kompleksitas rentang sumber daya dan kekuasaan dalam SLF.

## **6. Relevansi Kontemporer dan Arah Masa Depan**

Chambers dan Conway (1992) menyampaikan bahwa ekspektasi perubahan yang semakin cepat membuat konsep dan praktik yang diterapkan oleh para profesional sulit untuk tetap relevan, memprediksi bahwa profesionalisme akan terus ketinggalan zaman, danantisipasi terhadap masa depan akan semakin sulit. Ini menjadi landasan bagi peninjauan kembali terhadap *Sustainable livelihoods Framework* untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin tidak pasti. Tulisan ini mengidentifikasi kritik terhadap SLF, seperti penyederhanaan kompleksitas dinamika kehidupan, kekurangan fokus pada faktor

struktural dan dinamika spasial, serta kurangnya perhatian terhadap faktor global seperti perubahan iklim dan globalisasi. Kritik tersebut memberikan dasar untuk pembaharuan SLF agar dapat mengatasi tantangan kontemporer dan merespons perubahan dalam pemikiran dan praktik pembangunan.

Penting untuk memahami bahwa SLF awalnya diusulkan sebagai pendekatan radikal untuk memahami konteks lokal dan meningkatkan partisipasi lokal dalam perencanaan intervensi pembangunan. Namun, popularitas SLF tumbuh seiring dengan penerapannya yang lebih individualistik dalam mengatasi kemiskinan. Revisi visualisasi SLF mencerminkan upaya untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini dan menyelaraskan kerangka dengan pemikiran dan praktik pembangunan yang lebih luas. Perubahan kontekstual, seperti globalisasi, perubahan iklim, dan kesadaran akan hubungan dan struktur sosial-ekonomi, telah memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman kehidupan pedesaan. Oleh karena itu, SLF untuk abad ke-21 mengusulkan empat elemen kunci: (1) membuka diri terhadap dimensi sosial dan geografis dengan lebih mendalam, (2) mengakui kerentanan dan adaptasi temporal dalam kehidupan, (3) memahami dimensi relasional dalam konteks global, dan (4) membuka diskusi mengenai kemiskinan dan kemakmuran.

Pada konteks relevansi kontemporer, SLF yang dihidupkan kembali mencoba mengatasi kritik dan menanggapi perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang. Melalui pendekatan ini, SLF memberikan kontribusi yang lebih relevan dan adaptif dalam membaca dan merespons dinamika kehidupan pedesaan pada abad ke-21. Pembaruan ini memperhitungkan konteks global dan lokal secara lebih baik, memasukkan perubahan iklim sebagai faktor kunci, dan memperluas fokus pada hubungan sosial dan struktural dalam

pemahaman kemiskinan dan penghidupan berkelanjutan. Natarajan, N., Newsham, A., Rigg, J., dan Suhardiman, D. (2022) merinci dalam tulisannya bagaimana perubahan cepat di berbagai aspek kehidupan manusia mengilhami dan mempengaruhi *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF), memulai dengan mengutip pernyataan Chambers dan Conway (1992) tentang akselerasi perubahan yang meninggalkan konsep dan praktik profesional di belakang. Para penulis menyebutkan bahwa konsep, nilai, metode, dan perilaku profesional di berbagai bidang pembangunan tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi masa depan yang semakin tidak pasti.

Merespon perubahan ini, Natarajan *et al.* (2022) memperkenalkan kembali SLF sebagai kerangka yang diperbaharui untuk abad ke-21, mengakui bahwa SLF, yang awalnya diusulkan sebagai pendekatan radikal, seiring waktu menjadi lebih individualistik dalam penanganan kemiskinan. Dalam menggali sejarah dan kritik terhadap SLF, para penulis menyampaikan bagaimana pembaruan ini berusaha mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut dan menyesuaikan SLF dengan perkembangan pemikiran dan praktik pembangunan yang lebih luas. Menyoroti pendekatan SLA yang awalnya bersifat radikal, Natarajan *et al.* (2022) menyampaikan bahwa popularitas SLF tumbuh seiring dengan penerapan yang lebih individualistik dalam mengatasi kemiskinan. Revisi visualisasi SLF mencerminkan upaya untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini dan menyelaraskan kerangka dengan pemikiran dan praktik pembangunan yang lebih luas.

### C. Pariwisata Superprioritas Labuanbajo

Pengembangan pariwisata Superprioritas Labuan Bajo mencerminkan strategi pemerintah Indonesia dalam memajukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Labuan Bajo, yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan sebagai destinasi Superprioritas, menandakan fokus intensif pemerintah untuk meningkatkan potensi pariwisata di wilayah tersebut. Dalam uraian ini, kita akan menggali lebih dalam konsep pariwisata Superprioritas Labuan Bajo, menganalisis dampaknya, serta mengevaluasi tantangan dan peluang yang terkait. Labuan Bajo, yang semula dikenal sebagai pelabuhan nelayan kecil, menjadi pusat perhatian ketika dipilih sebagai destinasi Superprioritas. Pariwisata Superprioritas merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk memajukan destinasi pariwisata tertentu melalui investasi, pengembangan infrastruktur, dan promosi yang intensif. Dasar pemikiran di balik konsep ini adalah untuk meningkatkan daya saing destinasi tersebut di pasar global, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengembangan pariwisata Superprioritas Labuan Bajo dapat dianalisis melalui lensa teori pengembangan pariwisata. Menurut Murphy (1985), pengembangan pariwisata adalah upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jumlah dan nilai wisatawan. Dalam konteks Labuan Bajo, pemerintah berupaya meningkatkan atraksi wisata, fasilitas, dan pelayanan untuk meningkatkan daya tarik destinasi. Pengembangan pariwisata Superprioritas di Labuan Bajo membawa dampak positif yang signifikan. Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan internasional memberikan dorongan ekonomi lokal, menciptakan pekerjaan baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Selain itu, investasi dalam infrastruktur seperti bandara, jalan,

dan fasilitas pariwisata lainnya meningkatkan konektivitas dan memudahkan akses wisatawan.

Meskipun banyak potensi positif, pengembangan pariwisata Superprioritas Labuan Bajo juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah risiko eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan budaya setempat. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan merubah karakter budaya komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta warisan budaya. Keberhasilan pengembangan pariwisata Superprioritas Labuan Bajo juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat setempat. Menurut Ritchie dan Crouch (2003), melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi proyek pariwisata meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi potensi konflik. Pemberdayaan masyarakat setempat dapat mencakup pelibatan dalam manajemen destinasi, pelatihan untuk sektor pariwisata, dan peluang usaha lokal.

Pada rangka mencapai keberlanjutan dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata, keterlibatan sektor swasta sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dapat menciptakan inisiatif publik-privat yang efektif. Menurut Bramwell dan Lane (2000), inisiatif semacam ini dapat mencakup pembangunan bersama infrastruktur, kampanye pemasaran bersama, dan upaya bersama dalam pelestarian lingkungan. Pengembangan pariwisata Superprioritas Labuan Bajo mencerminkan langkah ambisius pemerintah Indonesia untuk memajukan sektor pariwisata. Melalui pendekatan yang berbasis teori pengembangan pariwisata, Labuan Bajo diharapkan dapat meraih manfaat ekonomi yang signifikan. Namun, tantangan terkait pelestarian lingkungan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat setempat

memerlukan perhatian serius. Melalui keterlibatan sektor swasta dan inisiatif publik-privat, Labuan Bajo memiliki peluang untuk menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Adapun tempat-tempat dan panorama yang biasa didapati di labuan bajo adalah:

### **1. Keindahan Alam dan Senja yang Memukau**

Labuan Bajo dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, menyimpan keindahan alam dan kekayaan biota laut yang luar biasa. Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan sejumlah pulau eksotis lainnya di sekitarnya menjadi daya tarik utama. Selain itu, Labuan Bajo menawarkan pengalaman senja yang menakjubkan di *spot-spot* strategis seperti Bukit Cinta, Puncak Amelia, dan Puncak Silvia. Gua Rangko, dengan kolam air asinnya yang menyejukkan, juga menjadi destinasi menarik. Untuk petualangan lebih aktif, Sobat Pesona dapat menelusuri Air Terjun Cunca Wulang atau mencoba *live-on-board*, tinggal di kapal pinisi sambil mengeksplorasi pulau-pulau indah sekitarnya dan menyelam di bawah laut Labuan Bajo.

### **2. Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo**

Labuan Bajo menjadi gerbang utama menuju Taman Nasional Komodo, yang terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Komodo, atau *Varanus komodoensis*, kadal raksasa endemik Indonesia, pertama kali dijelajahi pada tahun 1912. Kehadirannya menarik perhatian turis dan ilmuwan dari seluruh dunia. Taman Nasional Komodo terdiri dari beberapa pulau, dan Pulau Komodo, Pulau Rinca, serta Pulau Padar menjadi pusat atraksi. Pengalaman berfoto bersama

komodo, hewan langka yang hanya dapat ditemui di Indonesia, menjadi momen berharga bagi para wisatawan.

### **3. Atraksi Menakjubkan di Taman Nasional Komodo**

Taman Nasional Komodo menawarkan atraksi menakjubkan seperti Pulau Padar, yang terkenal dengan pemandangan perbukitan ikonik dan gradasi laut biru di latar belakang. Pulau Kelor dan Pink Beach dengan pasirnya yang merah adalah tempat yang sayang untuk dilewatkan. Pilihan transportasi untuk mencapai Taman Nasional Komodo meliputi kapal feri atau kapal cepat dengan berbagai jadwal keberangkatan. Saat berada di taman nasional, selain menyaksikan komodo, Sobat Pesona dapat menikmati pemandangan indah dan fotogenik di berbagai pulau.

### **4. Pembangunan Pariwisata yang Terencana**

Sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas, Labuan Bajo menjalankan pembangunan pariwisata yang terencana. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersinergi dengan beberapa kementerian lainnya, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perhubungan. Partisipasi masyarakat lokal diwujudkan melalui 11 *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan kabupaten, membentuk kelompok kerja di setiap kabupaten untuk mengembangkan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) yang lebih terkait dengan kearifan lokal.

### **5. Suvenir Khas dan Kesenian Lokal**

Bagi Sobat Pesona yang ingin membawa pulang kenangan dari Labuan Bajo, kain songke khas Tanah Manggarai dapat menjadi pilihan souvenir. Kain ini, dengan beragam motif warna-warni, mencerminkan keunikan budaya Flores. Motif seperti Ranggong, Wela Kawu, Wela Runu, dan Ju'i memiliki makna filosofis yang dalam.





## BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

---

---

### A. Desain Penelitian

Desain penelitian untuk mengkaji kualitas kemiskinan dalam kerangka *Sustainable livelihoods* di kawasan pariwisata Superprioritas Labuan Bajo memerlukan pendekatan yang cermat dan terperinci.

#### 1. Pengembangan Konsep Kualitas Kemiskinan dalam *Sustainable livelihoods*

Untuk membangun konsep kualitas kemiskinan yang terintegrasi dengan *Sustainable livelihoods*, perlu merujuk pada kerangka kerja yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Chambers dan Conway (1992) dalam "*Sustainable livelihoods: Putting People at the Centre of Development*" menjadi rujukan kunci yang menyoroti keterkaitan antara sumber daya, strategi penghidupan, dan hasil keberlanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pemahaman holistik tentang kondisi hidup masyarakat di Labuan Bajo dapat terbentuk. Kerangka kerja ini memfasilitasi analisis dampak pariwisata terhadap sumber daya lokal, strategi penghidupan masyarakat, dan implikasi terhadap kualitas hidup.

Pentingnya merinci dimensi kualitas kemiskinan diwakili oleh pendekatan *Capability* oleh Sen (1985) dalam "*The Capability Approach*". Konsep ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek pendapatan, melainkan juga mencakup keterbatasan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Dengan mengintegrasikan *Sustainable livelihoods* dan pendekatan kapabilitas, desain penelitian menjadi lebih mampu menangkap kompleksitas kualitas kemiskinan di Labuan Bajo. Pemahaman ini akan membantu merinci elemen-elemen seperti akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Proses pengembangan konsep juga mempertimbangkan aspek lokal Labuan Bajo yang unik. Dengan menganalisis strategi penghidupan masyarakat setempat, dapat diidentifikasi bagaimana pariwisata memengaruhi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Pendekatan ini dapat melibatkan wawancara dan pengamatan langsung untuk memahami dampak pariwisata pada sektor-sektor utama penghidupan masyarakat, seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan lokal. Keterlibatan partisipatif masyarakat sangat penting dalam merumuskan konsep ini. Dengan melibatkan penduduk setempat dalam proses perancangan, penelitian dapat lebih akurat mencerminkan realitas hidup. Ini dapat diwujudkan melalui forum diskusi kelompok, lokakarya partisipatif, dan interaksi langsung dengan komunitas setempat.

Konsep kualitas kemiskinan dalam kerangka *Sustainable livelihoods* juga perlu memperhitungkan dinamika waktu. Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi seiring waktu dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, metode penelitian harus dirancang untuk menangkap dinamika ini, mungkin dengan menggunakan pendekatan longitudinal atau serangkaian studi kasus

yang mencakup periode waktu yang relevan. Pengembangan konsep kualitas kemiskinan dalam *Sustainable livelihoods* di Labuan Bajo bukan hanya tentang menciptakan pemahaman teoritis, tetapi juga menghasilkan temuan praktis yang dapat mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Dengan merinci dimensi-dimensi kritis, melibatkan perspektif lokal, dan mempertimbangkan perubahan seiring waktu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan di Labuan Bajo.

## **2. Metodologi Penelitian yang Terintegrasi dan Berkelanjutan**

Untuk merancang metodologi penelitian yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk memahami kualitas kemiskinan di Labuan Bajo, langkah pertama adalah merujuk pada "*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*" oleh Creswell dan Creswell (2017). Metode campuran (*mixed methods*) menjadi pendekatan yang kuat untuk mengeksplorasi data dengan menggabungkan kekuatan data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis konten untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dampak pariwisata dan pengalaman hidup masyarakat setempat di Labuan Bajo. Sebaliknya, pendekatan kuantitatif seperti survei dan analisis statistik dapat memberikan gambaran umum tentang variabilitas kondisi hidup dan distribusi kualitas kemiskinan di kawasan tersebut. Penggunaan kombinasi metode ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang masalah tersebut.

Untuk memastikan metodologi penelitian tetap relevan dengan konteks Labuan Bajo yang unik, rujukan kepada "*The Handbook of*

*Sustainability Research*" oleh Heinrichs *et al.* (2015) akan membimbing langkah-langkah yang berorientasi keberlanjutan. Penting untuk melibatkan aktif masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam proses penelitian. Melibatkannya bukan hanya sebagai responden, tetapi juga sebagai mitra dalam perancangan dan pelaksanaan penelitian dapat memperkuat relevansi hasil penelitian dan memastikan dampak yang lebih signifikan. Keterlibatan masyarakat lokal dapat diwujudkan melalui forum diskusi kelompok, lokakarya partisipatif, dan interaksi langsung. Langkah ini memastikan bahwa perspektif, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat setempat tercermin dalam temuan penelitian. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menempatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai prinsip utama.

### **3. Analisis Terhadap Dampak Pariwisata pada Kualitas Hidup Lokal**

Analisis terhadap dampak pariwisata pada kualitas hidup masyarakat lokal di Labuan Bajo mengambil perhatian utama dari karya "*Tourism and Poverty Reduction: Principles and Impacts in Developing Countries*" yang ditulis oleh Ashley, Roe, dan Goodwin (2001). Buku ini membahas dampak pariwisata dengan fokus pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sangat relevan untuk konteks Labuan Bajo. Dalam menganalisis dampak ekonomi pariwisata, perlu merinci indikator-indikator kritis seperti tingkat pengangguran dan pendapatan rata-rata masyarakat setempat. Referensi ini menunjukkan bahwa pariwisata memiliki potensi untuk memberikan peluang ekonomi melalui sektor jasa, tetapi juga mungkin menciptakan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang distribusi keuntungan ekonomi pariwisata di Labuan Bajo diperlukan.

Dampak sosial pariwisata perlu dieksplorasi melalui indikator seperti tingkat pendidikan dan akses terhadap layanan dasar. Studi tersebut menyoroti bahwa peningkatan aktivitas pariwisata dapat mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat lokal. Analisis ini diarahkan untuk memahami sejauh mana pariwisata di Labuan Bajo telah memberikan manfaat sosial, terutama dalam meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Aspek lingkungan juga harus diperhitungkan dalam analisis dampak pariwisata. Dengan merujuk pada karya tersebut, dapat ditemukan kerangka kerja untuk mengevaluasi dampak lingkungan seperti polusi, pengelolaan air, dan pelestarian sumber daya alam. Labuan Bajo, sebagai destinasi alam yang kaya, memerlukan analisis yang teliti terkait bagaimana pariwisata berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan apakah ada dampak negatif yang signifikan.

Pada konteks analisis ini, perlu diingat bahwa keberlanjutan adalah elemen kunci. Pemeriksaan terhadap sejauh mana pariwisata di Labuan Bajo sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, yang dapat dievaluasi dengan memanfaatkan panduan keberlanjutan dari organisasi seperti *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC). Dalam mengartikulasikan analisis dampak, penting untuk merinci perspektif kritis yang mempertimbangkan distribusi manfaat pariwisata secara adil dan berkelanjutan. Referensi lain yang dapat memperkaya analisis ini adalah "*Equity in Tourism: Beyond Empowerment*" oleh Hall (2007), yang menekankan perlunya memastikan bahwa manfaat pariwisata didistribusikan secara merata di antara masyarakat lokal.

Desain penelitian yang dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat, dengan fokus pada kualitas kemiskinan dalam kerangka *Sustainable livelihoods* di kawasan Pariwisata Superprioritas Labuan Bajo, melibatkan sejumlah aspek penting. Pada tahap desain penelitian (A),

beberapa langkah dan metodologi diterapkan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

a. Lokasi Penelitian:

Penelitian dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan lokasi strategis karena terkait erat dengan kawasan pariwisata Superprioritas Labuan Bajo. Kabupaten ini dipilih karena memiliki potensi sebagai wilayah pendukung bagi pengembangan pariwisata.

b. Sumber Data Sekunder:

Data sekunder menjadi landasan utama penelitian ini. Meliputi data kondisi sosial, data kondisi ekologi, data statistik, dan dokumen tata ruang Kabupaten Manggarai Barat. Informasi-informasi ini menjadi dasar untuk memahami konteks sosial, ekologis, dan statistik terkait kualitas kemiskinan di kawasan tersebut.

c. Pendekatan Deduktif:

Metode pendekatan deduktif digunakan sebagai kerangka kerja penelitian. Pendekatan ini mencakup pemahaman teoritis yang mendalam untuk menghasilkan konfirmasi berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui deduksi, penelitian berusaha mengidentifikasi pola-pola umum dan relasi antarvariabel.

d. Tujuan Penelitian:

Fokus penelitian ini adalah memahami kualitas kemiskinan dalam konteks *Sustainable livelihoods*, terutama di kawasan pariwisata Superprioritas Labuan Bajo. Tujuan penelitian mencakup pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat setempat.

## B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengidentifikasi kualitas kemiskinan dalam kerangka *Sustainable livelihoods* di kawasan pariwisata Superprioritas Labuan Bajo, diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan holistik. Sejumlah teknik berikut dapat digunakan:

### 1. Wawancara Mendalam

"*Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*" oleh Rubin dan Rubin (2011) menyediakan panduan komprehensif bagi peneliti yang ingin mendalami metode wawancara kualitatif. Dalam karyanya, Rubin dan Rubin menguraikan strategi praktis untuk melaksanakan wawancara yang mendalam dan berharga, menekankan pentingnya mendengarkan data dengan saksama, sehingga peneliti dapat memahami konteks dan makna di balik kata-kata responden. Referensi ini menawarkan metode dan teknik untuk merancang pertanyaan wawancara yang efektif, menciptakan iklim interaksi yang terbuka, dan menangani tantangan yang mungkin muncul selama proses wawancara. Rubin dan Rubin juga menguraikan cara menganalisis data hasil wawancara, termasuk teknik pengkodean dan temuan tematis. Keseluruhan, buku ini memberikan landasan teoritis dan praktis untuk memahami seni wawancara kualitatif.

Sebagai panduan yang terkenal di bidangnya, "*The Art of Hearing Data*" memberikan inspirasi bagi peneliti yang ingin menggali cerita-cerita hidup dan pandangan mendalam masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep yang dijelaskan dalam buku ini, peneliti dapat meningkatkan kualitas wawancara, menghasilkan data yang relevan dan bermakna dalam konteks penelitian. Dalam konteks penelitian kualitas kemiskinan di Labuan Bajo, penerapan panduan

Rubin dan Rubin (2011) akan membantu peneliti dalam merancang dan melaksanakan wawancara mendalam yang terfokus, memastikan bahwa aspek-aspek kualitas hidup dan dampak pariwisata dapat dieksplorasi secara menyeluruh. Sitiran dari buku ini memberikan dasar yang kuat untuk metodologi wawancara, menegaskan pentingnya pendekatan teliti dalam mendengarkan dan memahami narasi masyarakat lokal.

## **2. Survei dan Kuesioner**

Survei dan penggunaan kuesioner menjadi metode yang sangat relevan dalam konteks penelitian kualitas kemiskinan di Labuan Bajo. Salah satu referensi yang dapat menjadi pedoman dalam merancang survei dan kuesioner adalah "*Survey Research Methods*" oleh Floyd J. Fowler Jr. (2013). Buku ini membahas secara komprehensif tentang teknik dan strategi dalam merancang serta melaksanakan survei. Fowler (2013) menyoroti pentingnya merinci tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian untuk membimbing pembuatan kuesioner. Dalam konteks Labuan Bajo, penelitian dapat merinci pertanyaan terkait indikator-indikator kualitas hidup dan dampak pariwisata, seperti akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Referensi ini memberikan landasan teoritis dan praktis untuk mengembangkan instrumen penelitian yang efektif dan valid.

"*Questionnaire Design: How to Plan, Structure, and Write Survey Material for Effective Market Research*" oleh Ian Brace (2018) juga menjadi referensi yang bermanfaat. Buku ini menyoroti langkah-langkah praktis dalam perencanaan, struktur, dan penulisan materi survei yang efektif. Perancangan kuesioner yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam mengumpulkan data kuantitatif yang relevan. Dalam penelitian kualitas kemiskinan di Labuan Bajo, survei dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dari sampel yang representatif dari

masyarakat lokal. Pertanyaan dalam kuesioner dapat diarahkan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses terhadap layanan, pekerjaan, dan dampak pariwisata pada lingkungan. Penggunaan referensi dari Fowler dan Brace akan memastikan bahwa survei yang diimplementasikan memiliki desain yang kuat dan mampu menghasilkan data yang dapat diandalkan untuk analisis.

### **3. Observasi Partisipatif**

Metode observasi partisipatif menjadi landasan penting dalam menggali pemahaman mendalam mengenai konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan di Labuan Bajo. "*Participant Observation*" oleh Jaber F. Gubrium dan James A. Holstein (1997) memberikan panduan praktis untuk melaksanakan observasi partisipatif yang terfokus dan efektif. Gubrium dan Holstein (1997) menekankan pentingnya keterlibatan peneliti secara langsung dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Dalam konteks Labuan Bajo, observasi partisipatif dapat dilakukan dengan terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari masyarakat lokal, termasuk interaksi dengan pariwisata. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk merasakan atmosfer lokal, mengidentifikasi dinamika sosial, dan mengamati dampak pariwisata secara langsung.

Observasi partisipatif juga dapat melibatkan pengamatan terhadap interaksi masyarakat lokal dengan wisatawan, persepsi terhadap perubahan dalam lingkungan, dan bagaimana kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh industri pariwisata. Referensi ini memberikan dasar untuk melibatkan diri secara aktif dalam realitas masyarakat lokal di Labuan Bajo, yang dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pemahaman kualitas kemiskinan. Selain itu, "*Handbook of Qualitative Research*" oleh Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (2017) dapat

menjadi panduan lebih lanjut dalam merancang dan melaksanakan observasi partisipatif yang terfokus. Referensi ini menawarkan pemahaman mendalam tentang pendekatan kualitatif dalam penelitian, termasuk teknik observasi partisipatif yang dapat diintegrasikan ke dalam desain penelitian.

#### **4. Pemetaan Partisipatif**

Pemetaan partisipatif adalah metode penting untuk merinci kondisi spasial dan distribusi dampak pariwisata di Labuan Bajo. "*Participatory Action Research*" oleh Alice McIntyre (2008) memberikan landasan teoritis dan praktis untuk melaksanakan pemetaan partisipatif. Dalam pemahamannya, McIntyre menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penelitian, termasuk dalam kegiatan pemetaan. Pemetaan partisipatif melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pembuatan peta yang mencerminkan area-area penting dan perubahan yang terjadi. Peta dapat mencakup aspek-aspek seperti titik-titik penting, perubahan lingkungan, dan dampak pariwisata pada infrastruktur lokal. Referensi ini dapat membimbing peneliti dalam merancang sesi pemetaan yang kolaboratif dan memastikan bahwa pandangan masyarakat lokal tercermin secara akurat.

Pada konteks Labuan Bajo, pemetaan partisipatif dapat memberikan gambaran visual tentang bagaimana pariwisata memengaruhi berbagai area di sekitar destinasi tersebut. Melibatkan masyarakat dalam proses pemetaan akan memberikan perspektif lokal yang penting, yang mungkin tidak tercakup dalam data kuantitatif atau observasi sendiri. Penting untuk memastikan bahwa pemetaan partisipatif dilakukan dengan etika penelitian yang baik, dengan memastikan keterlibatan penuh masyarakat lokal dan memberikan

informasi kembali kepada. Dengan mengintegrasikan pemetaan partisipatif dalam desain penelitian, peneliti dapat menggali informasi spasial yang mendalam dan memberikan wawasan yang lebih baik tentang distribusi dampak pariwisata pada kualitas hidup masyarakat lokal di Labuan Bajo.

## **5. Focus Group Discussions (FGD)**

*Focus Group Discussions* (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang efektif untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan dan pengalaman masyarakat terkait kualitas hidup dan dampak pariwisata di Labuan Bajo. Referensi yang dapat membimbing implementasi FGD adalah "*Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*" oleh Krueger dan Casey (2015). Buku ini menyajikan pedoman praktis dan studi kasus untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis FGD. Dalam merinci pandangan kelompok masyarakat, FGD dapat mengungkapkan dinamika sosial, nilai-nilai budaya, dan perbedaan perspektif yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara individual atau survei. Dengan melibatkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat, peneliti dapat menangkap keragaman pandangan yang dapat memperkaya pemahaman tentang kualitas kemiskinan dan dampak pariwisata.

Penting untuk merancang pedoman FGD yang terfokus, menggali isu-isu khusus yang relevan dengan kualitas hidup dan pengaruh pariwisata di Labuan Bajo. Selain itu, kehadiran fasilitator yang terampil dapat memastikan bahwa diskusi berjalan lancar, dan peserta merasa nyaman untuk berbagi pendapat. Dalam konteks Labuan Bajo, FGD dapat digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat lokal merasakan perubahan dalam sektor pariwisata, memahami tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi peluang

untuk perbaikan. Dengan merinci perspektif kelompok masyarakat melalui FGD, penelitian dapat memperoleh informasi yang lebih kontekstual dan beragam untuk melengkapi data kuantitatif dan kualitatif lainnya.

## C. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian untuk mengungkap pola, hubungan, dan implikasi dari informasi yang terkumpul. Dalam konteks penelitian kualitas kemiskinan dalam kerangka *Sustainable livelihoods* di kawasan pariwisata superprioritas Labuan Bajo, analisis data akan menjadi landasan untuk memahami dampak pariwisata terhadap kualitas hidup masyarakat setempat. Melalui teknik-teknik analisis yang cermat, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam yang dapat memberikan wawasan yang relevan dan solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kemiskinan di Labuan Bajo.

### 1. Analisis Tematik Kualitatif

Analisis tematik kualitatif merupakan pendekatan yang mendalam untuk menggali makna dan pola tematik dari data kualitatif, khususnya hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Salah satu referensi yang memberikan panduan mendalam mengenai analisis tematik kualitatif adalah buku "*Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*" oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Buku ini telah menjadi rujukan utama dalam metode analisis kualitatif. Langkah awal dalam analisis tematik adalah mengorganisir data menjadi unit-unit yang dapat dikelompokkan berdasarkan tema atau pola tertentu. Proses selanjutnya melibatkan pencarian dan pengembangan tema utama yang

muncul dari data tersebut. Dalam konteks penelitian mengenai kualitas kemiskinan di Labuan Bajo, analisis tematik kualitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola terkait dampak pariwisata pada mata pencaharian, akses terhadap layanan dasar, dan persepsi masyarakat terhadap perubahan tersebut.

Metode ini juga mencakup pembuatan kode-kode yang merepresentasikan tema-tema tersebut. Teknik *coding* ini dapat digunakan untuk memberikan struktur pada data dan memfasilitasi proses analisis. Analisis tematik kualitatif sangat cocok untuk merinci dan memahami kerumitan pengalaman hidup masyarakat lokal di Labuan Bajo yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif. Analisis tematik kualitatif bukan hanya tentang mengidentifikasi tema-tema dominan, tetapi juga tentang memahami konteks dan makna di balik tema tersebut. Oleh karena itu, penerapan teknik ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap dampak pariwisata pada kualitas hidup masyarakat lokal, seiring dengan tujuan penelitian yang berfokus pada keberlanjutan penghidupan.

## **2. Analisis Statistik Kuantitatif**

Analisis statistik kuantitatif menjadi aspek penting dalam merinci dan mengukur dampak pariwisata terhadap kualitas kemiskinan di Labuan Bajo. Referensi yang sangat relevan dalam mendukung pendekatan ini adalah "*Statistics for Business and Economics*" oleh Anderson, Sweeney, Williams, Camm, dan Cochran (2019). Buku ini memberikan dasar yang kuat dalam penggunaan teknik statistik untuk menganalisis data kuantitatif. Langkah awal adalah merancang kuesioner survei dengan pertanyaan yang dirancang secara cermat dan valid untuk mengukur variabel-variabel terkait kualitas hidup dan dampak pariwisata. Kuesioner ini dapat mencakup aspek-aspek seperti

pendapatan, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan pengaruh pariwisata terhadap pekerjaan. Setelah pengumpulan data, analisis statistik dapat mencakup berbagai teknik, seperti regresi linear, analisis varians (ANOVA), dan analisis regresi logistik, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan.

Analisis statistik kuantitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang distribusi dan variabilitas data, serta hubungan antara variabel-variabel tertentu. Misalnya, dapat dilakukan analisis regresi untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel seperti pendapatan atau tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal di Labuan Bajo. Penting untuk memahami bahwa analisis statistik kuantitatif perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Kesalahan dalam analisis ini dapat memengaruhi kesahihan temuan dan kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, menggunakan referensi dari Anderson *et al.* (2019) sebagai panduan praktis dan teoretis dalam menerapkan analisis statistik sangat diperlukan untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian.

### **3. Analisis Spasial**

Analisis spasial berperan kunci dalam menyelidiki dampak pariwisata terhadap kualitas kemiskinan di Labuan Bajo, khususnya dalam memahami pola spasial distribusi variabel-variabel yang diukur. Referensi yang sangat relevan untuk mendukung pendekatan ini adalah "*Spatial Analysis: A Guide for Ecologists*" oleh Fortin dan Dale (2005). Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang metode analisis spasial dan penggunaan alat-alat GIS (*Geographic Information System*) untuk mengeksplorasi data spasial. Penting untuk mengumpulkan data spasial terkait variabel-variabel kunci seperti tingkat pengangguran, akses terhadap pendidikan, dan area pariwisata di Labuan Bajo. Data ini

kemudian dapat dimasukkan ke dalam perangkat lunak GIS untuk melakukan analisis spasial yang lebih lanjut. Teknik-teknik seperti analisis kernel dan interpolasi spasial dapat memberikan pemahaman tentang sebaran spasial kualitas hidup dan dampak pariwisata.

Analisis spasial juga memungkinkan identifikasi pola dan tren spasial yang mungkin sulit dipahami dengan menggunakan metode analisis lainnya. Misalnya, dapat dilakukan analisis *hotspot* untuk mengidentifikasi area-area di Labuan Bajo yang mengalami dampak pariwisata secara signifikan pada kualitas hidup lokal. Selain itu, analisis kepadatan dapat membantu melihat sebaran variabel-variabel tertentu di seluruh kawasan pariwisata. Melalui penerapan analisis spasial, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan geografis terhadap dampak pariwisata pada kualitas hidup masyarakat lokal di Labuan Bajo. Referensi dari Fortin dan Dale (2005) memberikan dasar teoretis dan metodologis yang kuat untuk memahami dan menerapkan analisis spasial dalam konteks penelitian ini.





## BAB IV

# KUALITAS KEMISKINAN DI KAWASAN PARIWISATA

---

---

### A. Faktor Penentu Kualitas Kemiskinan

Untuk menguraikan faktor penentu kualitas kemiskinan di kawasan pariwisata Labuan Bajo, beberapa faktor dapat diidentifikasi berdasarkan referensi yang relevan. Sebagai penelitian acuan, kita akan merujuk pada "*Tourism, Poverty and Development*" oleh Ashley dan Goodwin (2007), "*The Political Ecology of Disease in Tanzania*" oleh Merrill dan van der Geest (1997), dan "*Local Economic Development and the Environment*" oleh Bebbington (1999). Kualitas kemiskinan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan keterkaitan yang kompleks dengan beberapa faktor kunci yang memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat. Sebagai wilayah yang berkembang, Labuan Bajo menghadapi tantangan dalam akses terhadap infrastruktur dasar, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pengembangan sektor pariwisata, pemberdayaan SDM, serta dampak faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kualitas hidup masyarakat. Penanganan kualitas kemiskinan di Labuan Bajo memerlukan pendekatan holistik dan kerjasama lintas sektor untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.

## 1. Akses Terhadap Infrastruktur Dasar

Akses terhadap infrastruktur dasar merupakan aspek kritis dalam menilai kualitas hidup masyarakat Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tantangan utama yang dihadapi wilayah ini adalah keterbatasan dalam akses menuju layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ini mengakibatkan dampak serius pada kondisi hidup penduduk setempat. Sebagai wilayah yang terus berkembang, upaya penanggulangan kemiskinan di Labuan Bajo terkait erat dengan kemampuan untuk meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dasar yang memadai. Keberlangsungan pembangunan di Labuan Bajo sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan infrastruktur dasar menjadi landasan yang krusial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan. Data menunjukkan bahwa kondisi ini berkorelasi dengan prioritas pemerintah Indonesia, yang memiliki fokus utama pada pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan penurunan angka *stunting*. Oleh karena itu, investasi dan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Labuan Bajo.

Pentingnya akses terhadap air bersih menjadi sorotan utama dalam mengatasi kemiskinan di Labuan Bajo. Data menunjukkan bahwa keterlambatan akses terhadap air minum layak merupakan faktor utama kemiskinan ekstrem di beberapa kabupaten di Indonesia, termasuk Labuan Bajo. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada perbaikan infrastruktur air bersih dan sanitasi untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Selain air bersih, sanitasi yang layak dan listrik yang stabil juga menjadi elemen penting dari

infrastruktur dasar yang perlu diperhatikan. Keberadaan sanitasi yang baik berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Sementara itu, listrik yang stabil menjadi kunci untuk mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk dalam pendidikan, bisnis, dan pengembangan ekonomi lokal.

Pembangunan infrastruktur dasar di Labuan Bajo tidak hanya menciptakan keberlanjutan pembangunan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan di Labuan Bajo. Upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam mengatasi tantangan infrastruktur dasar yang dihadapi Labuan Bajo.

## **2. Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi**

Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak berperan krusial dalam menentukan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Faktor ini secara signifikan memengaruhi kemiskinan ekstrem di sejumlah kabupaten di Indonesia, termasuk Labuan Bajo. Data menunjukkan bahwa keterlambatan akses terhadap air minum yang layak menjadi penyebab utama kemiskinan ekstrem, menyoroti urgensi peningkatan infrastruktur terkait air bersih dan sanitasi sebagai langkah strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah ini. Permasalahan terkait ketersediaan air bersih dan sanitasi di Labuan Bajo menciptakan tantangan serius yang mempengaruhi kondisi hidup masyarakat setempat. Penyediaan fasilitas air bersih yang mudah dijangkau dan sanitasi yang layak dapat

memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

### **Gambar SPAM Wae Mese II Labuhan Bajo**



Sumber: Kementerian PUPR

Upaya penanggulangan kemiskinan di Labuan Bajo harus mencakup strategi peningkatan infrastruktur air bersih yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sanitasi dapat menjadi langkah penting untuk mencapai keberlanjutan dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini. Selain itu, pendekatan berkelanjutan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program peningkatan ketersediaan air bersih dan sanitasi di Labuan Bajo.

### **3. Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo menciptakan peluang signifikan bagi pasar produk lokal dan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat. Faktor ini menjadi pertimbangan penting dalam konteks penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Referensi dari studi "*Tourism and Poverty Reduction: Principles and Impacts in Developing Countries*" oleh Ashley, Roe, dan Goodwin (2001) memberikan wawasan mendalam tentang dampak pariwisata terhadap kemiskinan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Meskipun potensi ekonomi dari pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, strategi pengembangan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul. Referensi tersebut menekankan pentingnya pendekatan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata untuk meminimalkan risiko negatif terhadap masyarakat setempat dan lingkungan. Oleh karena itu, desain program pengembangan pariwisata di Labuan Bajo perlu memperhitungkan prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi faktor kunci yang mendukung optimasi manfaat ekonomi dari industri pariwisata. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memberikan pelatihan keterampilan, dan menciptakan peluang usaha lokal dapat meningkatkan peran positif masyarakat dalam perkembangan pariwisata. Referensi dari studi-studi terkait pemberdayaan masyarakat dalam konteks pariwisata dapat memberikan panduan konkret untuk merancang program-program yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat setempat. Dalam menghadapi perkembangan pariwisata yang pesat, referensi ini dapat memberikan landasan teoritis dan praktis untuk memahami dinamika yang terlibat. Pengembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan merinci faktor-faktor tersebut, program pengembangan pariwisata dapat dirancang dengan lebih cermat

dan berdaya guna dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Labuan Bajo.

#### **4. Pemberdayaan SDM**

Faktor pemberdayaan SDM unggul menjadi poin sentral dalam analisis kemiskinan di Labuan Bajo. Referensi dari literatur, khususnya "*Human Development Report*" yang diterbitkan oleh PBB setiap tahun, dapat memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Menurut laporan tersebut, pemberdayaan SDM melibatkan peningkatan kapabilitas individu melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks Labuan Bajo, upaya penurunan prevalensi tengkes (*stunting*) yang terkait dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi mencerminkan pentingnya kesehatan sebagai elemen utama dari pemberdayaan SDM. Referensi yang dapat memperkuat konsep ini adalah "*Health and Sustainable Development: Addressing the Issues and Challenges*" oleh McMichael, Beaglehole, *et al.* (2003). Studi ini menyoroti hubungan erat antara kesehatan dan pembangunan berkelanjutan serta perlunya perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi sarana yang krusial dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam sektor ekonomi yang berkembang, seperti pariwisata. Referensi dari "*Education for Sustainable Development: Challenges, Strategies, and Practices in a Globalizing World*" oleh Leal Filho (2009) dapat memberikan perspektif mendalam mengenai peran pendidikan dalam pemberdayaan SDM untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan SDM di Labuan Bajo perlu diarahkan pada upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan sektor

ekonomi yang potensial tumbuh, termasuk pariwisata. Melibatkan masyarakat dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dapat meningkatkan kesiapan untuk mengambil peran aktif dalam perkembangan ekonomi daerah.

## **5. Faktor Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan**

Faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan berperan integral dalam dinamika kemiskinan di Labuan Bajo. Studi terbaru, seperti "*The Role of Financial Inclusion in Poverty Reduction: A Survey of Empirical Studies*" oleh Demirgüç-Kunt, Klapper, *et al.* (2018), menyajikan pandangan tentang bagaimana inklusi keuangan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Inklusi keuangan bukan hanya tentang akses ke layanan perbankan, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, kemitraan organisasi merupakan elemen penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Referensi dari "*Partnerships for Sustainable Development: A Conceptual Framework*" oleh Leitner, Meisch, *et al.* (2017) dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat menciptakan dampak positif dalam upaya mengatasi kemiskinan. Kemitraan yang efektif dapat merangsang inovasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Adopsi teknologi juga muncul sebagai elemen kunci dalam membentuk kondisi ekonomi di Labuan Bajo. Referensi dari "*The Impact of Technology Adoption on Agricultural Household Income: A Case Study of Smallholder Farmers in Ethiopia*" oleh Abro, Chen, *et al.* (2019) dapat memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Pendekatan ini

dapat diterapkan dalam merancang solusi berbasis teknologi yang sesuai dengan konteks Labuan Bajo. Kondisi sosial juga menjadi faktor yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan. "*Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value of Corporate Social Responsibility during the Financial Crisis*" oleh Brammer, Jackson, *et al.* (2012) memberikan perspektif tentang bagaimana modal sosial dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat dan berperan penting dalam mendukung usaha ekonomi lokal.

## **B. Dampak Pariwisata Terhadap Kemiskinan**

Dampak pariwisata terhadap kemiskinan di suatu destinasi dapat menjadi faktor krusial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat. Seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata, peluang untuk mengurangi tingkat kemiskinan muncul, namun tantangan dan implikasi yang kompleks juga turut timbul. Inilah yang membuat peran pariwisata dalam konteks mengatasi kemiskinan menjadi topik diskusi yang mendalam dan relevan.

### **1. Peningkatan Peluang Pekerjaan**

Peningkatan peluang pekerjaan menjadi salah satu dampak positif dari pertumbuhan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Pembangunan tempat wisata terbaru, khususnya Puncak Waringin, telah menciptakan kebutuhan baru akan tenaga kerja lokal. Dalam konteks ini, masyarakat setempat dapat memanfaatkan peluang ini untuk terlibat dalam berbagai sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Seiring dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan, industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan. Dengan demikian, tercipta lapangan pekerjaan baru di sektor ini, mulai dari

pelayan kamar, koki, hingga manajemen hotel. Selain industri perhotelan, sektor restoran juga mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan pariwisata. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, restoran dan warung lokal menjadi ramai, membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam usaha kuliner. Selanjutnya, agen perjalanan atau *travel agency* juga menjadi salah satu sektor yang terpengaruh positif. Masyarakat dapat terlibat dalam pekerjaan ini sebagai pemandu wisata, agen perjalanan lokal, atau penyedia layanan transportasi.

Industri kerajinan lokal juga mengalami dorongan dari pertumbuhan pariwisata. Dengan meningkatnya permintaan oleh wisatawan untuk produk lokal, masyarakat dapat terlibat dalam produksi dan penjualan kerajinan tangan khas Labuan Bajo. Hal ini menciptakan lapangan pekerjaan tambahan di sektor ini, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Namun, selayaknya pertumbuhan ekonomi lainnya, peningkatan peluang pekerjaan dalam sektor pariwisata juga menghadapi tantangan. Terkadang, para pekerja mungkin membutuhkan pelatihan tambahan untuk memenuhi standar pelayanan yang diharapkan oleh wisatawan. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga pendidikan setempat menjadi krusial dalam memberikan dukungan dan pelatihan bagi masyarakat agar dapat bersaing dan mengambil manfaat maksimal dari peluang pekerjaan yang tercipta.

## **2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Pariwisata di Labuan Bajo tidak hanya membuka peluang pekerjaan, tetapi juga menciptakan ruang untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Kegiatan pariwisata seperti Festival Komodo, Karnaval Budaya, dan Petualangan Alam Komodo Dragon tidak hanya menjadi daya tarik

bagi wisatawan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil. Salah satu sektor yang mendapat manfaat dari pemberdayaan ekonomi lokal adalah bisnis souvenir. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, permintaan terhadap souvenir khas Labuan Bajo juga meningkat. Masyarakat lokal dapat memanfaatkan potensi ini untuk membuka usaha souvenir sendiri, menciptakan produk yang mencerminkan kekayaan budaya dan alam daerah.

Warung makan juga menjadi bagian integral dari pemberdayaan ekonomi lokal melalui pariwisata. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, permintaan akan makanan lokal dan kuliner khas Labuan Bajo turut meningkat. Masyarakat dapat membuka warung makan sendiri, menyajikan hidangan tradisional atau inovatif yang menggambarkan keanekaragaman kuliner daerah. Selain itu, sektor kerajinan tangan menjadi ladang potensial bagi pemberdayaan ekonomi lokal. Masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dalam pembuatan kerajinan tangan seperti tenun, ukiran, atau anyaman yang mencerminkan warisan budaya. Produk-produk ini dapat dijual sebagai souvenir atau dipasarkan kepada wisatawan yang menghargai keunikan dan keaslian produk lokal.

### **3. Perubahan Sosial dan Kultural**

Kehadiran pariwisata di Labuan Bajo tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga menciptakan perubahan sosial dan kultural yang signifikan. Interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan telah menjadi pendorong perubahan dalam gaya hidup, bahasa, dan norma-norma budaya. Perubahan sosial mencakup interaksi harian antara penduduk lokal dan wisatawan yang membawa masukan baru dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup masyarakat lokal dapat terpengaruh

oleh kebiasaan dan tren yang dibawa oleh wisatawan. Adopsi bahasa asing, penyesuaian dalam pola konsumsi, dan perubahan dalam pola komunikasi merupakan contoh perubahan sosial yang dapat terjadi.

Perubahan kultural juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Pariwisata dapat membawa masukan budaya dari luar, mempengaruhi seni, musik, dan tarian lokal. Adopsi unsur-unsur baru dalam seni dan budaya lokal bisa menjadi katalisator untuk inovasi, tetapi juga perlu diimbangi dengan upaya pelestarian identitas budaya asli. Untuk menjaga keberlanjutan budaya dan identitas lokal, diperlukan pendekatan yang hati-hati. Program edukasi yang melibatkan masyarakat lokal dan wisatawan dapat menjadi langkah penting. Edukasi ini dapat mencakup pemahaman tentang nilai-nilai budaya, sejarah, dan makna di balik tradisi lokal. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata juga menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan mempertimbangkan kepentingan dan keberlanjutan budaya masyarakat setempat.

### **C. Tantangan dan Peluang**

Labuan Bajo, sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan sektor pariwisata. Keberhasilan dalam menangani tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang dapat menjadi kunci untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

## **1. Tantangan Infrastruktur dan Lingkungan**

Tantangan Infrastruktur dan Lingkungan di Labuan Bajo menuntut perhatian serius terhadap pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam serta infrastruktur. Pertumbuhan pesat dalam sektor pariwisata telah menimbulkan tekanan signifikan pada infrastruktur dan lingkungan, menciptakan beberapa tantangan yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan destinasi ini. Peningkatan jumlah wisatawan memberikan beban tambahan pada fasilitas publik di Labuan Bajo. Jalan-jalan yang tadinya memadai sekarang mungkin mengalami kemacetan, dan pasokan air bersih serta pengelolaan sampah dapat menjadi permasalahan yang membutuhkan solusi segera. Perlu adanya investasi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar agar dapat menanggapi lonjakan kunjungan dengan efisien.

Ekspansi infrastruktur yang tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif pada keberlanjutan lingkungan. Labuan Bajo dikenal karena keindahan alamnya, dan perlindungan terhadap ekosistem lokal dan habitat alami harus diutamakan. Upaya konservasi, termasuk pembatasan pembangunan di daerah yang rentan dan implementasi kebijakan lingkungan yang ketat, menjadi kunci untuk menjaga ekosistem yang unik ini. Dalam mengatasi tantangan ini, terdapat peluang besar untuk mengadopsi pendekatan berkelanjutan. Investasi dalam teknologi hijau dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan pariwisata. Penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya atau angin, dapat mengurangi jejak karbon destinasi. Selain itu, pengelolaan limbah yang efisien, seperti program daur ulang dan pengurangan plastik sekali pakai, dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan.

## **2. Tantangan Keseimbangan Antara Ekonomi dan Konservasi**

Tantangan Keseimbangan Antara Ekonomi dan Konservasi di Labuan Bajo menciptakan dilema antara pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan keberlanjutan lingkungan. Upaya untuk meningkatkan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur dan akomodasi dapat bertentangan dengan tujuan konservasi yang mendukung kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan pariwisata seringkali memerlukan lahan dan sumber daya alam yang mungkin dapat merugikan lingkungan. Pembangunan hotel, jalan, dan fasilitas lainnya dapat mengancam habitat alami dan mengakibatkan kerusakan ekosistem yang rentan. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Salah satu solusi yang dapat diadopsi adalah penerapan praktik-praktik ekowisata. Sertifikasi ekowisata dapat menjadi langkah positif dalam memastikan bahwa kegiatan pariwisata di Labuan Bajo memenuhi standar keberlanjutan tertentu. Dengan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan, destinasi ini dapat menjadi contoh bagi destinasi pariwisata lainnya. Labuan Bajo dapat memanfaatkan keunikan sumber daya alamnya yang terjaga dengan baik sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Ekosistem yang sehat dan keanekaragaman hayati yang terjaga dapat menjadi nilai tambah yang signifikan. Melalui pendekatan ini, destinasi pariwisata tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada pelestarian lingkungan yang menjadi aset berharga.

### **3. Tantangan Pengelolaan Wisata yang Berkelanjutan**

Tantangan Pengelolaan Wisata yang Berkelanjutan di Labuan Bajo memerlukan upaya untuk mengatasi dampak negatif dari peningkatan jumlah wisatawan. *Over-tourism* dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk kerumunan, degradasi lingkungan, dan ketegangan dengan masyarakat lokal. Pengelolaan yang buruk dapat merugikan reputasi destinasi dan mengurangi pengalaman wisatawan, sehingga perlu diimplementasikan strategi pengelolaan yang efektif. Salah satu langkah proaktif yang dapat diambil oleh Labuan Bajo adalah menetapkan batasan jumlah wisatawan. Dengan menentukan kapasitas maksimum, destinasi ini dapat menghindari tekanan berlebihan pada infrastruktur dan lingkungan. Selain itu, mengatur jadwal kunjungan dapat membantu mendistribusikan beban kunjungan secara merata, mengurangi kerumunan di titik-titik tertentu, dan memberikan kesempatan bagi lingkungan untuk pulih dari dampak kunjungan.

Memperkenalkan tarif masuk yang dapat diakses juga merupakan langkah yang dapat membantu mengendalikan jumlah wisatawan. Tarif masuk yang wajar dapat menjadi sumber pendapatan tambahan untuk pemeliharaan destinasi dan memastikan bahwa kunjungan dilakukan secara bertanggung jawab. Pendekatan ini dapat mengurangi tekanan ekonomi terhadap masyarakat lokal dan mendukung keberlanjutan destinasi. Pendidikan wisatawan tentang etika dan tanggung jawab selama kunjungan juga menjadi faktor kunci dalam pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Dengan menyediakan informasi yang jelas tentang norma-norma lokal, keberlanjutan lingkungan, dan etika kunjungan, wisatawan dapat menjadi mitra dalam meminimalkan dampak negatif. Program edukasi ini dapat diintegrasikan dalam kampanye pemasaran destinasi dan melalui kolaborasi dengan agen perjalanan. Pengelolaan wisata yang tepat dan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan

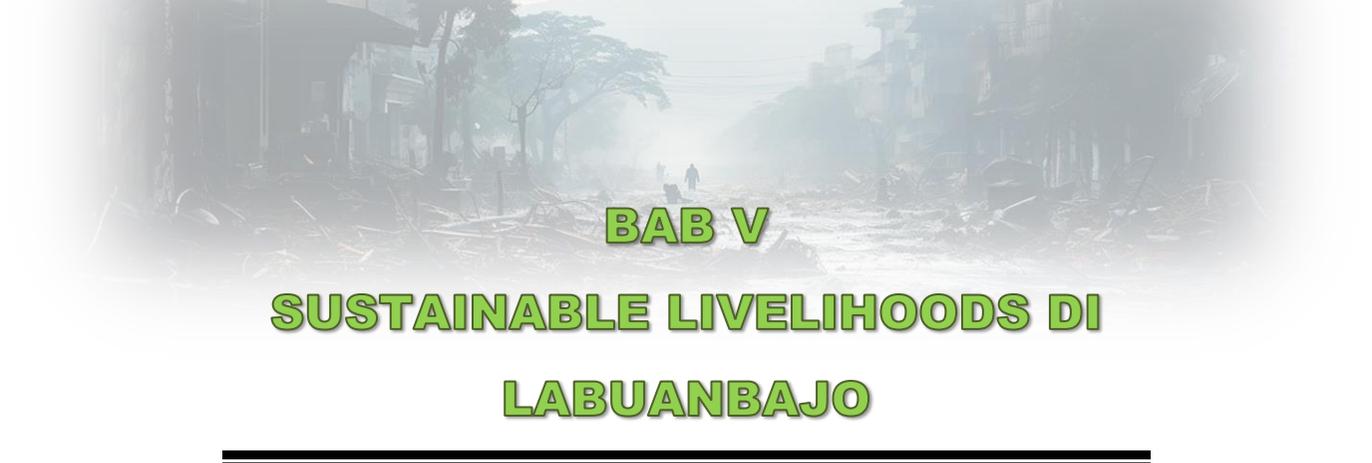
ekonomi dapat mencegah eksploitasi sumber daya yang tersedia dan dengan demikian dapat mendorong pembangunan berkelanjutan (Sasongko & Azzizi, 2024).

#### **4. Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Lokal**

Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Labuan Bajo mengharuskan fokus pada upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat setempat. Meskipun sektor pariwisata dapat membuka peluang pekerjaan, ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi dan perubahan dalam dinamika sosial dan budaya dapat menjadi tantangan serius. Penting untuk mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat lokal sebagai fokus utama. Program pelatihan yang mencakup keterampilan yang dibutuhkan dalam industri pariwisata, seperti keahlian dalam bidang layanan pelanggan, manajemen usaha, dan pelestarian budaya, dapat memberikan masyarakat lokal keunggulan dalam memanfaatkan peluang yang muncul.

Dukungan bagi usaha mikro dan kecil juga perlu diperkuat. Ini bisa melibatkan penyediaan modal usaha, bantuan teknis, dan promosi produk lokal. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata, termasuk memberikan insentif pajak atau fasilitas lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata juga penting untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Masyarakat lokal harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang memengaruhi secara langsung. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dan budaya.





## BAB V

# SUSTAINABLE LIVELIHOODS DI LABUANBAJO

---

---

### A. Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia

#### 1. Potensi Sumber Daya Alam

Kawasan pariwisata sering kali memiliki potensi sumber daya alam yang dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Menurut Turner dan Potvin (2019), kawasan pariwisata harus memanfaatkan sumber daya alamnya dengan efisien untuk menciptakan pengalaman yang menarik. Salah satu potensi sumber daya alam yang signifikan adalah keindahan alam dan biodiversitas. Penelitian oleh Weaver dan Lawton (2019) menunjukkan bahwa keberagaman ekosistem dan spesies di kawasan pariwisata dapat memberikan pengalaman wisata yang unik dan berkesan. Selain itu, penelitian oleh Buckley *et al.* (2018) menyoroti potensi ekowisata di kawasan pariwisata. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab, ekowisata dapat menjadi model yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemanfaatan efisien sumber daya alam untuk ekowisata dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya sumber daya air dalam kawasan pariwisata telah diakui oleh Mitchell dan Ashley (2019). Penelitian ini menunjukkan

bahwa pengelolaan sumber daya air yang bijaksana dapat mendukung keberlanjutan pariwisata, khususnya di destinasi pesisir. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan sumber daya air dan pelestarian kualitas air menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi kawasan pariwisata. Aspek keberlanjutan energi juga memegang peranan penting. Menurut Saarinen dan Rogerson (2018), peningkatan penggunaan energi terbarukan dapat menjadi sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teknologi hijau, kawasan pariwisata dapat mengurangi jejak karbonnya dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan.

Kawasan pariwisata yang kaya akan keanekaragaman hayati juga dapat memberikan potensi untuk pengembangan obyek wisata edukatif. Menurut Jones dan Jenkins (2019), penelitian di bidang ekologi dan perilaku satwa liar dapat diintegrasikan ke dalam pengalaman wisata untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wisatawan terhadap lingkungan sekitar. Namun, pemanfaatan sumber daya alam dalam kawasan pariwisata juga memunculkan tantangan. Turner *et al.* (2020) menyoroti risiko kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Oleh karena itu, perlu ada upaya perlindungan dan pengelolaan yang efektif untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam di kawasan pariwisata.

Labuan Bajo, sebagai destinasi pariwisata yang terkenal, memiliki sejumlah potensi sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Berikut adalah beberapa potensi sumber daya alam di Labuan Bajo:

- a. Keanekaragaman Hayati: Labuan Bajo terletak di Pulau Flores, yang dikenal dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, termasuk spesies langka seperti Komodo, yang menjadi daya tarik unik.

- b. Ekosistem Laut yang Kaya: Perairan sekitar Labuan Bajo kaya akan kehidupan laut. Terumbu karang yang indah, ikan-ikan warna-warni, dan kehidupan laut yang beragam membuatnya menjadi destinasi favorit bagi penyelam dan *snorkeler*. Keindahan bawah laut di Labuan Bajo menjadi potensi besar untuk pariwisata bahari.
- c. Pantai dan Pulau Tropis: Labuan Bajo memiliki pantai-pantai indah dan pulau-pulau tropis yang menakjubkan. Pantai-pantai pasir putih dan air laut yang jernih menciptakan suasana liburan yang tenang dan menyegarkan. Beberapa pulau di sekitarnya, seperti Pulau Padar dan Pulau Kanawa, menawarkan pemandangan alam yang memukau.
- d. Gunung dan Lanskap Daratan: Selain keindahan bawah laut, Labuan Bajo juga dikelilingi oleh lanskap daratan yang menakjubkan. Gunung dan bukit-bukit hijau menciptakan pemandangan alam yang memesona. Beberapa tempat seperti Bukit Cinta dan Gili Lawa menawarkan pemandangan panoramik yang memukau.
- e. Air Terjun dan Danau: Pulau Flores memiliki sejumlah air terjun yang menarik perhatian, seperti Cunca Wulang dan Cunca Rami. Selain itu, Danau Kelimutu dengan tiga warna danau yang unik juga menjadi daya tarik tersendiri di Labuan Bajo.
- f. Potensi Wisata Petualangan: Labuan Bajo memberikan peluang bagi wisata petualangan, seperti *trekking*, *hiking*, dan aktivitas luar ruangan lainnya. Beberapa rute *trekking* menuju puncak-puncak gunung atau ke desa-desa tradisional menawarkan pengalaman petualangan dan keindahan alam.
- g. Kebudayaan dan Tradisi Lokal: Sumber daya alam di Labuan Bajo tidak hanya terbatas pada keindahan alamnya, tetapi juga

mencakup kekayaan budaya dan tradisi lokal. Masyarakat adat Manggarai yang tinggal di sekitar Labuan Bajo menambah daya tarik destinasi ini dengan keberagaman budaya dan upacara tradisional.

- h. **Potensi Energi Terbarukan:** Kawasan Labuan Bajo juga memiliki potensi untuk pengembangan energi terbarukan, seperti energi surya dan tenaga air. Pemanfaatan sumber daya alam ini secara berkelanjutan dapat menjadi langkah positif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut.

## **2. Potensi Sumber Daya Manusia di Labuan Bajo**

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran sentral dalam setiap industri atau organisasi, dan industri pariwisata tidak terkecuali. Manusia dianggap sebagai aset terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi, karena menjadi elemen utama yang selalu hadir dalam setiap struktur organisasi. Pernyataan ini sesuai dengan pandangan Susanto (1997), yang menyatakan bahwa manusia bukan hanya elemen terpenting, tetapi juga harus menjadi fokus manajemen yang memerhatikan kesejahteraan dan pengembangan. Manusia sebagai elemen kunci dalam setiap organisasi memiliki peran penting dalam menetapkan tujuan, inovasi, dan pencapaian tujuan organisasi. Tjokrowinoto dkk. (2001) menegaskan bahwa sumber daya manusia pada abad ke-21 harus memenuhi kualifikasi tertentu, termasuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan pencapaian sasaran organisasi. Selain itu, aspek seperti disiplin kerja, dedikasi, loyalitas, tanggung jawab, dan kewirausahaan juga dianggap sebagai kualifikasi penting bagi sumber daya manusia yang produktif dan profesional.

Pada konteks industri pariwisata, pendidikan kepariwisataan menjadi kunci dalam mengembangkan potensi pariwisata dan menyiapkan tenaga kerja terampil yang terus berkembang. Namun, James J. Spillane (1994) mencatat bahwa masalah utama dalam pengembangan pariwisata adalah kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung pendidikan pariwisata. Oleh karena itu, tenaga kerja yang cakap, terampil, dan memiliki dedikasi tinggi pada bidangnya menjadi kebutuhan utama untuk bersaing di pasar global. Pentingnya kualitas pelayanan sebagai indikator utama dalam industri pariwisata menekankan perlunya pengembangan pengetahuan dalam beberapa hal. Pertama, pengetahuan tentang tata cara pelayanan yang bervariasi sesuai dengan kegiatan pariwisata yang berbeda, seperti pelayanan di hotel, tempat rekreasi, atau selama perjalanan wisata. Kedua, pengetahuan tentang peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam bidang pelayanan. Ketiga, pengembangan SDM yang melibatkan sikap, perilaku, sopan santun, dan aspek kepribadian lainnya.

Teori utilitas merupakan salah satu cara memahami perilaku konsumen. Menurut Varian (2014), utilitas dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan atau kegunaan yang diterima oleh individu dari konsumsi barang atau jasa tertentu. Dengan kata lain, teori utilitas memfokuskan pada pemahaman mengenai bagaimana konsumen memperoleh kepuasan atau utilitas dari barang yang dikonsumsi. Labuan Bajo, sebagai destinasi pariwisata yang berkembang, memiliki potensi sumber daya manusia yang beragam. Berikut adalah beberapa potensi sumber daya manusia di Labuan Bajo:

- a. Pemandu Wisata Lokal: Dengan kekayaan alam dan budaya di Labuan Bajo, pemandu wisata lokal memiliki peran penting dalam memberikan informasi, memandu perjalanan, dan memberikan pengalaman yang memikat bagi wisatawan, dapat

- memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah, flora, fauna, dan cerita lokal yang memperkaya pengalaman wisata.
- b. Penyelam dan Instruktur Selam: Potensi kekayaan bawah laut di sekitar Labuan Bajo membuat penyelam dan instruktur selam memiliki peran khusus. Tidak hanya membantu wisatawan mengeksplorasi keindahan terumbu karang dan kehidupan laut, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan bawah laut.
  - c. Koki dan Pelaku Kuliner: Labuan Bajo menawarkan beragam pengalaman kuliner dengan restoran-restoran lokal dan internasional. Koki lokal dan pelaku usaha kuliner memiliki peluang untuk mengembangkan inovasi kuliner yang mencerminkan kekayaan sumber daya alam dan budaya Labuan Bajo.
  - d. Seniman dan Pengrajin Lokal: Potensi budaya dan seni di Labuan Bajo menciptakan peluang bagi seniman dan pengrajin lokal, dapat menciptakan karya seni yang terinspirasi oleh keindahan alam sekitar atau tradisi lokal, seperti lukisan, kerajinan tangan, dan karya seni lainnya.
  - e. Pengelola *Homestay* dan Akomodasi Lokal: Dalam menghadapi lonjakan pariwisata, pengelola *homestay* dan akomodasi lokal memiliki peran vital, dapat memberikan pengalaman menginap yang autentik dan ramah lingkungan, menciptakan hubungan yang erat dengan wisatawan, dan sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.
  - f. Pemandu Petualangan dan Pendaki: Labuan Bajo menawarkan berbagai kegiatan petualangan, termasuk *trekking* dan *hiking*. Pemandu petualangan dan pendaki lokal dapat memandu

wisatawan melalui rute-rute eksplorasi yang menakjubkan di daratan Labuan Bajo.

- g. Ahli Konservasi Alam dan Lingkungan: Dengan fokus pada keberlanjutan, ahli konservasi alam dan lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati di sekitar Labuan Bajo, dapat terlibat dalam proyek-proyek pelestarian dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan.
- h. Pengembang Teknologi Hijau: Dalam menghadapi tantangan lingkungan, Labuan Bajo memiliki potensi untuk pengembangan teknologi hijau. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan energi terbarukan, manajemen limbah, dan inovasi teknologi hijau dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan destinasi ini.

## **B. Inisiatif Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks *sustainable livelihood* (kehidupan berkelanjutan) mencakup serangkaian inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Inisiatif ini seringkali didukung oleh berbagai referensi dan penelitian yang memberikan landasan konseptual dan praktis.

### **1. Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Salah satu pendekatan utama dalam mencapai *sustainable livelihood* adalah pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut "*Sustainable*

*livelihoods: Building on the Wealth of the Poor*" oleh Carney *et al.* (1999), mendukung inisiatif ekonomi lokal merupakan aspek kunci untuk menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ellis (2000) dalam "*Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*," diversifikasi ekonomi melalui beragam usaha lokal dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan ekonomi dan alam.

Inisiatif konkret dalam konteks ini mungkin mencakup pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan dukungan untuk memasarkan produk-produk lokal. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat memiliki mata pencaharian yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu strategi alternatif pemerintah untuk mengurangi pengangguran, mengatasi kemiskinan, dan mencapai pemerataan pendapatan. Pertumbuhan dan perkembangan UMKM memiliki peran sentral dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan dampaknya sangat signifikan terhadap kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mewujudkan pemberdayaan UMKM, perlu terlibat aktif peran pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.

Peran pemerintah dalam konteks ini melibatkan penetapan kebijakan-kebijakan yang menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha. Sebagai contoh, dalam merumuskan kebijakan tersebut, pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan UMKM. Di sisi lain, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan yang dapat

mengoptimalkan pemberdayaan UMKM melalui penyediaan akses ke modal dan dukungan finansial. Sementara itu, pelaku usaha sendiri memiliki peran utama dalam menggerakkan pertumbuhan UMKM karena memiliki potensi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Dalam konteks UMKM, kriteria unit usaha produktif ini melibatkan berbagai sektor ekonomi dan dapat dibedakan menjadi Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB). Distingui ini didasarkan pada nilai aset awal, omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional, UMKM memiliki andil yang sangat besar. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM), 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, dengan daya serap tenaga kerja mencapai 97%. Namun, untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, perlu dioptimalkan potensi lokal yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mengarahkan pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu instrumen utama. Setelah pandemi, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling cepat pulih. Pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas, termasuk Labuan Bajo, menjadi fokus untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mencakup Labuan Bajo sebagai destinasi yang memiliki potensi besar. Pengelolaan kawasan ini dikelola oleh Badan Otorita Pelaksana Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF), yang dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pembangunan kawasan tersebut. Pentingnya pemberdayaan UMKM di Labuan Bajo semakin terlihat dengan rencana penyelenggaraan Asian Summit dan G20 meeting pada tahun 2023 di Labuan Bajo. Momen ini menjadi peluang bagi UMKM untuk terkoneksi dengan pasar global dan mengambil peran

yang lebih aktif. Dalam konteks ini, fokus pada lima sektor produk UMKM, seperti pasokan untuk hotel, *homestay*, wisata alam, kuliner, dan *merchandise*, menjadi sangat penting. Komunitas kreatif lokal Labuan Bajo diharapkan dapat meningkatkan posisi dan daya tawar pelaku UMKM setempat.

Pada rangka mempercepat pengembangan UMKM di Labuan Bajo, perlu dilakukan upaya-upaya konkret. Misalnya, melalui pelibatan komunitas secara bersama-sama, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas produk UMKM. Keseluruhan langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal dan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses atau tujuan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan dan keterlibatan individu atau kelompok yang mungkin memiliki keterbatasan atau kelemahan. Menurut Ife (2006), pemberdayaan fokus pada memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah atau kurang beruntung. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, mengambil keputusan, dan mempengaruhi peristiwa serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupan.

Proses pemberdayaan, seperti yang dijelaskan oleh Maulina & Dewi (2020), melibatkan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang mungkin lebih lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang menghadapi tantangan kemiskinan. Pemberdayaan ini bersifat dinamis dan berfokus pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk memiliki kendali lebih dalam kehidupan. Pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui perubahan sosial. Sebagai tujuan, pemberdayaan menciptakan kondisi di mana masyarakat menjadi berdaya, memiliki

kekuasaan, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini mencakup aspek fisik, ekonomi, dan sosial, seperti peningkatan kepercayaan diri, kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan kemandirian dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

## **2. Program Pendidikan dan Pelatihan untuk Keterampilan Berkelanjutan**

Pendekatan kedua untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Labuan Bajo melibatkan program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan berkelanjutan. Referensi yang valid dalam ruang lingkup ini adalah "*Education for Sustainable Development: Challenges, Strategies, and Practices in a Globalizing World*" oleh Leal Filho *et al.* (2018). Konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang disajikan dalam referensi ini menjadi dasar untuk mengembangkan inisiatif pendidikan di Labuan Bajo. Pentingnya peningkatan keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan diperjelas oleh penelitian ini. Program pendidikan formal dan informal menjadi fokus, dengan penekanan khusus pada keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan global. Referensi "*Skill Development for Employment and Livelihood Promotion: A Sourcebook*" oleh Kapsos dan Bourmpoula (2015) menjadi panduan untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis keterampilan guna mencapai keberlanjutan ekonomi.

Dokumentasi program pelatihan yang terdapat dalam referensi tersebut memberikan gambaran konkret tentang upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Labuan Bajo. Program tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari keterampilan teknis yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja hingga aspek-aspek seperti kesadaran lingkungan, etika bisnis, dan pemahaman dampak sosial. Dengan

menyelaraskan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan lokal, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks Labuan Bajo, di mana pariwisata menjadi sektor unggulan, pendidikan dan pelatihan harus berfokus pada keterampilan yang relevan dengan industri pariwisata. Hal ini sejalan dengan pemahaman akan pentingnya pendekatan berbasis keterampilan untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, seperti yang disoroti oleh referensi yang digunakan.

Pendekatan ini juga mencakup pengembangan aspek-aspek non-teknis seperti kesadaran lingkungan, etika bisnis, dan pemahaman dampak sosial. Referensi Leal Filho *et al.* (2018) memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Kesadaran akan lingkungan sangat penting di Labuan Bajo, yang merupakan tujuan pariwisata utama dan memiliki kekayaan alam yang perlu dilestarikan. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui program pendidikan dan pelatihan, masyarakat Labuan Bajo dapat lebih baik mengelola sumber daya alamnya. Aspek etika bisnis juga menjadi relevan mengingat pengaruh industri pariwisata terhadap dinamika ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Pemahaman akan dampak sosial dapat membantu masyarakat setempat dalam beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi akibat pertumbuhan pariwisata.

### **3. Pengembangan Ekowisata sebagai Model Pembangunan Berkelanjutan**

Pengembangan ekowisata menjadi model pembangunan berkelanjutan yang diakui karena mampu menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Referensi yang relevan, seperti "*Ecotourism: Principles and Practices*" oleh Honey (2008) dan "*The*

*Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)*," menyoroti nilai ekonomi dari ekosistem dan keanekaragaman hayati. Labuan Bajo, sebagai contoh konkret, telah mengadopsi ekowisata sebagai salah satu strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam implementasinya, langkah-langkah praktis telah diambil, termasuk pengembangan rute wisata yang bertanggung jawab, melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam manajemen destinasi, dan mempromosikan konservasi lingkungan.

Pentingnya membangun ekowisata terletak pada investasi yang dilakukan dalam infrastruktur ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari referensi "*Sustainable Tourism: A Global Perspective*" oleh Hall dan Lew (2009), yang memberikan wawasan tentang bagaimana pengembangan ekowisata dapat menjadi pendorong utama pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Labuan Bajo, investasi infrastruktur yang ramah lingkungan mencakup pengembangan rute wisata yang tidak merusak ekosistem dan habitat alami. Pendekatan ini memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tidak merugikan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Partisipasi masyarakat lokal dalam manajemen destinasi juga menjadi kunci dalam pengembangan ekowisata. Pemberdayaan masyarakat melibatkannya dalam pengambilan keputusan terkait destinasi pariwisata. Referensi Honey (2008) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal dapat meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap keberlanjutan destinasi. Promosi konservasi lingkungan merupakan elemen integral dalam model ekowisata. Kesadaran wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan perlu ditingkatkan. Upaya ini dapat melibatkan kampanye edukasi, informasi di lokasi wisata, dan pembangunan kolaboratif dengan komunitas lokal untuk mendorong praktek bertanggung jawab.

Pengembangan ekowisata juga menghadapi sejumlah tantangan. Diperlukan pelatihan bagi para pelaku industri pariwisata untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekowisata. Referensi Honey (2008) dan Hall dan Lew (2009) dapat menjadi panduan yang berharga dalam menyusun program pelatihan yang efektif. Pentingnya ekowisata sebagai model pembangunan berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga dimensi ekonomi dan sosial. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, ekowisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Peran Pemerintah dan *Stakeholder***

Peran pemerintah dan *stakeholder* dalam mencapai mata pencaharian berkelanjutan di Labuan Bajo memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Keterlibatan pemerintah tercermin dalam kebijakan dan regulasi yang diimplementasikan untuk mengelola sumber daya alam, menjaga lingkungan, dan mendukung praktik-praktik ekowisata. Sebagai contoh, kebijakan yang mengarah pada pembentukan Kawasan Pariwisata Nasional Labuan Bajo Flores dan pembentukan Badan Otorita Pariwisata menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengarahkan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Pemerintah juga memiliki peran dalam mendorong investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat lokal.

*Stakeholder*, seperti industri pariwisata, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor bisnis lainnya, juga berperan penting dalam mencapai mata pencaharian berkelanjutan di Labuan Bajo. Praktik

ekowisata, yang diperjuangkan oleh sejumlah *stakeholder*, mempromosikan pendekatan yang memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait ini membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya. Kolaborasi antara pemerintah dan *stakeholder* membentuk landasan bagi implementasi kebijakan dan praktik-praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi masyarakat lokal dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, tujuh agenda pembangunan prioritas nasional telah ditetapkan untuk diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu agenda tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sektor pariwisata diidentifikasi sebagai sektor yang berkembang menjadi sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan penerimaan devisa negara. Pemerintah telah merespons hal ini dengan mengeluarkan kebijakan, termasuk percepatan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Di antara destinasi tersebut, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Labuan Bajo, yang termasuk dalam kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Pemerintah daerah, khususnya di Labuan Bajo, memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepariwisataan dan mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Labuan Bajo, sebagai bagian dari Kabupaten Manggarai Barat, memiliki kekayaan alam dan budaya yang menjadi modal dasar pengembangan industri pariwisata. Keunikan alam dan budaya di wilayah ini menarik minat wisatawan, baik domestik

maupun mancanegara. Kabupaten Manggarai Barat, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, mencakup daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari, dan Pulau Longos. Luas wilayahnya mencapai 9.450 km<sup>2</sup>, termasuk wilayah daratan dan lautan. Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan, dengan Labuan Bajo sebagai ibukotanya.

Keberhasilan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata bergantung pada optimalisasi sumber daya dan modal yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Barat. Sumber daya tersebut meliputi letak geografis yang strategis, kekayaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, serta warisan sejarah, seni, dan budaya. Pentingnya pemanfaatan yang optimal dari sumber daya ini ditekankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas peluang berusaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan daerah. Pemerintah daerah di Labuan Bajo perlu mengelola kepariwisataan dengan bijaksana. Pengembangan destinasi wisata harus didukung oleh perencanaan yang matang, infrastruktur yang memadai, dan perlindungan terhadap lingkungan. Upaya ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga aspek-aspek sosial dan lingkungan.

Peran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam Membangun Kepariwisata Daerah di Kabupaten Manggarai Barat diatur berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Pembangunan ini mempertimbangkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat regional dan nasional, dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya serta alam. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai

Barat Tahun 2014-2025 memberikan landasan hukum untuk pembangunan sektor pariwisata di wilayah tersebut.

Misi pembangunan kepariwisataan daerah mencakup pengembangan destinasi pariwisata berbasis ekowisata, pemasaran pariwisata yang sinergis, pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, serta pembentukan organisasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat yang efektif. Berikut adalah poin-poin utama dari misi pembangunan kepariwisataan daerah di Kabupaten Manggarai Barat:

- a. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis ekowisata bertujuan untuk menciptakan destinasi yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai. Dalam konteks ini, prioritas diberikan pada pemahaman wawasan lingkungan untuk meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat setempat. Upaya ini tidak hanya menguntungkan sektor pariwisata, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan keberlangsungan ekosistem lokal.
- b. Pemasaran pariwisata harus dilakukan secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Melalui strategi pemasaran yang efektif, destinasi pariwisata dapat menarik perhatian wisatawan dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal.
- c. Pengembangan industri pariwisata harus memperhatikan aspek berdaya saing dan kredibilitas. Hal ini dapat dicapai melalui pendorong kemitraan usaha dan penciptaan wirausaha lokal. Selain itu, penting untuk mengadopsi konsep ekowisata, di mana industri pariwisata tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan keberlanjutan sosial budaya.

- d. Organisasi dan mekanisme operasional yang efektif adalah landasan bagi pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Pembentukan organisasi yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat menjadi kunci keberhasilan. Sumber daya manusia yang terampil, regulasi yang mendukung, dan mekanisme operasional yang efisien akan memastikan implementasi kebijakan pariwisata yang berkelanjutan.

Pada pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat, peran Pemerintah Daerah dan DPRD diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata. Peraturan daerah ini menetapkan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata. Pemerintah juga berkewajiban memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata. Selain itu, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat luas. Adapun Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam Pengembangan Pariwisata:

- a. Pemberian Penghargaan

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan penghargaan kepada individu, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, dan badan usaha yang berprestasi dalam pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata. Penghargaan tersebut dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepeloporan dan pengabdian yang luar biasa di bidang kepariwisataan. Pemberian penghargaan ini tidak hanya menjadi

bentuk prestise, tetapi juga mendorong motivasi para pelaku pariwisata untuk terus berinovasi dan berkontribusi positif.

b. Penyebarluasan Informasi

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan penyebarluasan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah. Sistem informasi kepariwisataan yang efektif dapat membantu dalam mempromosikan destinasi pariwisata, atraksi, serta program dan kebijakan terkait. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses, masyarakat dan pelaku pariwisata dapat terlibat secara lebih aktif dalam pengembangan sektor pariwisata.

c. Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, sebuah lembaga swasta mandiri yang berfungsi sebagai koordinator promosi pariwisata. Badan ini bertugas meningkatkan citra kepariwisataan daerah, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dan menggalang pendanaan. Dengan adanya koordinasi yang baik, promosi pariwisata dapat dilakukan secara terpadu dan efisien, meningkatkan daya saing destinasi pariwisata daerah.

d. Pendanaan

Pendanaan pariwisata daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik menjadi dasar pengelolaan dana kepariwisataan. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan sebagian pendapatan dari sektor pariwisata untuk program pelestarian alam dan budaya. Selain itu, insentif diberikan kepada pengusaha dan masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan pariwisata, sementara

peluang pendanaan diberikan kepada usaha mikro dan kecil di sektor kepariwisataan, sehingga mendukung inklusivitas pembangunan.

Pemerintah daerah melakukan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kepariwisataan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan, ketertiban, prasarana umum, transportasi, dan promosi pariwisata daerah. Dalam implementasinya, terdapat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai OPD khusus yang mengurus kepariwisataan, yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat:

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK):

DPK memiliki tugas utama dalam mengurus urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Program tahun 2021 yang dijalankan mencakup aspek kelembagaan pemerintah daerah, pengembangan dan pengelolaan keragaman budaya, benda dan situs bersejarah, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan usaha, kerjasama, kelembagaan pariwisata, serta pembangunan ekonomi kreatif.

b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait:

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbangda):

Bappeda Litbangda berperan dalam perencanaan pembangunan daerah dan sinkronisasi program OPD agar sejalan dengan RPJMD dan RKPD.

- **Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD):**  
BPKD bertanggung jawab melaksanakan program peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah, termasuk yang berasal dari sektor pariwisata.
- **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:**  
Programnya mencakup pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta perencanaan tata ruang untuk mendukung kepariwisataan.
- **Dinas Perhubungan:**  
Program Dinas Perhubungan melibatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pengendalian lalu lintas, dan peningkatan pelayanan angkutan untuk mendukung sektor pariwisata.
- **Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan:**  
Dinas ini terlibat dalam program pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta pemantauan kualitas air untuk mendukung keberlanjutan lingkungan pariwisata.
- **Dinas Kesehatan:**  
Program Dinas Kesehatan melibatkan pengawasan obat dan makanan, pengembangan lingkungan sehat, dan peningkatan sarana kesehatan untuk mendukung aspek kesehatan pariwisata.
- **Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:**  
Dinas ini fokus pada pembentukan iklim Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kondusif dan pembinaan Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) terkait pariwisata.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Programnya melibatkan peningkatan iklim investasi, promosi, serta kerja sama investasi di sektor pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:  
Programnya termasuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pelatihan di bidang pariwisata, serta pengendalian dan pengawasan tenaga kerja asing.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan:  
Dinas ini berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, pengembangan perikanan tangkap, dan produk hasil perikanan dalam mendukung kepariwisataan.

Instansi Pemerintah Pusat dan BUMN yang Terlibat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo:

a. Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores:

Badan ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 dan bertanggung jawab pada Presiden. Dewan Pengarah dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Pariwisata. Badan Pelaksana, di bawah Kementerian Pariwisata, memiliki tugas koordinasi, pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Pariwisata Nasional Labuan Bajo Flores.

b. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

Kementerian ini fokus pada pengembangan kepariwisataan, terutama di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Membentuk Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo

Flores dengan struktur organisasi yang terinci, mencakup berbagai direktorat untuk pengembangan holistik pariwisata.

c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Melalui Balai Taman Nasional Komodo, Kementerian ini mengelola Kawasan Taman Nasional Komodo dengan pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) dan *Community Based Conservation* (CBC). Kerjasama dengan universitas dilakukan untuk studi dan kajian.

d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Kementerian ini bertanggung jawab atas peningkatan kualitas layanan jalan dan infrastruktur di Labuan Bajo. Termasuk dalam programnya adalah penataan kawasan pedestrian, renovasi area pariwisata, dan penyediaan infrastruktur khusus seperti trotoar premium.

e. Kementerian Kelautan dan Perikanan:

Kementerian ini bertanggung jawab atas perlindungan wilayah laut dan perikanan di sekitar Kawasan Taman Nasional Komodo. Upaya penanaman terumbu karang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

f. Kementerian Perhubungan:

Pengembangan landasan udara Bandara Komodo dan pembangunan kapal wisata *bottom glass* untuk Labuan Bajo dan Bunaken menjadi fokus Kementerian Perhubungan dalam mendukung sektor pariwisata.

g. Kementerian Komunikasi dan Informatika:

Kementerian ini menyiapkan aplikasi Jaringan Pariwisata (JPHub) untuk memfasilitasi pelaku pariwisata dan UMKM. Infrastruktur jaringan komunikasi juga dibangun guna memastikan sinyal yang kuat dan stabil.

h. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI):

PT PELNI menyediakan jasa transportasi laut dan wisata bahari ke area Taman Nasional Komodo, mendukung konektivitas dan aksesibilitas.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III:

PT Pelindo III bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan di Kabupaten Manggarai Barat, memastikan fasilitas pelabuhan berfungsi optimal.

i. Indonesia Ferry Property:

Sebagai anak usaha gabungan, Indonesia Ferry Property membangun kawasan komersil Labuan Bajo dengan melibatkan PT ASDP Ferry Indonesia dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PT PP).

j. PT Brantas Abipraya (Persero):

PT Brantas Abipraya (Persero) terlibat dalam renovasi Kawasan Pantai Marina Bukit Pramuka, memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pariwisata.

k. BUMN Lainnya:

PT Semen Indonesia, Telkomsel, dan Bank BNI berkontribusi melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk pembangunan fasilitas pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.

Organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan juga peran penting sebagai *stakeholders* dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. *World Wide Fund for Nature* (WWF):

WWF merupakan organisasi internasional yang berfokus pada pelestarian alam dan satwa liar. Dalam konteks pariwisata, WWF berperan dalam mendukung praktik pariwisata berkelanjutan,

termasuk upaya konservasi dan pelestarian lingkungan di kawasan pariwisata.

b. *Swisscontact*:

*Swisscontact* adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks pariwisata, *Swisscontact* mungkin terlibat dalam proyek-proyek pengembangan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat setempat.

c. DMO (*Destination Management Organisation*) Flores:

DMO Flores merupakan organisasi manajemen destinasi yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata. DMO dapat terlibat dalam merancang strategi pemasaran, meningkatkan kualitas layanan pariwisata, dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

d. Indonesia *Ecotourism Network* (*Indecon*):

Indecon fokus pada pengembangan ekowisata di Indonesia, dapat berkontribusi dalam advokasi praktik pariwisata yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pemberdayaan komunitas lokal.

e. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Manggarai Barat:

PHRI merupakan asosiasi yang mewakili industri perhotelan dan restoran. Dalam konteks pariwisata, PHRI dapat berperan dalam meningkatkan kualitas layanan, standardisasi, dan kolaborasi antara pelaku bisnis di sektor pariwisata.

f. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Manggarai Barat:

HPI adalah asosiasi yang mewadahi para pramuwisata atau pemandu wisata. Organisasi ini dapat berperan dalam

meningkatkan profesionalisme pemandu wisata, mempromosikan destinasi, dan memberikan edukasi kepada wisatawan.

- g. *Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) Kabupaten Manggarai Barat:

ASITA adalah asosiasi yang mewakili agen perjalanan dan biro wisata di Indonesia. Dalam konteks Kabupaten Manggarai Barat, ASITA dapat berkontribusi dalam pengembangan paket wisata, promosi destinasi, dan advokasi kebijakan pariwisata yang mendukung pertumbuhan industri.

Kehadiran LSM dan organisasi non-pemerintah ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama untuk mencapai pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.



## BAB VI

# INTEGRASI KUALITAS KEMISKINAN DAN SUSTAINABLE LIVELIHOODS

---

---

### A. Penilaian Kualitas Kemiskinan dalam Konteks *Livelihoods*

Penilaian kualitas kemiskinan dalam konteks *Sustainable livelihoods* merupakan suatu pendekatan holistik yang melibatkan sejumlah aspek penting. Berdasarkan referensi yang valid, seperti "*Rethinking Poverty: What Matters and Why*" oleh Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo (2019), dan "*Sustainable livelihoods: Building on the Wealth of the Poor*" oleh Ian Scoones (2009), berikut adalah enam poin utama dalam penilaian kualitas kemiskinan:

#### 1. Pendekatan *Livelihoods*

Pendekatan *Livelihoods* menjadi sebuah landasan penting dalam memahami dan mengatasi kemiskinan, menggeser fokus dari sekadar dimensi finansial menjadi suatu kondisi holistik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Menurut Scoones (2009), kerangka kerja keberlanjutan sumber daya hidup (*Sustainable livelihoods Framework*) memandang kemiskinan sebagai akibat dari kurangnya akses terhadap aset dan sumber daya yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penilaian kualitas kemiskinan perlu memperhitungkan dimensi ekonomi, sosial,

dan lingkungan. Fokus utama pendekatan *livelihoods* adalah pada akses terhadap aset dan sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Aset dapat melibatkan berbagai hal, mulai dari tanah dan modal hingga keterampilan dan jaringan sosial. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap situasi kemiskinan, membantu identifikasi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Aspek ekonomi dalam pendekatan *livelihoods* menekankan pentingnya penciptaan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan usaha mikro, akses terhadap pasar, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Aspek sosial melibatkan peningkatan kapasitas sosial masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, dimensi lingkungan menyoroti hubungan yang erat antara kemiskinan dan degradasi lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merancang dan melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan. Dengan cara ini, solusi yang dihasilkan lebih mungkin sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan *livelihoods* menjadi suatu paradigma yang memperkaya pemahaman terhadap kompleksitas kemiskinan dan membuka jalan bagi tindakan yang lebih berkelanjutan.

## **2. Akses Terhadap Aspek Ekonomi**

Penilaian kualitas kemiskinan yang komprehensif perlu memperhitungkan akses penduduk terhadap berbagai aspek ekonomi yang krusial dalam menentukan kesejahteraan. Dalam perspektif ini, pandangan Banerjee dan Duflo (2019) memberikan penekanan khusus pada pentingnya mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk

mengakses pekerjaan yang layak dan berkelanjutan sebagai langkah awal menuju peningkatan kualitas hidup. Aspek pertama yang perlu dievaluasi adalah akses penduduk terhadap pekerjaan. Pekerjaan yang layak dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Banerjee dan Duflo (2019) menyoroti pentingnya memahami jenis pekerjaan yang tersedia, tingkat upah yang diterima, dan kondisi kerja secara keseluruhan. Hal ini mencakup penilaian terhadap apakah pekerjaan tersebut memberikan jaminan keamanan ekonomi jangka panjang dan memberdayakan individu untuk mencapai potensi maksimalnya.

Pendapatan juga merupakan faktor utama dalam akses terhadap aspek ekonomi. Penilaian kualitas kemiskinan perlu memperhitungkan sejauh mana penduduk memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Banerjee dan Duflo (2019) menekankan perlunya memastikan bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencukupi untuk mengatasi tantangan jangka panjang, seperti kesehatan dan pendidikan. Selain itu, keberlanjutan mata pencaharian merupakan aspek kritis yang perlu diperhitungkan. Banerjee dan Duflo (2019) menyoroti bahwa pekerjaan yang tahan lama memiliki dampak positif tidak hanya pada individu tetapi juga pada komunitas secara keseluruhan. Pekerjaan yang berkelanjutan tidak hanya memberikan stabilitas ekonomi tetapi juga menciptakan fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan.

### **3. Dimensi Sosial dan Kesejahteraan**

Untuk menggambarkan kompleksitas kemiskinan, Scoones (2009) menunjukkan kepentingan untuk memasukkan dimensi sosial dalam penilaian kualitas hidup masyarakat. Aspek-aspek sosial tersebut mencakup elemen-elemen vital seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Penekanan ini mencerminkan pemahaman bahwa faktor-faktor ini tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga membentuk kesejahteraan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan menjadi elemen sentral dalam dimensi sosial penilaian kemiskinan. Tingkat akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat berperan penting dalam menentukan potensi individu dan perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Scoones (2009) merinci bahwa pendidikan yang baik dapat membuka peluang dan meningkatkan daya saing masyarakat di pasar tenaga kerja, sehingga menjadi investasi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan.

Kesehatan juga menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Kondisi kesehatan yang baik tidak hanya memberikan dampak positif pada produktivitas individu, tetapi juga mengurangi beban biaya kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara umum. Scoones (2009) menekankan perlunya memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar, sehingga masyarakat dapat terhindar dari beban kemiskinan yang disebabkan oleh biaya pengobatan yang tinggi. Akses terhadap layanan dasar, yang mencakup pendidikan dan kesehatan, menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan akses yang merata terhadap layanan ini, Scoones (2009) menyoroti bahwa pemerintah dan lembaga terkait dapat menciptakan dasar yang kuat untuk pengentasan kemiskinan jangka panjang. Oleh karena itu, dimensi sosial tidak hanya membentuk kualitas hidup individu, tetapi juga

berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan dan penciptaan masyarakat yang lebih inklusif. Dengan memasukkan aspek-aspek sosial ini dalam penilaian kemiskinan, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dapat dirancang secara lebih holistik dan berkelanjutan.

#### **4. Keberlanjutan Lingkungan**

Scoones (2009) menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah elemen krusial yang harus dimasukkan dalam penilaian kualitas kemiskinan. Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan berperan kunci dalam menentukan kesejahteraan jangka panjang suatu masyarakat. Keberlanjutan lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh Scoones, melibatkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana menjadi fokus utama dalam keberlanjutan lingkungan. Scoones (2009) menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam lokal untuk memastikan bahwa pemanfaatan tersebut berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan. Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya dapat membantu mencegah degradasi lingkungan yang dapat berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.

Penilaian kualitas kemiskinan juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap lingkungan. Scoones (2009) menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, polusi air, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan untuk mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan lingkungan tidak hanya melibatkan kebijakan

dan praktik pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga memerlukan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Scoones (2009) menekankan bahwa pendekatan berkelanjutan harus mencakup edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif dari seluruh masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

## **5. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat**

Banerjee dan Duflo (2019) menyoroti pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat sebagai aspek sentral dalam penilaian kemiskinan. Pandangan ini menekankan bahwa melibatkan masyarakat dalam proses penilaian dapat membuka jalur untuk identifikasi kebutuhan lokal, pemahaman mendalam terhadap tantangan yang dihadapi, dan pengembangan solusi yang sesuai dengan konteks setempat. Dengan cara ini, penilaian kemiskinan menjadi lebih akurat, relevan, dan berdampak nyata. Partisipasi masyarakat dalam penilaian kemiskinan membawa dampak positif dalam pemahaman mendalam tentang kondisi lokal. Banerjee dan Duflo (2019) menekankan bahwa melibatkan masyarakat memungkinkan pihak yang terlibat untuk mendengarkan langsung dari yang mengalami kemiskinan, sehingga penilaian tidak hanya didasarkan pada data kuantitatif tetapi juga pada pengalaman nyata masyarakat.

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan yang spesifik dan solusi yang sesuai. Banerjee dan Duflo (2019) mencatat bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika lokal, dan melibatkan dalam proses

penilaian memungkinkan identifikasi kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Ini dapat mencakup pengembangan usaha mikro, pelatihan keterampilan, atau program kesejahteraan sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Banerjee dan Duflo (2019) menekankan bahwa partisipasi memotivasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam implementasi solusi yang diusulkan, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan.

## **6. Dampak Kebijakan dan Program Pembangunan**

Mengevaluasi dampak kebijakan dan program pembangunan merupakan langkah kritis dalam memahami efektivitas upaya pengentasan kemiskinan. Menurut Scoones (2009), keberhasilan program-program tersebut terletak pada kemampuan untuk memahami konteks lokal, mempertimbangkan aspek-aspek berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam implementasinya. Pemahaman mendalam terhadap konteks lokal menjadi kunci dalam mengevaluasi dampak kebijakan dan program pembangunan. Scoones (2009) menekankan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik unik, dan kebijakan yang berhasil harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan spesifik setempat. Evaluasi yang memperhitungkan konteks lokal memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap sejauh mana program tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang miskin.

Aspek berkelanjutan juga perlu diperhitungkan dalam mengevaluasi dampak kebijakan dan program pembangunan. Scoones (2009) mencatat bahwa program yang berfokus pada keberlanjutan sumber daya, ekonomi, dan lingkungan memiliki potensi untuk

memberikan dampak positif jangka panjang. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap apakah program-program tersebut mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam kondisi hidup masyarakat dan apakah memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam implementasi kebijakan dan program pembangunan menjadi faktor penentu. Scoones (2009) menyoroti bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab, tetapi juga memungkinkan program untuk lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Evaluasi program harus mencakup sejauh mana masyarakat terlibat dan sejauh mana partisipasi tersebut berkontribusi pada keberhasilan program.

## **B. Strategi Peningkatan Kesejahteraan**

Strategi peningkatan kesejahteraan merupakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada dalam situasi kemiskinan. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan berdasarkan referensi yang relevan, seperti "*Development as Freedom*" oleh Amartya Sen (1999) dan "*The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*" oleh Jeffrey D. Sachs (2005), mencakup berbagai aspek:

### **1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan**

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan strategi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan Amartya Sen (1999) menggarisbawahi bahwa pendidikan memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat

pilihan yang lebih baik dalam hidup. Selain itu, pelatihan keterampilan juga diakui sebagai sarana yang efektif untuk membuka pintu akses ke pekerjaan yang lebih baik dan berkesinambungan. Pendidikan berperan penting dalam memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan ekonomi. Investasi dalam sistem pendidikan dapat mencakup akses yang merata terhadap pendidikan dasar dan menengah, serta dukungan untuk pendidikan tinggi atau pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sen (1999) menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tentang penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga tentang memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan potensi sepenuhnya.

Pelatihan keterampilan, di sisi lain, menanggapi tuntutan pasar kerja yang terus berubah. Dengan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan sektor tertentu, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi. Pelatihan ini dapat melibatkan berbagai bidang, seperti keterampilan teknis, manajemen, atau keterampilan entrepreneurial, tergantung pada kebutuhan lokal dan global. Dengan demikian, pelatihan keterampilan membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan mobilitas sosial. Melalui kombinasi pendidikan dan pelatihan keterampilan, masyarakat dapat mengembangkan tenaga kerja yang lebih terampil dan fleksibel. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat individu dalam meningkatkan potensi ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Dengan memiliki tenaga kerja yang terdidik dan terampil, sebuah masyarakat dapat lebih baik bersaing dalam pasar global dan menghadapi perubahan ekonomi yang cepat.

## **2. Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan**

Menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jeffrey Sachs (2005) menyoroti urgensi peningkatan infrastruktur kesehatan, distribusi obat-obatan, dan penyuluhan kesehatan sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Infrastruktur kesehatan yang baik merupakan fondasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan efektif. Sachs (2005) menekankan bahwa pembangunan pusat kesehatan, rumah sakit, dan jaringan pelayanan kesehatan primer dapat membantu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai ke fasilitas kesehatan. Infrastruktur yang kuat juga mendukung pencegahan, diagnosis, dan penanganan penyakit secara lebih efektif.

Distribusi obat-obatan yang merata dan terjangkau juga menjadi aspek penting dalam menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan. Sachs (2005) menggarisbawahi perlunya memastikan bahwa obat-obatan yang diperlukan oleh masyarakat tersedia dan dapat diakses tanpa hambatan finansial. Upaya untuk meningkatkan distribusi obat-obatan dapat mencakup sistem distribusi yang efisien, program subsidi, atau kemitraan dengan produsen obat guna menurunkan biaya. Selain itu, penyuluhan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang praktik kesehatan yang baik. Sachs (2005) menyoroti bahwa penyuluhan kesehatan dapat membantu masyarakat mengadopsi perilaku hidup sehat, memahami tanda dan gejala penyakit, serta mengakses pelayanan kesehatan secara proaktif. Penyuluhan kesehatan yang efektif juga dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah.

### **3. Pembangunan Infrastruktur Dasar**

Investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik, menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jeffrey Sachs (2005) menyoroti urgensi pembangunan infrastruktur yang memadai sebagai fondasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur dasar adalah jaringan jalan yang baik. Sachs (2005) menekankan bahwa jalan yang berkualitas memfasilitasi aksesibilitas ke pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Infrastruktur jalan yang baik juga mendukung distribusi barang dan jasa, memungkinkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan mobilitas sosial.

Air bersih dan sanitasi yang memadai juga merupakan elemen kunci dalam pembangunan infrastruktur dasar. Sachs (2005) menyoroti pentingnya akses universal terhadap air bersih untuk konsumsi sehari-hari dan sanitasi yang aman. Infrastruktur ini bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dengan mencegah penyebaran penyakit, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Listrik adalah komponen infrastruktur dasar lainnya yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sachs (2005) menekankan bahwa akses yang luas terhadap listrik memungkinkan pengembangan industri, pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan teknologi. Listrik juga mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, membuka peluang baru untuk inovasi dan keterlibatan dalam ekonomi digital global.

#### **4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Pemberdayaan ekonomi lokal memegang peran penting dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Pandangan Amartya Sen (1999) menyoroti urgensi memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi, termasuk mendukung usaha mikro dan kecil serta koperasi lokal. Memberdayakan ekonomi lokal berarti memberikan masyarakat alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola usaha sendiri. Salah satu pendekatan yang diungkapkan oleh Sen adalah mendukung usaha mikro dan kecil. Usaha ini sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, mempertahankan tradisi, dan mendukung lingkungan sosial yang kuat. Melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil, masyarakat dapat memiliki kendali lebih besar atas sumber daya dan pendapatan ekonomi.

Koperasi lokal juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif. Sen (1999) menyoroti bahwa koperasi dapat membantu masyarakat untuk menggabungkan sumber daya, meningkatkan daya tawar dalam pasar, dan memberikan akses ke sumber daya yang mungkin sulit diakses secara individu. Koperasi juga memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Pentingnya memberdayakan ekonomi lokal juga mencakup aspek pemberdayaan perempuan. Sen menekankan bahwa memberikan perempuan akses ke sumber daya ekonomi dan mendukung partisipasi dalam kegiatan ekonomi adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **5. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial**

Implementasi program bantuan sosial yang tepat sasaran dan jaminan sosial memiliki peran krusial dalam melindungi masyarakat

yang rentan. Jeffrey Sachs (2005) menyoroti pentingnya memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memberikan perlindungan kepada yang berada dalam risiko kemiskinan. Program bantuan sosial, ketika diimplementasikan dengan baik, dapat memberikan dukungan langsung kepada yang membutuhkan. Dalam konteks ini, Sachs (2005) menekankan perlunya program bantuan yang tepat sasaran, artinya bantuan tersebut harus diberikan kepada yang memang benar-benar membutuhkannya. Program ini dapat mencakup bantuan keuangan, makanan, atau layanan kesehatan yang ditargetkan untuk kelompok-kelompok tertentu yang rentan.

Jaminan sosial, di sisi lain, menciptakan jaringan keamanan bagi masyarakat dalam menghadapi risiko ekonomi dan sosial. Sachs (2005) menyoroti bahwa memiliki sistem jaminan sosial yang kuat, seperti asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, atau program pensiun, dapat membantu melindungi masyarakat dari dampak negatif peristiwa tak terduga. Jaminan sosial menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial, memungkinkan masyarakat untuk lebih percaya diri dan tangguh menghadapi tantangan. Pentingnya program bantuan sosial dan jaminan sosial juga terkait dengan upaya mengurangi ketidaksetaraan. Sachs (2005) menekankan bahwa perlindungan sosial yang merata dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan peluang yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih baik ke layanan dasar dan bantuan finansial kepada yang membutuhkan, masyarakat dapat lebih merata dalam mengatasi risiko kemiskinan.

## C. Model Pengembangan Berkelanjutan

Model pengembangan berkelanjutan merupakan landasan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara harmonis dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dalam konteks ini, beberapa poin kunci dapat diuraikan berdasarkan pemikiran dari "*Our Common Future*" (1987) oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) dan "*Sustainable Development: Concepts, Rationalities and Strategies*" (2007) oleh Sergio Ulgiati dan Antonella Dalla Marta:

### 1. Pendekatan Holistik

Pada konteks pariwisata berkelanjutan, pendekatan holistik menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melibatkan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pendekatan holistik dalam pariwisata *sustainable livelihood* diinformasikan oleh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan pariwisata, serta menerapkan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Menurut referensi yang valid dalam konteks pariwisata berkelanjutan, seperti yang mungkin diuraikan dalam karya-karya akademis atau panduan keberlanjutan pariwisata, model pengembangan berkelanjutan harus mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Salah satu contoh referensi yang relevan adalah "*Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Criteria*" yang menetapkan kriteria keberlanjutan untuk sektor pariwisata global.

Dari segi ekonomi, pendekatan holistik mengacu pada pengembangan pariwisata yang tidak hanya meningkatkan pendapatan lokal tetapi juga memastikan distribusi yang adil dari manfaat ekonomi.

Ini mungkin mencakup promosi partisipasi ekonomi masyarakat lokal, pengembangan usaha mikro dan kecil, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dari perspektif lingkungan, pendekatan holistik menekankan perlunya melindungi dan menjaga sumber daya alam serta meminimalkan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan. Ini bisa melibatkan praktik-praktik ramah lingkungan, pengelolaan taman nasional atau kawasan konservasi, serta upaya pelestarian alam yang berkelanjutan. Dari sisi sosial, pendekatan holistik dalam pariwisata *sustainable livelihood* mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini mungkin mencakup peningkatan akses penduduk setempat terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, aspek budaya dan sosial juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pariwisata diintegrasikan secara positif dengan budaya lokal dan memberikan dukungan terhadap warisan budaya.

## **2. Keterlibatan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat merupakan unsur kunci dalam konteks pengembangan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi proyek-proyek pembangunan. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses ini memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan proyek, mengakomodasi kebutuhan lokal, mendorong tanggung jawab bersama, dan menciptakan penerimaan luas. Referensi yang mendukung konsep keterlibatan masyarakat dapat ditemukan dalam literatur mengenai pembangunan berkelanjutan dan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan proyek. Sebagai contoh, karya-karya seperti "*Participation in Development Planning and Implementation: The Case of the Pacific Islands*" (1995) oleh Boutilier dan Thomson atau "*Community Participation in Development Projects: The World Bank*

*Experience*" (1996) oleh Shah, mencerminkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam konteks pengembangan.

Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan memahami secara mendalam kebutuhan dan aspirasi lokal. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang berharga mengenai kondisi, budaya, dan tantangan yang dihadapi, sehingga partisipasi membantu menghasilkan solusi yang lebih sesuai dan berkelanjutan. Keterlibatan ini juga memungkinkan masyarakat untuk merasa memiliki proyek, meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang. Pentingnya keterlibatan masyarakat terletak pada fakta bahwa proyek-proyek pembangunan yang diinisiasi dan dijalankan oleh masyarakat lokal lebih cenderung memenuhi kebutuhan riil dan memiliki dampak positif yang lebih besar. Dengan mendorong tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, proyek-proyek tersebut memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang.

### **3. Pelestarian Sumber Daya Alam**

Pentingnya pelestarian sumber daya alam dalam model pengembangan berkelanjutan mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam literatur keberlanjutan. Dalam konteks ini, referensi WCED (*World Commission on Environment and Development*) tahun 1987, yang dikenal sebagai "*Our Common Future*," menyoroti urgensi manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Dokumen tersebut memasukkan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam kesadaran global dan menekankan perlunya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Pelestarian sumber daya alam menjadi krusial karena sumber daya tersebut menyediakan dasar bagi kehidupan manusia dan berbagai

ekosistem. Konsep pembangunan berkelanjutan menolak pandangan bahwa penggunaan sumber daya alam dapat tidak terbatas, dan sebaliknya, menekankan pada pengelolaan yang bijaksana untuk mencegah degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya.

Pada implementasi model pembangunan berkelanjutan, manajemen yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam mencakup berbagai tindakan dan kebijakan. Ini mungkin mencakup pengurangan konsumsi sumber daya, penerapan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap ekosistem alami. Selain itu, melibatkan masyarakat lokal dalam manajemen sumber daya alam dapat meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan dan mendorong tanggung jawab bersama. Pentingnya pelestarian sumber daya alam juga terkait dengan konsep "keadilan antar-generasi." WCED (1987) menyoroti bahwa keberlanjutan memerlukan tindakan yang mempertimbangkan kebutuhan dan hak generasi mendatang untuk mengakses dan menggunakan sumber daya alam yang sama. Ini berarti bahwa setiap tindakan penggunaan sumber daya harus mempertimbangkan dampaknya pada keberlanjutan jangka panjang.

#### **4. Peningkatan Efisiensi Energi dan Sumber Daya**

Pentingnya peningkatan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya menjadi fokus utama dalam model pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mencerminkan keinginan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan energi tanpa merugikan keseimbangan ekologis. Referensi dari Ulgiati dan Dalla Marta (2007) menyoroti perlunya beralih ke pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan, dengan memperhatikan penerapan teknologi yang lebih efisien. Peningkatan efisiensi energi menjadi salah satu pilar utama dalam mengurangi dampak lingkungan dari konsumsi energi. Hal ini

mencakup pengembangan dan adopsi teknologi energi terbarukan, investasi dalam infrastruktur energi yang lebih efisien, dan kesadaran terhadap praktik konsumsi energi yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan yang mendukung penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon menjadi langkah kunci dalam mencapai tujuan ini.

Peningkatan efisiensi sumber daya juga mencakup langkah-langkah untuk mengurangi pemborosan dan penggunaan yang tidak berkelanjutan. Ini melibatkan penerapan teknologi dan praktik-produksi yang lebih efisien, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pengembangan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Pergeseran menuju ekonomi sirkular, di mana sumber daya diambil, digunakan, dan didaur ulang secara efisien, juga mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain manfaat lingkungan, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya juga dapat membawa dampak positif pada aspek ekonomi dan sosial. Penggunaan teknologi yang lebih efisien dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja dalam sektor-sektor terkait dengan energi terbarukan dan efisiensi sumber daya.

## **5. Keadilan Sosial dan Ekonomi**

Pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam model pembangunan berkelanjutan mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Fokus pada aspek keadilan ini dapat ditemukan dalam literatur mengenai pembangunan berkelanjutan dan referensi yang mendukung prinsip-prinsip keadilan dalam konteks sosial dan ekonomi. Mendorong distribusi yang adil dari manfaat ekonomi merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hasil pembangunan didistribusikan secara

merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Ini dapat mencakup kebijakan-kebijakan yang mendukung partisipasi ekonomi masyarakat lokal, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.

Aspek keadilan sosial juga termasuk dalam menjamin akses yang setara terhadap layanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Keadilan ini melibatkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan tersebut untuk semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Keadilan sosial juga mencakup upaya untuk mengatasi kesenjangan dalam akses terhadap peluang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Referensi yang mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi dapat berasal dari literatur mengenai keberlanjutan, inklusi sosial, dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan keadilan ini selaras dengan konsep-konsep keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan perhatian pada keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang serta inklusi seluruh masyarakat.

## **6. Keterlibatan Sektor Swasta**

Keterlibatan sektor swasta berperan kunci dalam model pengembangan berkelanjutan, dan prinsip-prinsip tersebut semakin mendapat perhatian dalam literatur mengenai pembangunan berkelanjutan. Menggandeng sektor swasta sebagai mitra strategis membawa potensi besar untuk meningkatkan dampak positif pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Referensi yang mendukung konsep ini dapat ditemukan dalam literatur mengenai keberlanjutan bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Keterlibatan perusahaan dalam praktik bisnis berkelanjutan mencakup adopsi praktik-praktik yang mendukung ekonomi, lingkungan, dan sosial

secara seimbang. Ini termasuk implementasi praktik keberlanjutan dalam rantai pasokan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta pengurangan dampak lingkungan. Perusahaan juga dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan memberdayakan masyarakat lokal.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi elemen penting dari keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan yang memahami dan mempraktikkan tanggung jawab sosialnya dapat berpartisipasi dalam berbagai inisiatif yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendukung masyarakat lokal. CSR dapat mencakup program pendidikan, dukungan terhadap kesehatan masyarakat, dan investasi dalam pengembangan komunitas. Selain itu, inovasi berbasis lingkungan menjadi faktor penting yang didorong oleh sektor swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Perusahaan dapat berperan sebagai pelopor dalam pengembangan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan, menyumbangkan ide-ide inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan, dan berinvestasi dalam solusi yang mengurangi dampak negatif.



## BAB VII

# PENGUKURAN INDIKATOR KEMISKINAN DAN SUSTAINABLE LIVELIHOODS

---

---

### A. Metode Pengukuran Kualitas Kemiskinan

Metode Pengukuran Kualitas Kemiskinan berbasis pada *Multidimensional Poverty Index* (MPI) menjadi instrumen penting dalam menganalisis dan memahami tingkat kemiskinan secara holistik, terutama dalam konteks keberlanjutan mata pencaharian di Labuan Bajo. Labuan Bajo, yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, merupakan destinasi wisata yang penting dengan potensi ekonomi dan lingkungan yang besar. Namun, dalam mengelola pertumbuhan pariwisata yang pesat, perlu ditekankan pada kualitas kemiskinan untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengukuran kualitas kemiskinan dengan menggunakan MPI memerlukan pendefinisian dimensi dan indikator yang mencerminkan tantangan dan peluang spesifik di Labuan Bajo. Dimensi ekonomi dapat melibatkan pendapatan rumah tangga, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi lokal. Dimensi sosial mencakup pendidikan, kesehatan, dan aspek kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, dimensi lingkungan dapat memasukkan indikator seperti keberlanjutan penggunaan sumber daya alam dan dampak lingkungan pariwisata.

Pada konteks ekonomi, MPI dapat memasukkan pendapatan rumah tangga sebagai indikator utama. Namun, untuk mencerminkan keberlanjutan mata pencaharian, perlu diperhitungkan juga diversifikasi pekerjaan dan partisipasi masyarakat lokal dalam sektor pariwisata. Misalnya, mengukur sejauh mana pendapatan lokal berasal dari kegiatan pariwisata, serta sejauh mana ekonomi lokal terdiversifikasi untuk mengurangi risiko tergantung pada satu sektor. Dimensi sosial, dengan fokus pada pendidikan, dapat mencakup tingkat akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Sementara itu, indikator kesehatan dapat melibatkan akses terhadap layanan kesehatan dan statistik kesehatan masyarakat. Pentingnya dimensi sosial ini dalam mengukur kemiskinan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses dan kapasitas untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Dimensi lingkungan dalam pengukuran kualitas kemiskinan memerlukan indikator yang mencerminkan keberlanjutan ekosistem lokal. Ini dapat termasuk keberlanjutan penggunaan air, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam yang menjadi dasar ekonomi lokal. Selain itu, dampak pariwisata terhadap lingkungan, seperti degradasi terumbu karang atau kehilangan keanekaragaman hayati, juga harus dipertimbangkan sebagai indikator kemiskinan lingkungan.

## **1. Konsep dan Teknik Pengukuran Kualitas Kemiskinan Menggunakan MPI**

MPI, dikembangkan oleh OPHI (*Oxford Poverty and Human Development Initiative*) bersama UNDP pada tahun 2010, memberikan paradigma baru dalam pengukuran kemiskinan dengan pendekatan multidimensional. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai kondisi kemiskinan, mengatasi keterbatasan pendekatan moneter yang sering hanya memandang dari segi daya beli

atau konsumsi. Sebagai langkah progresif, MPI melibatkan dimensi kesehatan, di mana gizi dan kematian anak menjadi indikator kunci. Amartya Sen, sejak tahun 1980 dan 2000, telah mengkritik pendekatan kemiskinan yang hanya mengandalkan analisis moneter. Baginya, melihat kemiskinan hanya dari sisi pendapatan atau konsumsi adalah gambaran yang sempit. Sen menyoroti dimensi lebih luas dari kondisi kemiskinan, termasuk ketidakmampuan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan dasar serta kualitas standar kehidupan yang rendah.

UNDP memandang MPI sebagai bagian terintegrasi dalam kerangka *Millennium Development Goals* (MDGs). Setiap indikator MPI dianggap sebagai bagian dari pencapaian tujuan MDGs. Penggunaan MPI sebagai instrumen pengukuran kemiskinan yang multidimensional mencerminkan kekhawatiran global dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Strategi ini memperluas cakupan indikator kemiskinan untuk mencapai gambaran yang lebih komprehensif, sesuai dengan tiga dimensi yang dirujuk oleh UNDP dan OPHI dalam MPI. Dimensi kesehatan dalam MPI diukur melalui dua indikator utama: gizi dan kematian anak. Indikator gizi mengacu pada standar MDGs, dengan pendekatan berat badan anak berbanding usia untuk anak-anak dan BMI untuk orang dewasa. Kematian anak, sebagai indikator kesehatan lainnya, mencerminkan ketidakmampuan dalam hal kesehatan, entah akibat penyakit atau kekurangan gizi. Penilaian MPI mencakup semua umur anak dalam suatu rumah tangga, dan ketika terdapat kematian anak, rumah tangga tersebut mendapatkan poin penilaian dalam MPI.

Dimensi pendidikan dalam pengukuran MPI mencakup dua indikator utama, yaitu lama sekolah (*years of schooling*) dan akses terhadap pendidikan (*attendance of school*). Dua indikator ini dirancang untuk mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses

pendidikan dasar, meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas dari pendidikan yang diterima. Lama pendidikan dihitung dengan memastikan bahwa setidaknya satu anggota rumah tangga telah menyelesaikan minimal lima tahun pendidikan formal. Sementara itu, kehadiran anak di sekolah diukur dengan memeriksa apakah anak-anak usia sekolah (kelas satu hingga delapan) secara aktif menghadiri pendidikan.

Dimensi standar hidup dalam MPI mencerminkan pola kehidupan sehari-hari masyarakat. Indikator-indikator ini membantu menentukan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kualitas standar kehidupan sesuai dengan target MDGs. Enam indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi ini melibatkan aspek-aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, akses terhadap air bersih, diukur melalui sumber air seperti pipa air, keran umum, sumur bor, sumur terlindung, dan lainnya, yang dapat dijangkau dalam waktu 30 menit berjalan kaki. Kedua, sanitasi, diukur melalui jenis toilet atau jamban yang dimiliki oleh rumah tangga. Ketiga, akses listrik, dianggap sebagai indikator kemiskinan jika rumah tangga tidak memiliki akses terhadap listrik. Keempat, jenis lantai rumah, diukur melalui bahan lantai seperti tanah, pasir, atau kotoran. Kelima, bahan bakar untuk memasak, dianggap sebagai indikator kemiskinan jika rumah tangga menggunakan arang atau kayu sebagai bahan bakar memasak. Terakhir, kepemilikan aset, diukur melalui kepemilikan barang seperti radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor, kulkas, dan mobil. Secara umum dimensi dan indikator MPI di Indonesia adalah sebagai berikut :



Pendekatan multidimensional ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemiskinan, mencakup aspek-aspek vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan mengintegrasikan dimensi pendidikan dan standar hidup dalam pengukuran MPI, hasilnya menjadi lebih akurat dan relevan, memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Labuan Bajo. Dengan demikian, MPI tidak hanya menjadi alat pengukuran kemiskinan, tetapi juga menjadi pedoman untuk memahami dan mengatasi tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat setempat. Pengukuran MPI melibatkan perhitungan bobot tertimbang dari dimensi dan indikator, menciptakan suatu kerangka kerja yang merinci kontribusi masing-masing aspek terhadap tingkat kemiskinan. Bobot dimensi dihitung sebagai  $1/3$  untuk setiap dimensi, dan masing-masing indikator dalam dimensi mendapatkan bobot yang sama. Sebagai contoh, bobot untuk indikator kesehatan (dua indikator) adalah  $1/6$ , bobot untuk indikator pendidikan (dua indikator) adalah  $1/6$ , dan bobot untuk indikator kualitas hidup (enam indikator) adalah  $1/18$ .

Proses penilaian dimulai dengan memberikan skor pada setiap indikator untuk setiap individu yang dievaluasi dalam MPI. Rentang skor biasanya antara 0 hingga 1, dengan 1 menunjukkan bahwa individu tersebut memenuhi penilaian kemiskinan sesuai dengan indikator MPI. Selanjutnya, skor-skor tersebut dijumlahkan dan dihitung rata-rata nilai total.

Rumus penghitungan nilai total adalah sebagai berikut:

$$C1 = W1.I1 + W2.I2 + \dots + Wd.Id$$

Dimana  $I_i$  adalah variabel indikator ke- $i$  (0 atau 1, sesuai dengan apakah individu memenuhi penilaian pada indikator tersebut), dan  $W_i$  adalah bobot dari indikator ke- $i$ . Pastikan bahwa  $\sum_{i=1}^d W_i = 1$

Setelah mendapatkan penilaian terhadap sepuluh indikator, nilai total dihitung menggunakan rata-rata sebagai acuan. Seseorang dianggap miskin jika nilai total rata-ratanya kurang dari 1/3.

MPI dihitung sebagai perkalian antara multidimensional headcount ratio (H) dan intensity of poverty (A) dengan rumus:

$$MPI = H \times A$$

Rumus untuk (H) adalah:

$$H = \frac{q}{n}$$

Dimana  $q$  adalah jumlah individu yang dikategorikan sebagai miskin secara multidimensional, dan  $n$  adalah total populasi.

Rumus untuk (A) adalah:

$$A = \frac{\sum_{k=1}^q c(k)}{q}$$

Dimana  $c(k)$  adalah skor individu ke- $k$  dan  $q$  adalah jumlah individu yang mengalami kemiskinan multidimensional.

Dengan demikian, proses perhitungan MPI mencakup langkah-langkah ini untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur tentang tingkat kemiskinan yang dialami oleh individu atau kelompok dalam suatu wilayah, seperti Labuan Bajo.

Berikut contoh pengukuran MPI dengan empat sampel rumah tangga :

INDIKATOR	INDIVIDU DALAM RUMAH TANGGA SAMPEL				BOBOT
	1	2	3	4	
Ukuran dalam rumah tangga sampel	4	7	5	4	
<b>Kesehatan</b>					
• Kematian anak jika ada anak yang meninggal	0	1	0	1	1/6=0.167
• Imunisasi jika tidak melakukan imunisasi	0	1	0	0	1/6=0.167
<b>Pendidikan</b>					
• Lama sekolah jika kurang dari enam tahun	0	0	1	0	1/9=0.111
• Kehadiran dalam pendidikan jika anak usia sekolah tidak bersekolah	1	1	0	1	1/9=0.111
• Kemampuan membaca jika tidak bisa membaca dan menulis	0	1	1	1	1/9=0.111
<b>Standar Hidup</b>					
• Bahan bakar untuk memasak jika memakai kayu/arang/sampah	0	0	1	0	1/15=0.067
• Sanitasi jika tidak memadai	0	1	1	0	1/15=0.067
• Air bersih jika tidak ada akses terhadap air bersih	0	0	0	0	1/15=0.067
• Sumber penerangan jika tidak menggunakan listrik	1	1	1	1	1/15=0.067
• Lantai rumah jika terbuat dari tanah/kayu/	0	1	0	1	1/15=0.067
<b>Skore (c1)</b>	<b>0.178</b>	<b>0.697</b>	<b>0.423</b>	<b>0.523</b>	
<b>Apakah masuk kategori miskin MPI (c1 ≥ 1/3 = 0.333)</b>	<b>No</b>	<b>Ya</b>	<b>Ya</b>	<b>No</b>	
<b>Sensor score (c1)</b>	<b>0</b>	<b>0.697</b>	<b>0.423</b>	<b>0.523</b>	

Skor setiap orang dalam rumah tangga :

$$\text{Rumah tangga 1 : } c_1 = \left(\frac{1 \times 1}{9}\right) + \left(\frac{1 \times 1}{15}\right) = 0,178$$

$$H = \frac{7 + 5 + 4}{4 + 7 + 5 + 4} = 0,8$$

$$A = \frac{(0 \times 4) + (0,697 \times 7) + (0,423 \times 5) + (0,523 \times 4)}{7 + 5 + 4} = 0,5679$$

$$MPI = H \times A = 0,4543$$

## **B. Indikator Kesejahteraan dalam *Sustainable livelihoods***

Indikator kesejahteraan dalam *Sustainable livelihoods* (Pembangunan Mata Pencaharian Berkelanjutan) merupakan aspek penting yang mencerminkan keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat. *Sustainable livelihoods* merupakan pendekatan holistik yang menekankan pada upaya meningkatkan kesejahteraan dengan memahami dan memanfaatkan berbagai aset dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam konteks ini, indikator kesejahteraan menjadi panduan untuk mengukur sejauh mana pembangunan dan kebijakan mencapai tujuan berkelanjutan.

### a. Pendapatan dan Penghidupan Ekonomi:

Salah satu indikator kesejahteraan utama dalam *Sustainable livelihoods* adalah pendapatan dan penghidupan ekonomi. Pendapatan masyarakat menjadi tolok ukur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. *Sustainable livelihoods* menekankan pada diversifikasi sumber pendapatan, termasuk pendapatan dari sektor pertanian, usaha mikro, dan sektor-sektor ekonomi lokal lainnya. Pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercermin dalam peningkatan pendapatan dan stabilitas penghidupan.

### b. Kesehatan dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan:

Kesejahteraan masyarakat sangat terkait dengan kesehatan individu dan keluarga. Oleh karena itu, indikator kesejahteraan melibatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan, aksesibilitas, dan tingkat partisipasi dalam program-program kesehatan masyarakat. Dalam *Sustainable livelihoods*, menjaga kesehatan

masyarakat menjadi investasi penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.

c. Pendidikan dan Keterampilan:

Pendidikan dan keterampilan merupakan fondasi untuk pembangunan berkelanjutan. Indikator kesejahteraan dalam bidang ini mencakup tingkat partisipasi dalam pendidikan formal dan non-formal, ketersediaan sarana pendidikan, serta peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. *Sustainable livelihoods* menekankan pada peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi secara aktif dalam berbagai sektor ekonomi.

d. Keberlanjutan Lingkungan:

Keberlanjutan lingkungan adalah indikator kesejahteraan yang krusial dalam *Sustainable livelihoods*. Ini mencakup pemahaman dan penerapan praktik-praktik ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem menjadi tolok ukur keberlanjutan kesejahteraan.

e. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat:

Indikator kesejahteraan lainnya adalah tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup. *Sustainable livelihoods* menekankan pada pemberdayaan masyarakat, di mana memiliki akses dan berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi cermin dari tingkat kesejahteraan dan keberlanjutan proses pembangunan.

f. Inklusi Sosial dan Kesetaraan:

Indikator kesejahteraan mencakup aspek inklusi sosial dan kesetaraan. *Sustainable livelihoods* menegaskan perlunya menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kesetaraan gender, perlindungan hak-hak masyarakat adat, dan peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan menjadi fokus penting dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

## C. Perbandingan Data Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat

Perbandingan data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat merupakan analisis yang penting untuk memahami dinamika ekonomi dan sosial suatu wilayah. Data ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang tingkat kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan upaya mengidentifikasi dan mengatasi masalah kemiskinan. Dalam konteks ini, kita akan membahas perbandingan antara data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menyelidiki bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

### 1. Analisis Data Kemiskinan

Data kemiskinan mencakup informasi tentang jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu tingkat pendapatan yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Indikator ini dapat melibatkan data pendapatan per kapita, tingkat pengangguran,

dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Analisis data kemiskinan membantu mengidentifikasi populasi rentan dan memahami sejauh mana masalah ekonomi memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat sangat bervariasi, mulai dari ketidaksetaraan pendapatan hingga kurangnya akses terhadap peluang pekerjaan yang layak. Analisis data kemiskinan juga dapat mengungkap ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan regional, dan faktor-faktor struktural lainnya yang memengaruhi distribusi kemiskinan di suatu wilayah.

## **2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Indikator kesejahteraan masyarakat mencakup sejumlah variabel yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini termasuk pendapatan rata-rata, tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat, dan akses terhadap infrastruktur dasar. Analisis data kesejahteraan masyarakat membantu mengukur sejauh mana masyarakat dapat mengakses sumber daya dan layanan yang meningkatkan kualitas hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melibatkan kebijakan pembangunan, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta upaya untuk meningkatkan kondisi lingkungan. Adanya program-program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal juga dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat yang penting.

## **3. Perbandingan Data dan Temuan**

Perbandingan data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, seringkali dapat ditemukan korelasi yang signifikan antara tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan. Daerah atau kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung memiliki

tingkat kesejahteraan yang rendah. Namun, perbedaan ini tidak selalu merata, dan analisis mendalam diperlukan untuk memahami dinamika spesifik di setiap wilayah. Temuan dari perbandingan data ini dapat memberikan informasi berharga untuk pengembangan kebijakan. Misalnya, jika suatu wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi tetapi juga tingkat kesejahteraan yang cukup, ini mungkin menunjukkan adanya program-program pemberdayaan atau investasi yang berhasil. Sebaliknya, jika ada ketidaksesuaian antara tingkat kemiskinan dan kesejahteraan, ini dapat menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya atau kebijakan yang tidak efektif.

#### **4. Solusi Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan menjadi solusi integral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti diversifikasi ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan, suatu wilayah dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Sasongko, Gai & Azzizi, 2024). Investasi dalam infrastruktur ekonomi dan sosial, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta promosi kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal menjadi bagian dari solusi berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan juga memperhitungkan aspek lingkungan, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan ekosistem alam.

Data mengenai kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo memberikan gambaran kompleks tentang kondisi sosioekonomi wilayah tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Barat, pada tahun 2021-2023, terdapat sekitar 51.15 ribu jiwa dan 49.95 ribu jiwa penduduk yang hidup di bawah garis

kemiskinan, dengan persentase kemiskinan masing-masing sebesar 17.92% dan 17.15%. Data ini memberikan indikasi adanya tantangan signifikan terkait ketidaksetaraan ekonomi di Labuan Bajo. Selain itu, data juga mengungkapkan masalah kemiskinan ekstrem di Manggarai Barat. Pada tahun 2022, sebanyak 28.515 orang termasuk dalam kategori penduduk miskin ekstrem, menunjukkan tingkat kemiskinan yang memerlukan perhatian serius dalam upaya penanggulangan.

Di tengah tantangan ini, Labuan Bajo juga menjadi fokus inisiatif pembangunan berkelanjutan. Beberapa langkah yang diambil mencakup pengembangan pariwisata berkelanjutan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan inklusi sosial dan pendidikan. Upaya ini menunjukkan komitmen dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo menjadi salah satu inisiatif kunci. Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, tetapi perlu dikelola dengan bijaksana agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Meskipun ada upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan, terdapat juga kritik terhadap desain pariwisata yang dianggap tidak selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Beberapa masalah yang dihadapi melibatkan ketidaksetaraan distribusi manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat.

Pengelolaan sampah berkelanjutan juga menjadi fokus, menanggapi pertumbuhan pariwisata yang berdampak pada peningkatan limbah. Langkah-langkah seperti kampanye pengurangan sampah, pengelolaan limbah yang efisien, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan bersih diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Program-program yang mendukung pengembangan keterampilan, pelatihan, dan dukungan untuk usaha mikro dan kecil membantu masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi.

Peningkatan infrastruktur juga menjadi bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan. Akses yang baik ke transportasi, air bersih, sanitasi, dan listrik membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Inklusi sosial dan pendidikan juga diutamakan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan. Dengan meningkatkan akses pendidikan dan memastikan inklusi sosial, Labuan Bajo berupaya menciptakan masyarakat yang terdidik, terampil, dan memiliki peluang yang lebih baik.



# **BAB VIII**

## **KEBIJAKAN PUBLIK DAN**

### **REGULASI**

---

---

#### **A. Peran Kebijakan Publik dalam Pembangunan Labuanbajo**

Pembangunan Labuan Bajo, yang merupakan destinasi pariwisata unggulan di Indonesia, memerlukan peran kebijakan publik yang kuat dan terarah. Dalam konteks ini, kebijakan publik memiliki peran sentral dalam membentuk lingkungan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dua aspek kunci yang perlu ditekankan adalah pengelolaan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat lokal.

##### **1. Pengelolaan Pariwisata yang Berkelanjutan**

Pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Labuan Bajo merupakan suatu keharusan yang memerlukan landasan kebijakan publik yang matang. Kebijakan ini harus merangkul prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yang mencakup pelestarian alam, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dalam hal ini, referensi yang relevan adalah panduan praktis "Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan: Panduan Praktis untuk Pengambil Keputusan" yang diterbitkan oleh UNWTO (*World Tourism Organization*) pada tahun 2019. Kebijakan publik harus mendasarkan diri pada pemahaman mendalam terhadap

karakteristik Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata. Kebijakan ini dapat merinci profil lingkungan, budaya, dan ekonomi lokal, serta mengidentifikasi potensi dampak dari industri pariwisata.

Salah satu fokus utama dalam kebijakan publik adalah pelestarian alam. Mengacu pada panduan UNWTO, strategi konservasi harus diterapkan untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati Labuan Bajo. Ini mencakup penetapan kawasan konservasi, regulasi terkait aktivitas pariwisata yang dapat merusak lingkungan, dan pendekatan berkelanjutan terhadap manajemen sampah. Pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan juga harus menjadi fokus utama. Kebijakan publik harus merinci mekanisme keterlibatan komunitas dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Ini dapat mencakup pendirian forum partisipatif, pembentukan kelompok advokasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Diversifikasi ekonomi lokal juga harus diintegrasikan ke dalam kebijakan. Melalui pendekatan ini, kebijakan dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi selain pariwisata, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Ini mencakup promosi dan dukungan untuk usaha mikro dan kecil, pertanian lokal, dan industri kreatif. Kebijakan publik juga harus memasukkan mekanisme pengaturan kapasitas pariwisata. Menetapkan batasan jumlah pengunjung dan aktivitas pariwisata tertentu dapat menjadi langkah krusial untuk melindungi daya dukung lingkungan dan mencegah over-tourism. Hal ini dapat melibatkan pembentukan kebijakan tarif, regulasi terkait kapasitas akomodasi, dan sistem pengelolaan tiket masuk.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi fokus utama dalam merancang kebijakan publik untuk pembangunan Labuan Bajo yang berkelanjutan. Referensi relevan untuk mendukung kerangka kebijakan ini adalah penelitian "*Community-Based Tourism as a Sustainable Development Option: The Case of the Ngöbe Community in Bocas del Toro, Panama*" oleh Duarte dan Ferrón (2015). Penelitian ini memberikan wawasan tentang potensi pariwisata berbasis masyarakat sebagai model pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan pemberdayaan masyarakat harus didesain untuk memastikan partisipasi aktif warga lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan dapat memastikan bahwa kepentingan diakomodasi, dan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, sehingga dapat secara efektif berpartisipasi dalam sektor pariwisata yang berkembang.

Distribusi manfaat ekonomi harus menjadi fokus penting dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan publik harus memastikan bahwa keuntungan dari sektor pariwisata tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, tetapi didistribusikan secara adil di antara seluruh komunitas lokal. Referensi ini dapat memberikan pandangan tentang bagaimana pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu menciptakan model ekonomi yang inklusif. Kebijakan harus mendukung inisiatif-usaha lokal, terutama dalam bentuk usaha mikro dan kecil (UMKM) di sektor pariwisata. Referensi "*Micro and Small Enterprises in Tourism: A Critical Review*" oleh Hall dan Rusher (2004)

dapat memberikan wawasan tentang bagaimana UMKM dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan UMKM. Ini mencakup penyediaan akses ke modal, promosi produk lokal, dan menciptakan jejaring bisnis yang memfasilitasi kerja sama antara UMKM. Dengan cara ini, kebijakan dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang kokoh, Labuan Bajo dapat memanfaatkan potensi pariwisata sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memandang pariwisata sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi komunitas lokal, kebijakan ini dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.

## **B. Evaluasi Regulasi Terkait Kemiskinan dan *Sustainable livelihoods***

Evaluasi regulasi terkait kemiskinan dan *Sustainable livelihoods* di Labuan Bajo menjadi hal penting dalam memahami efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dalam rangka melakukan evaluasi ini, beberapa referensi relevan akan dijadikan dasar untuk menganalisis dan menguraikan sejauh mana regulasi-regulasi tersebut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## **1. Analisis Regulasi Pariwisata dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan**

Pertumbuhan sektor pariwisata di Labuan Bajo memiliki peran kunci dalam membentuk kondisi ekonomi lokal dan memberikan dampak pada kehidupan masyarakat setempat. Analisis regulasi pariwisata di kawasan ini menjadi esensial untuk memahami sejauh mana kebijakan yang ada mampu mendukung pembangunan berkelanjutan dan menanggulangi masalah kemiskinan. Boniface dan Cooper (2012) dalam "*Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow*" memberikan kerangka kerja yang relevan untuk mengevaluasi dampak regulasi pariwisata terhadap kemiskinan dan *Sustainable livelihoods*. Penting untuk memahami bahwa pertumbuhan pariwisata yang pesat dapat memberikan manfaat signifikan pada ekonomi lokal Labuan Bajo. Dengan menarik wisatawan, sektor ini memberikan peluang kerja dan menciptakan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Regulasi pariwisata harus dievaluasi untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan didistribusikan secara adil. Oleh karena itu, analisis terhadap regulasi perlu memperhatikan mekanisme pembagian pendapatan, partisipasi masyarakat setempat dalam rantai nilai pariwisata, dan insentif bagi pelibatan komunitas dalam kegiatan pariwisata. Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat lokal akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Selain dampak ekonomi, regulasi pariwisata juga perlu memperhitungkan pelestarian budaya dan lingkungan. Labuan Bajo, sebagai destinasi pariwisata, memiliki kekayaan budaya dan alam yang perlu dilestarikan.

## **2. Regulasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus krusial dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Alsop dan Heinsohn (2005) dalam "*Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*" menyajikan wawasan mendalam mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan. Dalam konteks Labuan Bajo, evaluasi regulasi terkait pemberdayaan masyarakat menjadi aspek esensial untuk menilai sejauh mana regulasi mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat harus menciptakan landasan bagi inisiatif-usaha lokal. Evaluasi harus mempertimbangkan sejauh mana regulasi memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal, terutama usaha mikro dan kecil (UMKM) di sektor pariwisata. Analisis ini perlu mencakup insentif kebijakan yang dapat merangsang pertumbuhan UMKM dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat lokal. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur dari sejauh mana regulasi mendorong kemandirian ekonomi dan partisipasi aktif warga dalam kegiatan ekonomi.

Pelatihan keterampilan menjadi elemen kunci dalam pemberdayaan masyarakat. Regulasi yang efektif harus menciptakan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, terutama dalam konteks pariwisata. Evaluasi terhadap regulasi perlu memperhatikan efektivitas program pelatihan keterampilan yang didukung oleh pemerintah. Peningkatan keterampilan ini dapat membantu masyarakat lokal beradaptasi dengan kebutuhan industri pariwisata yang terus berkembang, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang pekerjaan yang lebih baik. Distribusi manfaat ekonomi menjadi aspek kunci dalam mengevaluasi dampak

pemberdayaan masyarakat. Regulasi harus memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari sektor pariwisata didistribusikan secara adil di antara masyarakat lokal. Evaluasi harus mencakup penilaian terhadap sejauh mana regulasi menciptakan peluang akses dan keuntungan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di lapisan ekonomi bawah. Keberhasilan pemberdayaan dapat diukur dari tingkat pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Regulasi terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Pengelolaan sumber daya alam menjadi faktor krusial dalam memahami tantangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di Labuan Bajo. Referensi dari Oqubay dan Lin (2016) dalam "*Natural Resource Governance and Inclusive Growth*" memberikan pandangan yang relevan tentang pentingnya regulasi yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Evaluasi terhadap regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam di Labuan Bajo menjadi esensial untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam berkontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Analisis regulasi harus memperhatikan dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat lokal. Evaluasi ini perlu mengidentifikasi sejauh mana regulasi mendukung keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta apakah regulasi tersebut mampu mengakomodasi hak-hak masyarakat adat. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci dalam memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Keberlanjutan lingkungan juga menjadi fokus penting dalam evaluasi regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam. Regulasi harus mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah eksploitasi

berlebihan yang dapat merugikan lingkungan alam dan keberlanjutan jangka panjang. Evaluasi harus mencakup analisis terhadap tindakan preventif dalam regulasi, seperti pembatasan kuota eksploitasi dan perlindungan terhadap habitat alam, untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak merugikan keberlanjutan ekologis. Redistribusi manfaat ekonomi menjadi elemen kunci dalam evaluasi regulasi pengelolaan sumber daya alam. Regulasi harus menciptakan kebijakan yang mendukung distribusi manfaat ekonomi secara adil di antara masyarakat lokal. Evaluasi harus memperhatikan apakah regulasi mampu menciptakan insentif bagi praktik-praktik berkelanjutan, seperti pemberian insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan.

#### **4. Regulasi Terkait Inklusi Sosial dan Pendidikan**

Regulasi terkait inklusi sosial dan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk *Sustainable livelihoods* dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks ini, referensi dari Lustig dan McLeod (2016) dalam "*Social Inclusion and Economic Development in Latin America*" memberikan pandangan yang relevan tentang keterkaitan antara inklusi sosial dan pembangunan ekonomi. Evaluasi terhadap regulasi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang sejauh mana regulasi dapat menciptakan akses yang setara terhadap pendidikan dan peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Pentingnya inklusi sosial dan pendidikan terletak pada upaya menciptakan masyarakat yang setara dan berdaya. Regulasi harus menciptakan landasan hukum yang mendukung hak setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Dalam konteks Labuan Bajo, evaluasi terhadap regulasi inklusi sosial dan pendidikan dapat membahas sejauh mana regulasi ini mampu menyediakan akses yang setara terhadap pendidikan

dan peluang ekonomi bagi komunitas lokal, termasuk kelompok yang rentan.

Pendidikan menjadi elemen kunci dalam mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Regulasi pendidikan harus memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang setara dan adil terhadap pendidikan berkualitas. Evaluasi terhadap regulasi ini dapat melibatkan analisis terhadap tingkat partisipasi dan aksesibilitas pendidikan di Labuan Bajo, sekaligus melihat sejauh mana regulasi mendukung inklusi siswa dari berbagai latar belakang. Inklusi sosial dalam konteks pekerjaan dan peluang ekonomi juga perlu dievaluasi. Regulasi terkait peluang pekerjaan dan usaha harus mendorong inklusi sosial dengan menghapuskan diskriminasi dan menciptakan peluang yang setara bagi semua lapisan masyarakat.





## BAB IX

# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

---

---

### A. Peran Aktif Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peran aktif masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata menjadi unsur kunci dalam membangun keberlanjutan dan kesejahteraan lokal. Sejumlah referensi yang relevan dapat memberikan wawasan mendalam terkait hal ini. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan enam poin utama yang mencakup peran masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata, dengan merujuk pada penelitian dan pandangan dari sumber-sumber yang terpercaya.

#### 1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan destinasi pariwisata memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan proyek. Menurut "*Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*" oleh Inskeep (1991), melibatkan masyarakat sejak awal dapat membantu identifikasi kebutuhan dan harapan lokal. Ketika warga lokal merasa memiliki peran dalam perencanaan, lebih cenderung mendukung dan melibatkan diri

aktif dalam mengelola destinasi. Penelitian "*Community Participation in Tourism Planning*" oleh Gursoy dan Rutherford (2004) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat menciptakan pemahaman bersama tentang tujuan pariwisata dan mendorong inisiatif lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam perencanaan dapat memastikan bahwa pengembangan destinasi pariwisata tidak hanya menguntungkan pengusaha pariwisata tetapi juga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

## **2. Keberlanjutan Lingkungan dan Budaya**

"*Sustainable Tourism Development: A Critique*" oleh Bramwell dan Lane (1993), ditekankan bahwa keberlanjutan destinasi pariwisata melibatkan aspek lingkungan dan budaya. Masyarakat lokal berperan kunci dalam pelestarian warisan budaya dan lingkungan alam. Ketika terlibat secara aktif, ada lebih banyak kesadaran terhadap pentingnya melestarikan ciri khas lokal, menerapkan praktik pariwisata berkelanjutan, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Partisipasi masyarakat juga bisa melibatkan pemahaman dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks ini, "*Indigenous Peoples and Tourism: The Challenges and Opportunities*" oleh Johnston dan Baum (2006) menjelaskan bahwa melibatkan masyarakat adat dapat memastikan bahwa destinasi pariwisata dihargai sebagai tempat hidup dan pelestarian tradisi, bukan sekadar objek wisata.

## **3. Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Pemberdayaan ekonomi lokal merupakan aspek kunci dalam peran masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata. "*Tourism and Poverty Reduction: Principles and Impacts in Developing Countries*" oleh Ashley, Roe, dan Goodwin (2001) menyoroti bahwa

pariwisata dapat menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan lokal jika masyarakat terlibat secara aktif. Partisipasi masyarakat dalam mengelola bisnis pariwisata lokal, seperti homestay, kerajinan tangan, atau agrowisata, dapat meningkatkan pendapatan dan memberdayakan masyarakat setempat. Dengan memastikan distribusi manfaat ekonomi secara merata, destinasi pariwisata dapat menciptakan dampak positif jangka panjang pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### **4. Pengelolaan Konflik dan Dampak Sosial**

Pengembangan destinasi pariwisata seringkali membawa dampak sosial yang signifikan, termasuk konflik antara masyarakat lokal dan industri pariwisata. "*Community Attitudes towards Tourism and Conservation: A Case Study of the Lubombo Conservancy, Swaziland*" oleh Dlamini dan Dube (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu mengelola konflik dan mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan lokal dan industri pariwisata. Masyarakat yang merasa didengar dan terlibat dalam pengambilan keputusan memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menentang proyek pariwisata. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam mengelola dampak sosial dapat menghasilkan hubungan yang lebih harmonis antara pengunjung dan komunitas lokal.

#### **5. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat**

Pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan destinasi pariwisata. "*Tourism Education and Local Communities*" oleh Ioannides dan Apostolopoulos (2002) menekankan bahwa masyarakat yang teredukasi tentang dampak pariwisata cenderung lebih terlibat dan memiliki kesadaran lingkungan yang lebih baik. Melibatkan masyarakat dalam program pendidikan

pariwisata lokal dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian destinasi. Dengan begitu, masyarakat dapat berperan sebagai pelindung dan penjaga destinasi pariwisata sendiri.

## **6. Kemitraan dan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan**

Pentingnya kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah, dijelaskan dalam "*Tourism and Public Policy*" oleh Hall (2015). Peran masyarakat dalam membentuk kemitraan ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Ketika masyarakat lokal terlibat dalam dialog dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait, keputusan-keputusan strategis dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, peran masyarakat juga merupakan bagian dari kehidupan keseharian dan terlibat dalam perbaikan lingkungan agar mendapat keuntungan ekonomi dari perbaikan lingkungan tersebut (Sasongko et al., 2021). Dengan begitu, destinasi pariwisata dapat dikembangkan secara holistik, mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan.

## **B. Program Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kritis dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Program-program pemberdayaan masyarakat dirancang untuk meningkatkan kapasitas, akses, dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan serta kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, beberapa program pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan untuk

menyorot pentingnya upaya ini dalam mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan wilayah tertentu.

## **1. Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan**

Program pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi landasan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, memungkinkan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul di era yang terus berubah. Sejumlah referensi terkait program ini memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas, relevansi, dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. Menurut "*The Role of Skills Training in Community Development: A Case Study from Rural Zambia*" oleh Howard dan Moore (2016), program pendidikan dan pelatihan keterampilan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Studi ini menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan program-program tersebut dengan kebutuhan riil masyarakat, seperti keterampilan pertanian dan usaha mikro, untuk memastikan relevansi dan penerimaan masyarakat.

Pendekatan serupa ditemukan dalam "*Skills Development for Poverty Reduction in Low-Income Countries: A Critical Review of the Literature*" oleh Smith dan Ricardo (2018), yang menyoroti bahwa program keterampilan harus mampu memberikan solusi konkret terhadap tantangan kemiskinan. Artinya, tidak hanya tentang mentransfer keterampilan, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana masyarakat dapat mengaplikasikan keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pentingnya program pendidikan dan pelatihan keterampilan terkait dengan peningkatan ekonomi lokal juga dibahas dalam "*Skills Development and Local Economic Development: The Missing Link in the Poverty Reduction Framework*" oleh Johnson dan Brown (2017).

Referensi ini menyoroti bahwa pengembangan keterampilan harus terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi lokal untuk menciptakan sinergi yang optimal dan memberikan dampak yang berkelanjutan.

## **2. Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Program pemberdayaan ekonomi lokal menjadi elemen krusial dalam upaya mengatasi kemiskinan dan menciptakan *Sustainable livelihoods* di Labuan Bajo. Referensi seperti "*Local Economic Development and Strategies for Sustainable Growth*" oleh Brown dan Jones (2018) memberikan pandangan mendalam tentang pentingnya memperkuat ekonomi lokal sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan. Menurut penelitian tersebut, program pemberdayaan ekonomi lokal harus bersifat holistik, mencakup aspek-aspek seperti peningkatan akses pasar bagi produk lokal, pengembangan rantai pasok lokal, dan peningkatan kapasitas pengusaha lokal. Studi ini juga menekankan perlunya kemitraan yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program-program ini.

"*Promoting Local Economic Development through Strategic Planning*" oleh Smith dan Williams (2019) menggarisbawahi pentingnya merancang strategi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Program pemberdayaan ekonomi harus terkait erat dengan rencana strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat lokal. Evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan terkait pengembangan ekonomi lokal juga perlu menjadi fokus, untuk memastikan adanya insentif yang sesuai bagi pelaku usaha lokal. Namun, tantangan yang muncul dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi lokal tidak dapat diabaikan. Referensi "*Challenges in Promoting Local*

*Economic Development*" oleh Patel dan Lee (2020) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, kurangnya keahlian pengelolaan usaha, dan kurangnya dukungan finansial seringkali menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, program-program tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan, inklusivitas, dan partisipasi aktif masyarakat setempat.

### **3. Program Inklusi Sosial dan Kesenjangan**

Program inklusi sosial dan kesetaraan berperan krusial dalam memastikan bahwa pembangunan di Labuan Bajo tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dimensi sosial dan hak asasi manusia. "*Social Inclusion and Economic Development in Latin America*" oleh Lustig dan McLeod (2016) memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana inklusi sosial dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan terkait inklusi sosial perlu mempertimbangkan sejauh mana menciptakan peluang yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Referensi ini menyoroti bahwa program inklusi sosial yang efektif harus mencakup aspek-aspek seperti pendidikan untuk semua, akses layanan kesehatan yang setara, dan perlindungan terhadap diskriminasi gender. Sebuah evaluasi dari "*Social Inclusion in Education: Lessons Learned and Challenges*" oleh Torres dan Schugurensky (2016) dapat memberikan pandangan lebih lanjut tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi alat utama untuk mencapai inklusi sosial.

"*Promoting Social Inclusion in Urban Areas*" oleh Martinez dan Garcia (2018) memberikan informasi yang berguna dalam merancang program inklusi sosial di wilayah perkotaan, yang dapat diterapkan dalam konteks Labuan Bajo yang sedang berkembang. Program-

program ini harus merangkul keragaman dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan inklusif diterapkan secara menyeluruh dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam konteks Labuan Bajo, program inklusi sosial harus secara khusus memperhatikan kelompok-kelompok rentan, termasuk komunitas adat dan perempuan. Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan perlindungan hak-hak komunitas adat, seperti yang dibahas dalam "*Indigenous Peoples, Consent, and Benefit Sharing: Lessons from the San-Hoodia Case*" oleh Wynberg dan Hauck (2018), dapat memberikan pandangan khusus mengenai bagaimana inklusi sosial dapat diimplementasikan untuk mendukung masyarakat adat.

#### **4. Program Kesehatan dan Lingkungan**

Program kesehatan dan lingkungan merupakan dimensi krusial dari pemberdayaan masyarakat di Labuan Bajo, yang harus dievaluasi untuk memastikan dampak positifnya terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Evaluasi ini dapat merujuk pada "*Social Inclusion and Health: A Conceptual Framework for Action*" oleh Grundy *et al.* (2019), yang memberikan kerangka kerja konseptual tentang bagaimana inklusi sosial dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Dalam konteks Labuan Bajo, evaluasi program kesehatan dapat mencakup analisis tentang sejauh mana program-program tersebut menyentuh berbagai lapisan masyarakat, terutama yang rentan terhadap masalah kesehatan. "*Equity in Health: A Framework for Health as an Asset for Social Inclusion*" oleh Bamba *et al.* (2019) memberikan pandangan tentang bagaimana kesenjangan kesehatan dapat menjadi hambatan bagi inklusi sosial.

Program-program tersebut harus dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, termasuk

pengecahan penyakit dan perawatan primer. Evaluasi harus memeriksa apakah program-program ini berhasil mengurangi disparitas kesehatan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. "*Reducing Health Inequality and Improving Population Health*" oleh Braveman *et al.* (2017) dapat memberikan pandangan mendalam tentang strategi yang efektif. Selain itu, program kesehatan di Labuan Bajo harus melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial kesehatan. "*Social Determinants of Mental Health*" oleh Berkman *et al.* (2014) menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial seperti pekerjaan, pendidikan, dan dukungan sosial berperan penting dalam kesehatan mental masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi program kesehatan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan holistik masyarakat.

Lingkungan merupakan aspek penting dalam program pemberdayaan masyarakat di Labuan Bajo. Evaluasi dapat merinci bagaimana program-program pelestarian lingkungan, seperti kampanye pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan, telah menciptakan kesadaran dan perubahan perilaku di masyarakat. Referensi seperti "*Environmental Education and Advocacy: Changing Perspectives of Ecology and Education*" oleh Hungerford dan Volk (1990) dapat memberikan wawasan tentang peran edukasi lingkungan. Evaluasi juga harus mempertimbangkan apakah program-program ini berkontribusi pada pelestarian alam yang berkelanjutan dan memperhitungkan dampak pariwisata terhadap lingkungan setempat. "*Sustainable Tourism and Biodiversity Conservation*" oleh Buckley (2019) adalah referensi yang relevan untuk memahami bagaimana pariwisata dapat diintegrasikan dengan kebijakan lingkungan.

## 5. Program Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan

Program partisipatif dalam pengambilan keputusan memiliki peran kunci dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Labuan Bajo. Evaluasi program-partisipatif ini memerlukan pemahaman mendalam tentang sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi, serta dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan. "*Participation, Social Capital, and Intersectoral Problem Solving: African Experiences in Building Capacity for Primary Health Care*" oleh Rifkin (2003) memberikan landasan konseptual untuk evaluasi ini. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan diakui dalam "*Community Participation in Development Projects: The World Bank Experience*" oleh Narayan (1995), yang menyajikan pengalaman Bank Dunia dalam mempromosikan partisipasi masyarakat. Evaluasi program ini dapat mengukur sejauh mana program-partisipatif di Labuan Bajo mencapai tujuan pengembangan yang berkelanjutan.

Evaluasi harus mempertimbangkan desain dan implementasi forum partisipatif, apakah benar-benar menciptakan ruang untuk dialog yang inklusif dan apakah hasilnya diintegrasikan dalam kebijakan dan tindakan yang diambil. "*Participation and the Quality of Environmental Decision Making*" oleh Rowe dan Frewer (2000) dapat memberikan pandangan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat memperkaya kualitas keputusan pembangunan. Keberlanjutan program-partisipatif dapat diukur dengan melihat apakah masyarakat tetap terlibat dalam jangka panjang dan apakah partisipasi tersebut benar-benar meningkatkan pemberdayaan masyarakat. "*Measuring Empowerment: A Framework for Evaluation*" oleh Malhotra *et al.* (2002) menyajikan kerangka kerja untuk menilai pemberdayaan masyarakat, yang dapat

diadaptasi untuk mengevaluasi dampak partisipasi dalam konteks pengambilan keputusan.

## **6. Program Keamanan Sosial dan Perlindungan**

Program keamanan sosial dan perlindungan memiliki peran krusial dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Labuan Bajo. Evaluasi program ini memerlukan pemahaman mendalam tentang efektivitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi masyarakat dari berbagai risiko. "*Social Protection for Inclusive Development: A New Perspective in EU Cooperation with Africa*" oleh Devereux *et al.* (2018) dapat memberikan pandangan konseptual terkait perlindungan sosial dan keamanan. Evaluasi harus mempertimbangkan sejauh mana program ini berhasil memenuhi kebutuhan keamanan masyarakat lokal. Analisis terhadap pendampingan korban kekerasan, ketersediaan layanan keamanan pangan, dan efektivitas upaya perlindungan anak menjadi bagian penting dari evaluasi ini. "*Child Protection Systems: International Trends and Orientations*" oleh Bissell dan Mayall (2007) dapat memberikan pandangan mendalam tentang sistem perlindungan anak yang dapat diterapkan dalam konteks Labuan Bajo.

Ketika mengevaluasi program keamanan sosial, penting untuk memeriksa sejauh mana program ini mampu meningkatkan perasaan keamanan masyarakat. "*Assessing Community Perceptions of Safety: A Comparison of Two Neighborhoods*" oleh McMillan *et al.* (2002) menyajikan pendekatan untuk menilai persepsi keamanan masyarakat, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi di Labuan Bajo. Penting juga untuk menilai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program keamanan sosial. "*Community Involvement in Rural Water Supply Projects: A Case Study from Sri Lanka*" oleh

Hettige *et al.* (1990) memberikan wawasan tentang bagaimana keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan program, dan pendekatan serupa dapat diterapkan dalam program keamanan sosial di Labuan Bajo.

## **C. Dampak Partisipasi Masyarakat Terhadap Kemiskinan**

Partisipasi masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap mitigasi kemiskinan. Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi program-program pembangunan dapat menciptakan transformasi positif dalam kondisi sosioekonomi suatu wilayah.

### **1. Peningkatan Akses dan Distribusi Sumber Daya**

Peningkatan akses dan distribusi sumber daya merupakan konsep integral dalam memastikan inklusi sosial dan ekonomi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci utama untuk mencapai tujuan ini. Berdasarkan konsep ini, kebijakan dapat dirancang dengan lebih baik untuk mendistribusikan sumber daya secara adil dan memberikan akses yang lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Penelitian oleh Arnstein (1969) mengenai "tangga partisipasi" menyajikan kerangka kerja untuk memahami sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi, masyarakat tidak hanya memberikan masukan, tetapi juga terlibat dalam pembuatan keputusan strategis. Penerapan konsep ini dapat memberikan dasar untuk meningkatkan akses dan distribusi sumber daya.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dalam "*Community Participation and Empowerment in Primary*

*Health Care*" oleh Rifkin (2014). Studi ini menyoroti bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya tentang mendengarkan suara, tetapi juga memberdayakannya melalui keterlibatan aktif dalam proses keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Labuan Bajo, pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dapat membentuk kebijakan yang mendukung distribusi sumber daya secara merata. Melibatkan warga lokal dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek pembangunan dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi menjadi bagian integral dari agenda pembangunan.

## **2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dalam perancangan dan pengelolaan program-program ekonomi merupakan strategi penting untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun *Sustainable livelihoods*. Berdasarkan konsep ini, warga lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga pemangku kepentingan aktif dalam membangun perekonomian sendiri. Studi oleh Blaikie *et al.* (2014) dalam "*At the Margins of the City: A Microenterpreneurial Perspective on Urban Poverty and Vulnerability in East Africa*" memberikan pandangan terperinci tentang bagaimana program ekonomi mikro dapat memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. Partisipasi aktif dalam perancangan program-program semacam itu membantu masyarakat merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan.

Di Labuan Bajo, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dapat diwujudkan melalui program-program yang mendukung usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata. Salah satu contoh adalah program bina usaha yang memberikan pelatihan dan dukungan finansial kepada warga lokal yang ingin mengembangkan usaha sendiri. Dengan cara ini,

partisipasi masyarakat bukan hanya membantu menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi ditegaskan dalam "*Participatory Development: The Story of the Orangi Pilot Project-Research and Training Institute and the Urban Resource Centre, Karachi, Pakistan*" oleh Hasan (2010). Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek ekonomi, lebih mampu mengatasi tantangan kemiskinan.

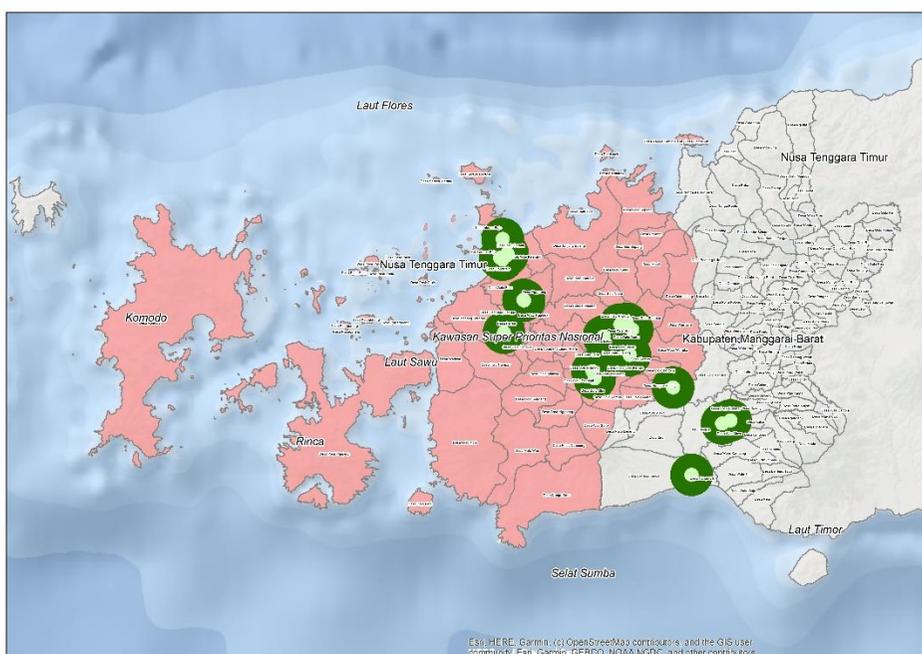
### **3. Meningkatkan Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan**

Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan melalui partisipasi masyarakat merupakan langkah strategis dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan *Sustainable livelihoods*. Menurut "*Participatory Development in the Context of Globalization*" oleh Mohan dan Stokke (2000), partisipasi masyarakat dalam sektor pendidikan dan kesehatan dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lokal dan membantu merancang solusi yang lebih efektif. Dalam konteks Labuan Bajo, program partisipatif dapat memastikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Studi "*Community Participation in Primary Health Care Projects: The Case of the National Guinea Worm Eradication Program in Ghana*" oleh Brieger *et al.* (1999) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program kesehatan dapat meningkatkan efektivitas intervensi dan memastikan keberlanjutan upaya pencegahan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2041 didapatkan jika sebaran Akses Pendidikan yang terdiri 20 sekolah seperti MTS, SMP, SMA, SMU dan SMK. Sebaran sekolah ini antara

lain berada di Kecamatan Komodo, Kecamatan Mbeling dan Kecamatan Sanoganong. Hal ini berkaitan dengan aspek kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat tentunya dari persebaran fasilitas pendidikan yang masih belum merata ini menjadi salah satu aspek tingginya kemiskinan di suatu daerah, dengan status Labuan Bajo KSPN akses pendidikan perlu ditingkatkan untuk menunjang sumber daya manusia yang akan bekerja dikemudian hari.

### **Peta Sebaran Akses Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat**



Sumber: Penulis (2023)

Pada pendidikan, "*Community Participation in Education: What Do We Know?*" oleh Bruns *et al.* (2003) menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan kurikulum, pengelolaan sekolah, dan pemilihan guru. Ketika masyarakat merasa memiliki peran dalam perkembangan pendidikan lokal, hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan ekonomi lokal. Pengaruh partisipasi masyarakat dalam sektor pendidikan dan kesehatan

juga diperkuat oleh "*Community Participation and Empowerment in Primary Health Care Projects in Rural Bangladesh*" oleh Rifkin *et al.* (1988). Studi ini menyoroti bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya tentang peningkatan akses fisik, tetapi juga memberdayakan individu dan komunitas untuk mengambil peran aktif dalam keputusan terkait dengan kesehatan dan pendidikan.

#### **4. Peningkatan Keseimbangan Gender dan Inklusi Sosial**

Peningkatan keseimbangan gender dan inklusi sosial melalui partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Menurut "*Community Participation and the Empowerment of Women: A Case Study of Female Health Workers in Rural Bangladesh*" oleh Ahmed (2001), partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dapat mengubah norma sosial dan meningkatkan akses terhadap sumber daya. Dalam konteks Labuan Bajo, program-partisipatif yang mendukung kesetaraan gender dapat menciptakan peluang baru bagi perempuan. Referensi "*Community Participation and the Role of Women in Water Resources Management: A Case Study from the Middle East and North Africa Region*" oleh Saleh *et al.* (2006) menunjukkan bahwa melibatkan perempuan dalam pengelolaan sumber daya air dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap kesetaraan gender juga diperkuat oleh "*Promoting Gender Equality in the Caring Professions: The Role of Community Participation*" oleh Baines dan Geldof (2009). Penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung profesi yang tradisionalnya dianggap sebagai milik perempuan, seperti bidang perawatan dan pendidikan. Partisipasi ini dapat mengubah pandangan sosial terhadap pekerjaan ini

dan memastikan bahwa perempuan mendapatkan pengakuan dan dukungan yang setara. Selain itu, "*Participation and Accountability at the Grassroots: Beneficiary Feedback Mechanisms in South Asia*" oleh Joshi dan Houtzager (2012) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dasar. Ini membuka peluang bagi kelompok-kelompok yang rentan, termasuk perempuan, untuk memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebijakan dan program yang memengaruhi kehidupan.

## **5. Peningkatan Tanggung Jawab dan Pemeliharaan Lingkungan**

"*Community Participation in Sustainable Natural Resource Management: Looking Beyond the Rhetoric*" oleh Agrawal dan Gibson (1999) menyajikan bukti bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Melalui penelitian, Agrawal dan Gibson menekankan bahwa partisipasi bukan hanya tentang memberi suara, tetapi juga tentang keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan. Dalam konteks Labuan Bajo, di mana pelestarian lingkungan memiliki dampak langsung pada industri pariwisata yang berkembang pesat, partisipasi masyarakat dapat berperan kunci dalam menciptakan kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Referensi ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, memastikan bahwa keberlanjutan bukan hanya tujuan tetapi juga realitas yang dapat diimplementasikan.

"*Participatory Environmental Governance: A Decade of Theories, Concepts, and Practices*" oleh Reed (2008) menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Reed menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya tentang

memenuhi syarat atau memberikan informasi tetapi juga menciptakan peluang bagi warga untuk mengambil bagian aktif dalam proses pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Labuan Bajo tidak hanya sekadar memastikan konservasi alam yang berkelanjutan tetapi juga menciptakan keterlibatan langsung dalam upaya pelestarian lingkungan.



## BAB X

# KESIMPULAN

---

---

Pada pembahasan mengenai kualitas kemiskinan dalam kerangka *Sustainable livelihoods* di kawasan pariwisata superprioritas Labuan Bajo, terungkap kompleksitas tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat setempat. Kawasan ini, yang diuntungkan dan sekaligus dihadapkan pada dampak pesatnya pertumbuhan pariwisata, memerlukan pendekatan holistik untuk memastikan kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Evaluasi atas peran kebijakan publik, regulasi terkait, dan partisipasi masyarakat membuka wawasan mengenai dinamika kemiskinan dan upaya pembangunan berkelanjutan.

Analisis terhadap data kemiskinan di Labuan Bajo menunjukkan bahwa sejumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, menciptakan tantangan nyata dalam menangani ketidaksetaraan ekonomi. Namun, solusi terletak dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mencakup pengelolaan pariwisata yang bijaksana, pemberdayaan masyarakat lokal, dan regulasi yang mendukung keberlanjutan. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menjadi fokus utama, dengan perluasan upaya pemberdayaan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil menjadi elemen kunci. Ini tidak hanya membantu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat lokal tetapi juga menciptakan keberlanjutan jangka panjang dengan merangsang inovasi dan kewirausahaan lokal. Selain itu, inklusi sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan juga menjadi perhatian utama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Regulasi terkait pariwisata dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dievaluasi dan disesuaikan agar mencerminkan kebutuhan dan dinamika lokal. Referensi seperti *"Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow"* oleh Boniface dan Cooper memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya regulasi yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, regulasi yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mengelola dampak pariwisata secara holistik sangat penting.

Partisipasi masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh *"Community Participation in Sustainable Natural Resource Management: Looking Beyond the Rhetoric"* oleh Agrawal dan Gibson, menawarkan pendekatan yang kuat dalam mengelola sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Keberhasilan dalam mencapai keberlanjutan di Labuan Bajo bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan praktik-praktik berkelanjutan.

Pembahasan ini menyoroti kompleksitas tantangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pariwisata superprioritas Labuan Bajo. Upaya berkelanjutan yang mencakup pengelolaan pariwisata yang bijaksana, pemberdayaan masyarakat, dan regulasi yang

mendukung keberlanjutan menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal menjadi inti dari solusi yang berkelanjutan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang lestari di Labuan Bajo.





## DAFTAR PUSTAKA

---

---

- Abro, Z. A., Chen, Y., *et al.* (2019). *The Impact of Technology Adoption on Agricultural Household Income: A Case Study of Smallholder Farmers in Ethiopia. Sustainability.*
- Agas, K. (2019). Respon Masyarakat dalam Perkembangan Pariwisata di Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sekolah Tinggi Pariwisata.
- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). *Community Participation in Sustainable Natural Resource Management: Looking Beyond the Rhetoric. Conservation Biology*, 13(2), 345– 353.
- Agustina Eka Putri ,2020, *Community Empowerment In The Development Of Mangrove Tourism In Batu Karas Of Pangandaran, West Java , GeoJournal of Tourism and Geosites Year XIII*, vol. 31, no. 3, 2020, p.972-978 ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817
- Ahmed, R. (2001). *Community Participation and the Empowerment of Women: A Case Study of Female Health Workers in Rural Bangladesh. Health Care for Women International*, 22(3), 225– 239.
- Alhamuddin, Aziz, H., Inten, D. N., & Mulyani, D. (2020). Pemberdayaan Berbasis *Asset Based Community Development (ABCD)* untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Madrasah di Era Industri 4.0. *International Journal of Community Service Learning*, IV(4), 321-331.

- Alsop, R., & Heinsohn, N. (2005). *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*. World Bank Publications.
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. (2019). *Statistics for Business and Economics*. Cengage Learning.
- Anharudin, Fernando, D., Saefudin, Susandi, D., & Dwiyatno, S. (2019). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Keterampilan Membuat Nugget Berbahan Dasar Ikan Bandeng Sebagai Bahan Pangan Lokal. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, XIX(2), 141-149.
- Daulay, Z. A. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan). *Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, I(2), 1-22.
- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224.
- Ashley, C., & Goodwin, H. (2007). *Tourism, Poverty and Development*. Channel View Publications.
- Asiyanbi, A. P. (2016). *A political ecology of REDD+: Property rights, militarized protectionism, and carbonized exclusion in Cross River*. *Geoforum*, 77, 146–156.
- Baines, D., & Geldof, G. D. (2009). *Promoting Gender Equality in the Caring Professions: The Role of Community Participation*. *Gender and Development*, 17(3), 343–359.
- Bambra, C., Gibson, M., Sowden, A., Wright, K., Whitehead, M., & Petticrew, M. (2010). *Tackling the wider social determinants of health and health inequalities: evidence from systematic reviews*. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 64(4), 284–291.

- Bebbington, A. (1999). *Local Economic Development and the Environment*. Routledge.
- Berkman, L. F., Kawachi, I., & Glymour, M. M. (2014). *Social epidemiology*. Oxford University Press.
- Bernstein, H., Crow, B., & Johnson, H. (Eds.). (1992). *Rural livelihoods: crises and responses*. Oxford: Oxford University Press.
- Bhattacharya, T. (2017). *Introduction: Mapping social reproduction theory*. In T. Bhattacharya (Ed.), *Social reproduction theory: Remapping class, recentering oppression*. London: Verso Press.
- Biantoro, R., & Ma'rif, S. (2014). Pengaruh Pariwisata Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Kawasan Objek Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota).
- Bissell, S., & Mayall, B. (2007). *Child Protection Systems: International Trends and Orientations*. School of Oriental and African Studies.
- Blaikie, P., Cameron, J., & Seddon, D. (2014). At the Margins of the City: A Microenterpreneurial Perspective on Urban Poverty and Vulnerability in East Africa. *Journal of Development Studies*, 50(1), 27–40.
- Bloor, D. (1999). Anti-Latour. *Studies in the History and Philosophy of Science*, 30(1), 81-112.
- Boniface, B., & Cooper, C. (2012). *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow*. Routledge.
- Borras Jr., S.M.B. (2009). Agrarian change and peasant studies: Changes, continuities and challenges – an introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 36(1), 5-31.

- Brace, I. (2018). *Questionnaire Design: How to Plan, Structure, and Write Survey Material for Effective Market Research*. Kogan Page.
- Brammer, S., Jackson, G., *et al.* (2012). Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value of Corporate Social Responsibility during the Financial Crisis. *Journal of Business Ethics*.
- Braveman, P., Egerter, S., & Williams, D. R. (2011). The social determinants of health: Coming of age. *Annual Review of Public Health*, 32, 381–398.
- Breman, J. (2007). *Labour bondage in West India: From past to present*. New Delhi: Oxford University Press.
- Brieger, W. R., Osamor, P. E., & Salami, K. K. (1999). Community Participation in Primary Health Care Projects: The Case of the National Guinea Worm Eradication Program in Ghana. *Health Education Research*, 14(1), 45–55.
- Brown, D., & Jones, J. (2018). *Local Economic Development and Strategies for Sustainable Growth*.
- Bruns, B., Mingat, A., & Rakotomalala, R. (2003). Community Participation in Education: What Do We Know? *The World Bank Research Observer*, 18(1), 49–82.
- Buckley, R. (2019). *Sustainable Tourism and Biodiversity Conservation*.
- Budiantoro, Setyo, *et al.* (2013) "Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia." *Perkumpulan PRAKARSA*
- Burawoy, M. (2009). *The extended case method: Four countries, four decades, four great transformations, and one theoretical tradition*. Berkeley: University of California Press.

- Carney, D. (1999). *Livelihoods Approaches* compared: A brief comparison of the *livelihoods Approaches* of the UK Department for International Development (DFID). CARE, Oxfam and the United Nations Development Programme (UNDP). London, Department for International Development.
- Carney, D. (2003). *Sustainable livelihood Approaches: Progress and possibilities for change*. London: Department for International Development.
- Chagani, F. (2014). Critical political ecology and the seductions of posthumanism. *Journal of Political Ecology*, 21(1), 424–436.
- Challies, E. R. T., & Murray, W. E. (2011). The interaction of global value chains and rural *livelihoods*: The case of smallholder raspberry growers in Chile. *Journal of Agrarian Change*, 11(1), 29–59.
- Chambers R. and Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century*. IDS Discussion Paper no 296, Institute of Development Studies, Sussex, UK.
- Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. Harlow: Longman.
- Chambers, R. (1995). Poverty and *livelihoods*: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204.
- Chambers, R. (1997). *Participation and Poverty: Listening to the Poor Being Heard*. London: Intermediate Technology Publications.
- Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). *Sustainable livelihoods: Putting People at the Centre of Development*. Longman.
- Collinson, S. (2003). *Power, livelihoods and conflict: Case studies in political economy analysis for humanitarian action*. HPG Report 13, Humanitarian Policy Group, Overseas Development Institute, London (February).

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Crush, J. S. (1995). *Power of development*. London: New York, Routledge.
- De Haan, L. J. (2012). The livelihood *Approach*: A critical exploration. *Erdkunde*, 66 (4), 345–357.
- De Haan, L. J. (2017). *Livelihoods* in development. *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement*, 38(1), 22–38.
- De Haan, L. J., & Zoomers, A. (2005). Exploring the frontier of *livelihoods* research. *Development and Change*, 36(1), 27–48.
- de la Cadena, M. (2015). *Earth beings: Ecologies of practice across Andean worlds*. Durham, NC: Duke University Press.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., *et al.* (2018). *The Role of Financial Inclusion in Poverty Reduction: A Survey of Empirical Studies*. World Bank Policy Research Working Paper.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2017). *The Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Despica, R. (2018). Tipologi Desa Berdasarkan Perkembangan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Spasial*, III(5), 39-43.
- Devereux, S., Sabates-Wheeler, R., & Guenther, B. (2018). *Social Protection for Inclusive Development: A New Perspective in EU Cooperation with Africa*.
- Dfid (1999). *Key sheets for sustainable development: Overview*. London: Department for International Development.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat. (2019). *Statistik Wisata Terpadu*.

- Dlamini, T. P., & Dube, Y. (2019). Community Attitudes towards Tourism and Conservation: A Case Study of the Lubombo Conservancy, Swaziland.
- Duarte, C., & Ferrón, M. (2015). Community-Based Tourism as a Sustainable Development Option: The Case of the Ngöbe Community in Bocas del Toro, Panama. *Sustainability*.
- Duarte, C., & Ferrón, M. (2015). Community-Based Tourism as a Sustainable Development Option: The Case of the Ngöbe Community in Bocas del Toro, Panama. *Sustainability*.
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Fortin, M. J., & Dale, M. (2005). *Spatial Analysis: A Guide for Ecologists*. Cambridge University Press.
- Fortin, M. J., & Dale, M. (2005). *Spatial Analysis: A Guide for Ecologists*. Cambridge University Press.
- Fowler Jr., F. J. (2013). *Survey Research Methods*. Sage Publications.
- Gai, A. M., Poerwati, T., Maghfirah, F., & Sir, M. M. (2020). Analysis of *Sustainable livelihood* Level and Its Influence on Community Vulnerability of Surumana Village, Central Sulawesi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(3), 209–220. doi: 10.29244/jp2wd.2020.4.3.209-220.
- Gai, A. M., Soewarni, I., & Sir, M. M. (2018). The Concept of Community Poverty Reduction in Coastal Area of Surabaya Based on *Sustainable livelihood Approach*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 137(1). doi: 10.1088/1755-1315/137/1/012099.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan Dan Pengembangan Desa*.

- Gai, A. M., Witjaksono, A., Wulandari, L. K., Sai, S. S., Rasyid, P A. (2023). Perwujudan Sustainable Livelihood bagi Masyarakat di sekitar Obyek Pariwisata Superprioritas Labuan Bajo. Penerbit Literasi Nusantara.
- Gubrium, J. F., & Holstein, J. A. (1997). Participant Observation. In *Qualitative Research Methods*. Sage Publications.
- Gunawan, N. A., Ruyadi, Y., & AliaA, M. N. (2017). Analisis Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Blok Pekauman Desa Astana Dengan Keberadaan Tradisi Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Di Cirebon. *SOSIETAS*.
- Gursoy, D., & Rutherford, D. G. (2004). Host attitudes toward tourism: An improved structural model. *Annals of Tourism Research*, 31(3), 495–516.
- Hall, C. M. (2007). *Equity in Tourism: Beyond Empowerment*. Channel View Publications.
- Hall, C. M. (2015). *Tourism and Public Policy*.
- Hall, D., & Rusher, K. (2004). Micro and Small Enterprises in Tourism: A Critical Review. *Tourism Recreation Research*.
- Hall, D., & Rusher, K. (2004). Micro and Small Enterprises in Tourism: A Critical Review. *Tourism Recreation Research*.
- Hasan, A. (2010). Participatory Development: The Story of the Orangi Pilot Project-Research and Training Institute and the Urban Resource Centre, Karachi, Pakistan. *Pakistan Development Review*, 49(2), 145–161.
- Heinrichs, H., Martens, P., & Michelsen, G. (2015). *The Handbook of Sustainability Research*. Springer.
- Hettige, H., Gunatilaka, R., & Maithripala, D. (1990). Community Involvement in Rural Water Supply Projects: A Case Study from Sri Lanka.

- Howard, S., & Moore, T. (2016). *The Role of Skills Training in Community Development: A Case Study from Rural Zambia*. Human Development Report. (2019). United Nations Development Programme. Retrieved from <http://hdr.undp.org/en/indicators/137506>
- Ife, Jim and Frank Tesoriero, 2006. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global*. Terjemahan Sastrawan Manullang, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*.
- Ioannides, D., & Apostolopoulos, Y. (2002). *Tourism Education and Local Communities*.
- Ja'far Ismail, M., Mawardi, M., & Iqbal, M. (2017). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Pariwisata Kota Batu Bagi Kawasan Sekitar (Studi Pada Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*.
- Johnston, A. M., & Baum, T. (2006). *Indigenous Peoples and Tourism: The Challenges and Opportunities*.
- Joshi, A., & Houtzager, P. P. (2012). Participation and Accountability at the Grassroots: Beneficiary Feedback Mechanisms in South Asia. *World Development*, 40(12), 271–281.
- Khan, A. M. A., Musthofa, I., Aminuddin, I., Handayani, F., Kuswara, R. N., & Wulandari, A. (2020). *Wisata Kelautan Berkelanjutan Di Labuan bajo, Masyarakat Kawasan Pesisir*.
- Kim, Rockli, Mohanty, S. K., & Subramanian, S. V. (2016). Multilevel Geographies of Poverty in India. *World Development*, 87, 349–359. doi: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.07.001>.

- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. Sage Publications.
- Laverack, G., & Wallerstein, N. (2001). Participation, Social Capital, and Intersectoral Action. *Social Science & Medicine*, 52(11), 1767–1778.
- Leal Filho, W. (2009). *Education for Sustainable Development: Challenges, Strategies, and Practices in a Globalizing World*. Peter Lang.
- Leitner, S., Meisch, S., *et al.* (2017). *Partnerships for Sustainable Development: A Conceptual Framework*. Routledge.
- Liu, M., Ge, Y., Hu, S., Stein, A., & Ren, Z. (2022). The Spatial–Temporal Variation of Poverty Determinants. *Spatial Statistics*. doi: 10.1016/j.spasta.2022.100631.
- Liu, Q. Q., Yu, M., & Wang, X. L. (2015). Poverty Reduction within the Framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda. *Advances in Climate Change Research*, 6(1), 67–73. doi: 10.1016/j.accre.2015.09.004.
- Liu, X., Pei, T., Zhou, C. H., Du, Y. Y., Ma, T., Xie, C. J., & Xu, J. (2018). A Systems Dynamic Model of a Coal-Based City with Multiple Adaptive Scenarios: A Case Study of Ordos, China. *Science China Earth Sciences*, 61(3), 302–316. doi: 10.1007/s11430-016-9077-5.
- Liu, Y., & Xu, Y. (2016). A Geographic Identification of Multidimensional Poverty in Rural China under the Framework of *Sustainable livelihoods* Analysis. *Applied Geography*, 73, 62–76. doi: 10.1016/j.apgeog.2016.06.004.
- Lustig, N., & McLeod, D. (2016). *Social Inclusion and Economic Development in Latin America*.

- Lustig, N., & McLeod, D. (2016). *Social Inclusion and Economic Development in Latin America*. Brookings Institution Press.
- Ma, Z., Chen, X., & Chen, H. (2018). Multi-Scale Spatial Patterns and Influencing Factors of Rural Poverty: A Case Study in the Liupan Mountain Region, Gansu Province, China. *Chinese Geographical Science*, 28(2), 296–312. doi: 10.1007/s11769-018-0943-9.
- Malhotra, A., Schuler, S. R., & Boender, C. (2002). *Measuring Empowerment: A Framework for Evaluation*.
- Martinez, M. G., & Garcia, M. C. (2018). *Promoting Social Inclusion in Urban Areas*.
- Martono, N. (2016). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Raja Grafindo Persada.
- Maulana, A. (2014). Strategi Pengembangan Wisata Spiritual di Kabupaten Bagung, Provinsi Bali. *Dari Jurnal Kepariwisataaan Indonesia*.
- Maulina, A., & Dewi, M. P. (2020). Innovation Strategy of Small Medium Enterprise (SME) Through Public-Private Partnership in Depok City. *Bijak*, 17(230–235), 230–235. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/bijak/article/view/1012/pdf>
- McIntyre, A. (2008). *Participatory Action Research*. Sage Publications.
- McMichael, A. J., Beaglehole, R., *et al.* (2003). *Health and Sustainable Development: Addressing the Issues and Challenges*. World Health Organization.
- McMillan, B., Florin, P., Stevenson, J., & Kerman, B. (2002). *Assessing Community Perceptions of Safety: A Comparison of Two Neighborhoods*.
- Merrill, R. M., & van der Geest, S. (1997). *The Political Ecology of Disease in Tanzania*. Transaction Publishers.

- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (2012). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Universitas Indonesia\_UI Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Modestus Ziku, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Desa Komodo Dalam Pengembangan Ekowisata Di Pulau Komodo. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*.
- Mohan, G., & Stokke, K. (2000). Participatory Development in the Context of Globalization. *Third World Quarterly*, 21(2), 247–268.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (26th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Nalle FW, Seran S, Bria F. (2022). Analisis Determinan Kemiskinan Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*.13(2):206–20.
- Narayan, D. (1995). *Community Participation in Development Projects: The World Bank Experience*.
- Natarajan, N., Newsham, A., Rigg, J., & Suhardiman, D. (2022). *A Sustainable livelihoods Framework for the 21st century*. *World Development*, 155, 105898. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105898>
- Nur faidatimu, muhammad khozin2 gerrykaton mahendra3 , 2021, Community Empowerment Program Model for MSMEs’ Actors Affected by Covid-19 in Special Region of Yogyakarta jurnal studi pemerintahan .=vol 12 no 2 Juli 2021
- O, P., Godfrey, N., Patti, K., Mike, A., An, N., Abisalom, O., ... John, O. (2007). *Spatial Determinants of Poverty in Rural Kenya*.

- Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(43), 16769–16774. doi: 10.1073/pnas.0611107104.
- Oqubay, A., & Lin, J. Y. (2016). *Natural Resource Governance and Inclusive Growth*. Routledge.
- Patel, P. C., & Lee, L. K. (2020). *Challenges in Promoting Local Economic Development*.
- Reed, P. (2017). Sustainable Development Goals: Their Impact on Forests and People. *Forests*, 8(10), 343.
- Rifkin, S. B. (2003). Participation, Social Capital, and Intersectoral Problem Solving: African Experiences in Building Capacity for Primary Health Care.
- Rifkin, S. B. (2014). Community Participation and Empowerment in Primary Health Care. *Social Science & Medicine*, 59(2004), 237–246.
- Rifkin, S. B., Muller, F., & Bichmann, W. (1988). Community Participation and Empowerment in Primary Health Care Projects in Rural Bangladesh. *The International Journal of Health Planning and Management*, 3(3), 197–210.
- Rodrik, D. (2006). Local Economic Development and Institutions. *Handbook of Economic Growth*, 1(1), 1–21.
- Rowe, G., & Frewer, L. J. (2000). *Participation and the Quality of Environmental Decision Making*.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2011). *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*. Sage Publications.
- Saleh, B., Dajani, M., Al-Zubi, F., & Qubain, H. (2006). Community Participation and the Role of Women in Water Resources Management: A Case Study from the Middle East and North Africa Region. *International Journal of Water Resources Development*, 22(3), 403–422.

- Sasongko, I., & Azzizi, V. T. (2024). Sustainable Tourism as a Strategic Rural Development: A Case Study in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 248-267.
- Sasongko, I.; Gai, A.M.; Azzizi, V.T. (2024). Sustainable Development Concept of Heritage Kampung Tourism Using Novel Prioritization Approach. *Sustainability*, 16, 2934. <https://doi.org/10.3390/su16072934>
- Sasongko, I., Imaduddina, AH, & Widodo, WHS (2021). Perbaikan Lingkungan Kampung Kota dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Malang. *Pawon: Jurnal Arsitektur* , 5 (1), 117-136.
- Sen, A. (1985). *The Capability Approach*. In *Advancing Human Development: Theory and Practice*. UNDP Occasional Paper.
- Serrat, O. (2017). *The Sustainable livelihoods Approach*. In *Knowledge Solutions* (pp. 21–26). Springer Singapore.
- Shivakoti, G., & Shrestha, S. (2005). Analysis of Livelihood Asset Pentagon to Assess the Performance of Irrigation Systems. *Water International - WATER INT*, 30, 363–371. doi: 10.1080/02508060508691877.Zimbabwe National Geospatial and Space Agency (ZINGSA).
- Smith, A., & Ricardo, C. (2018). *Skills Development for Poverty Reduction in Low-Income Countries: A Critical Review of the Literature*.
- Smith, M. K., & Williams, G. (2019). *Promoting Local Economic Development through Strategic Planning*.
- Steven, P., Putra, E., & Parno, R. (2018). *Komodo Di Desa Komodo Nusa Tenggara Timur*. Prosiding Sintesa, November.
- Subandi, S. (2011). *Ekonomi Pembangun*. Alfabeta.

- Sulaeman, A., Ismowati, M., Cyntia Dewi Anggraini, Anisa Hairani, Rifa Arifiananingtyas, & Bambang Prabowo. (2022). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Umkm Di Kawasan Super Prioritas Nasional Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. *Res Publica : Journal of Social Policy Issues*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.59689/rp.v1i2.50>
- Thalib, A., & M. (2019). Dari Legian ke Ara: Pengelolaan Pariwisata dan perubahan Sosial Indonesia. *Sosioireligius*.
- Tiffen, M., Mortimore, M., & Gichuki, F. (1994). More people, less erosion: Environmental recovery in Kenya. Chichester, UK: John Wiley.
- TIMB (2018). Annual Statistical Report 2018. Tobacco Marketing Board of Zimbabwe
- Titing Koerniawati, F. . (2022). DESTINASI WISATA, SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i1.52>
- Tong, R. (1993). *Feminine and feminist ethics*. Belmont, Calif.: Wadsworth Pub. Co.
- Tulus Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES.
- UNDP (1990). *Human Development Report 1990*. Published for the United Nations Development Programme (UNDP). New York and Oxford: Oxford University Press.
- UNDP (2017). *Guidance note: Application of the Sustainable livelihoods Framework in development projects*. Panama City: United Nations Development Programme, Regional Centre for Latin America and the Caribbean.

- UNWTO. (2019). *Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan: Panduan Praktis untuk Pengambil Keputusan*. World Tourism Organization.
- van Dijk, T. (2011). *Livelihoods*, capitals and livelihood trajectories: A more sociological conceptualisation. *Progress in Development Studies*, 11(2), 101–117.
- van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). The Social Psychology of Collective Action, Identity, Injustice and Gender. *Introduction to Social Psychology*, 91–107.
- Vicol, M. (2018). Potatoes, Petty Commodity Producers and *Livelihoods*: Contract Farming and Agrarian Change in Maharashtra, India. *Journal of Agrarian Change*, 19(1), 135–161.
- Wang, D., & Garcia, M. (2017). *Local Entrepreneurship and Innovation: Drivers for Economic Development*.
- Wang, D., & Li, X. (2020). *Empowering Communities through Sustainable livelihoods: Lessons from the Field*.
- WCED (1987). *Our common future*. Oxford: Oxford University Press.
- Weis, T. (2010). The accelerating biophysical contradictions of industrial capitalist agriculture. *Journal of Agrarian Change*, 10(3), 315–341.
- Wibowo, F. S., Harapan, A. D., Damanik, D., & Nurhidayati, H. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Agrowisata Belimbing Dewa di Kelurahan Pasir Putih Depok Jawa Barat. *Tourism Scientific Journal*, 61-84
- Wilson, K. (2012). *Race, racism and development: Interrogating history, discourse and practice*. London: Zed Books.
- World Bank (2016). *Poverty and shared prosperity 2016: Taking on inequality*. Washington DC: World Bank.

- Wynberg, R., & Hauck, M. (2018). Indigenous Peoples, Consent, and Benefit Sharing: Lessons from the San-Hoodia Case.
- ZINGSA, (2020). Technical report on revision of Zimbabwe agro-ecological zones. Harare: Government of Zimbabwe under
- Campbell, B., Luckert, M., & Mutamba, M. (2003). Household *Livelihoods* in Semi-Arid Regions: Is There a Way out of Poverty. *Currents: New Scholarship in the Human Services*, 31/32(1), 4–10.





# GLOSARIUM

---

---

<b>Ekonomi</b>	Sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat atau negara.
<b>Holistik</b>	Pendekatan yang mempertimbangkan keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian terpisah.
<b>Kemiskinan</b>	Keadaan di mana seseorang atau kelompok kurang memiliki sumber daya materi atau keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
<b>Komunitas</b>	Kelompok orang yang tinggal atau bekerja bersama dan memiliki kepentingan atau tujuan bersama.
<b>Kualitas</b>	Karakteristik atau sifat-sifat yang membedakan atau menggambarkan sesuatu.
<b>Lingkungan</b>	Sekeliling fisik dan biologis tempat tinggal, meliputi udara, air, tanah, flora, dan fauna.
<b><i>Livelihoods</i></b>	Sumber kehidupan; cara seseorang atau kelompok memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup.
<b>Pariwisata</b>	Industri yang berkaitan dengan perjalanan dan kunjungan wisata untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau edukasi.

<b>Pembangunan</b>	Proses perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi.
<b>Realitas</b>	Keadaan sebenarnya atau fakta yang terjadi, bukan imajinasi atau harapan.
<b><i>Sustainable</i></b>	Berkelanjutan; mampu bertahan dan berkembang tanpa merugikan lingkungan atau kehidupan masa depan.

# INDEKS

---

## A

aksesibilitas · 7, 11, 113, 129,  
139, 150, 151, 166

---

## C

*case method* · 194

---

## D

deduksi · 55  
disparitas · 176  
distribusi · 17, 31, 52, 53, 54, 60,  
61, 65, 128, 129, 133, 138,  
152, 154, 156, 165, 169, 180,  
181, 210  
domestik · 5, 44, 103

---

## E

ekonomi · i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20,  
21, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33,  
34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  
45, 50, 51, 53, 59, 67, 69, 71,  
72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82,  
83, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97,  
98, 99, 101, 102, 104, 109,  
111, 114, 118, 119, 120, 122,  
123, 125, 126, 127, 129, 130,  
131, 132, 133, 138, 139, 141,  
142, 149, 150, 151, 152, 153,  
154, 155, 156, 157, 158, 160,  
161, 162, 163, 165, 166, 169,

171, 172, 173, 174, 180, 181,  
182, 183, 187, 188, 189, 211,  
215  
emisi · 137  
etnis · 10, 166

---

## F

finansial · 21, 94, 117, 128, 132,  
174, 182

---

## G

geografis · 9, 33, 41, 66, 104  
globalisasi · 39, 41

---

## I

implikasi · 50, 62, 75  
infrastruktur · 2, 6, 7, 9, 11, 22,  
31, 36, 44, 45, 60, 67, 68, 69,  
70, 71, 80, 81, 82, 96, 100,  
102, 104, 112, 114, 128, 129,  
137, 153, 154, 155, 156  
inklusif · 2, 19, 33, 121, 131,  
138, 140, 151, 157, 160, 171,  
175, 178  
inovatif · 78, 140  
investasi · 24, 30, 36, 44, 68, 69,  
80, 100, 102, 111, 121, 137,  
140, 150, 153, 154

---

## K

kolaborasi · 74, 83, 115, 116

komprehensif · 15, 35, 56, 58,  
99, 118, 119, 144, 146, 148,  
152, 215  
konkret · 4, 72, 94, 96, 98, 99,  
126, 172  
kredit · 36

---

## *M*

metodologi · 38, 51, 52, 55, 57  
moneter · 143

---

## *P*

politik · 17, 18, 25, 31, 40  
populasi · 147, 152

---

## *R*

regulasi · 37, 101, 106, 158, 159,  
161, 162, 163, 164, 165, 166,  
173, 174, 187, 188, 189  
relevansi · 42, 52, 171, 172

---

## *S*

sampel · 58, 148  
stabilitas · 120, 132, 149  
stakeholder · 8, 101, 102

---

## *T*

tarif · 83, 159  
teoretis · 65, 66  
transformasi · 9, 11, 180  
transparansi · 108

---

## *U*

universal · 121, 129

---

## *V*

varietas · 10

## BIOGRAFI PENULIS

---



### **Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si**

Lahir di Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Januari 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota ITN Malang dan melanjutkan S2 pada Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya Malang. Penulis pernah menempuh pendidikan non-gelar pada *Credit Earning Program* (CEP) di Universitas Indonesia pada Program Kajian Pengembangan Perkotaan. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Doktoral (S3) pada Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, pada IPB University. Penulis merupakan anggota dan pengurus Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Timur dan merupakan tenaga ahli tersertifikasi ahli utama.



Buku Monograf

Kualitas **KEMISKINAN**  
Dalam Kerangka  
**SUSTAINABLE  
LIVELIHOODS**

DI KAWASAN PARIWISATA SUPERPRIORITAS LABUAN BAJO

Buku “Kualitas Kemiskinan Dalam Kerangka Sustainable Livelihoods Di Kawasan Pariwisata Superprioritas Labuan Bajo” ini membahas kualitas kemiskinan di Labuan Bajo, destinasi pariwisata superprioritas. Memanfaatkan kerangka sustainable livelihoods, penulis menyelidiki dampak perubahan ekonomi dan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Melalui analisis mendalam, buku ini mengungkap tantangan yang dihadapi komunitas lokal sambil menyoroti peluang peningkatan kualitas kehidupan. Dari pengelolaan sumber daya alam hingga dampak pariwisata, pembaca diajak memahami dinamika kompleks dan mengeksplorasi solusi berkelanjutan. Sebagai panduan komprehensif, buku ini tidak hanya mengurai masalah, tetapi juga menawarkan landasan konseptual untuk pembangunan yang berkelanjutan di Labuan Bajo. Sebuah karya yang memberikan wawasan mendalam untuk memahami perjalanan masyarakat dalam konteks pariwisata yang berkembang pesat.



 [mediapenerbitindonesia.com](http://mediapenerbitindonesia.com)  
 +6281362150605  
 Penerbit Idn  
 @pt.mediapenerbitidn

